

**INVESTIGASI EKONOMETRIKA DATA PANEL TERHADAP VOLUME
PERDAGANGAN INDONESIA**

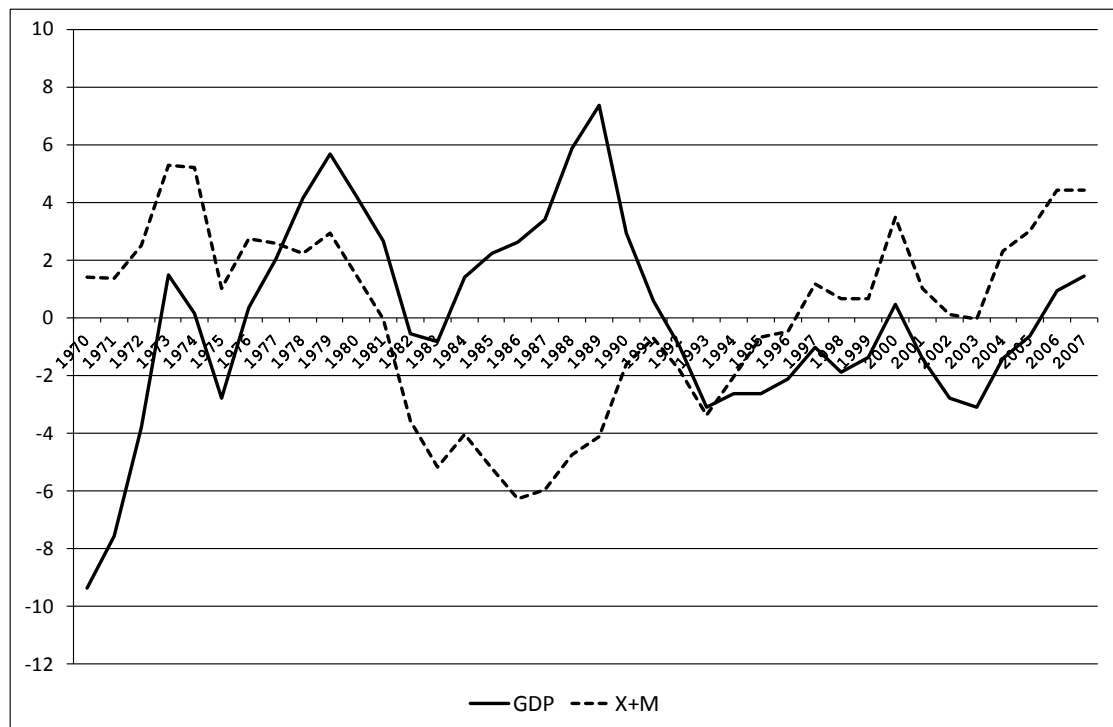
Oleh : YANTO

ABSTRAKS
(belum diketik:lihat lampiran)

Latar Belakang

Perdagangan dunia dari tahun ke tahun terus menerus mengalami peningkatan. Liberalisasi perdagangan dipercaya dapat meningkatkan efisiensi, baik di tingkat produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dengan perdagangan, harga yang ditawarkan menjadi lebih murah, dan barangnya pun menjadi lebih beragam. Data perdagangan dunia menunjukkan (*United Nations*, <http://unstats.un.org>, *data diolah*) bahwa memang terjadi peningkatan nilai perdagangan (ekspor+impor) dari tahun 1970 sampai 2007 dengan pertumbuhan eksponensial 5,85 persen, dimana tahun 2007 nilai nominalnya mencapai US\$ 34,14 triliun, dua kali lipat dibandingkan satu dekade yang lalu; sementara pertumbuhan outputnya sebesar 2,88 persen, dimana tahun 2007 nilai nominalnya mencapai US\$ 54,64 triliun, dua kali lipat dibandingkan dua dekade yang lalu.

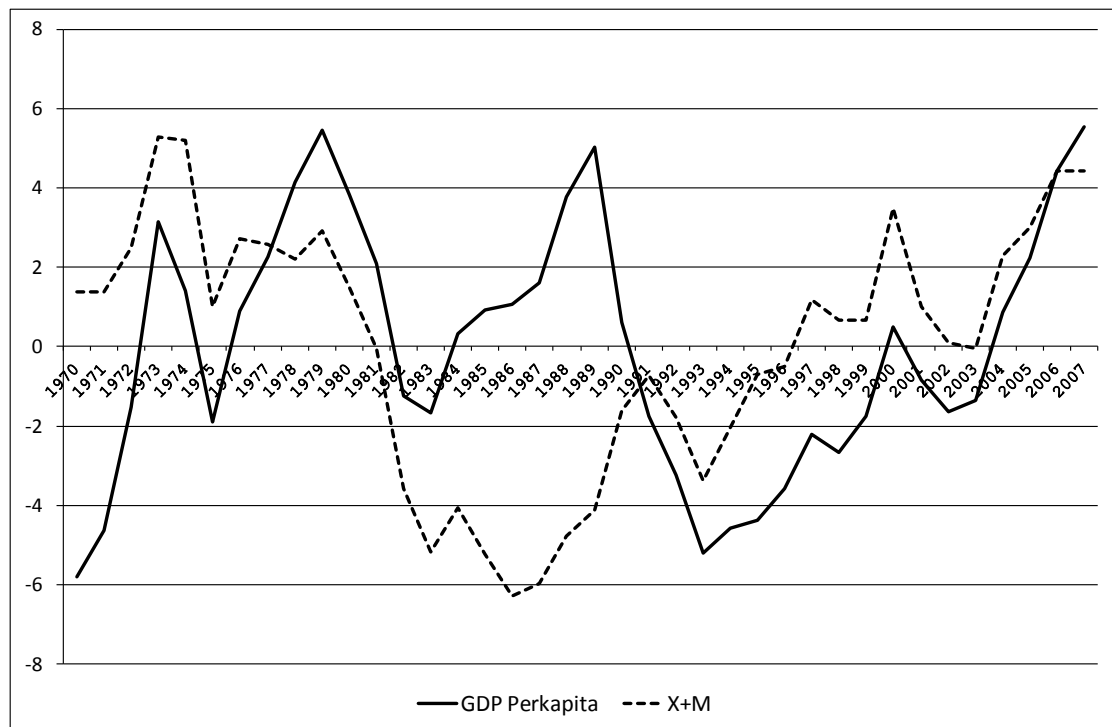
Lebih lanjut, trend GDP (*Gross Domestic Products*) dunia berfluktuatif searah dengan trend perdagangan dunia, tetapi bertolak belakang untuk tahun 1977, 1978, dan 1985 sampai 1991; dimana residual dari trend (*residual from trend*) (Gambar I.1) untuk GDP berkisar antara -9,37 dan 7,36 persen, sementara perdagangannya berkisar antara -6,29 dan 5,29 persen.



Sumber: <http://unstats.un.org>, (1970–2007) (data diolah)

Gambar I.1. Persentase Residual GDP dan Ekspor+Impor Dunia, dari Trend

Selain mencerminkan pendapatan, faktor GDP juga dapat mencerminkan produktivitas; dalam hal ini menggunakan indikator GDP perkapita; dimana produktivitas akan mendorong terjadinya perdagangan. Data *United Nations* menunjukkan bahwa trend GDP perkapita dunia berfluktuatif searah dengan trend perdagangan dunia, tetapi bertolak belakang untuk tahun 1977, 1978, 1985, 1986, 1990, dan 1991; dimana residual dari trend (*residual from trend*) (Gambar I.2) untuk GDP perkapita berkisar antara -5,80 dan 5,54 persen, sementara perdagangannya berkisar antara -6,29 dan 5,29 persen.



Sumber: <http://unstats.un.org> (1970-2007) (data diolah)

Gambar I.2. Persentase Residual GDP Perkapita dan Ekspor+Impor Dunia, dari
Trend

Sekarang ini, Asia merupakan pusat gravitasi ekonomi global, dimana Produk Domestik Bruto (PDB) –nya hampir mencapai PDB Eropa dan Amerika Utara, dan terus mengalami peningkatan (ADB, 2008). Keberhasilan ini merupakan refleksi dari semakin mantapnya kerjasama ekonomi regional, dan akan menjadi sangat penting bagi pembangunan di Asia.

Perkembangan ekspor–impor Indonesia dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2007, total ekspor Indonesia mencapai US\$ 127,08 milyar dengan rata–rata pertumbuhan per tahun selama sepuluh tahun terakhir sebesar 5,87 persen; sementara impornya mencapai US\$ 109,64 milyar dengan rata–rata pertumbuhan per tahun selama sepuluh tahun

terakhir sebesar 4,09 persen (UN, 1998–2007, *data diolah*). Perkembangan nilai ekspor dan impor yang terus mengalami peningkatan menunjukkan bahwa Indonesia semakin terbuka terhadap perdagangan internasional, di mana porsi perdagangan Indonesia terhadap GDP tahun 2007 adalah sebesar 54,69 persen. Bila Indonesia menjadi semakin terbuka terhadap perdagangan dunia atau menjadi perekonomian yang makin berorientasi pasar, maka peran keunggulan komparatif akan semakin besar sebagai penentu aliran perdagangan internasional.

Dewasa ini, peran perdagangan internasional menjadi semakin penting dalam meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Banyak negara melakukan kerjasama ekonomi regional, seperti: EEC (*European Economic Community*), NAFTA (*North America Free Trade Area*), LAFTA (*Latin America Free Trade Area*), APEC (*Asia–Pasific Economic Cooperation*), AFTA (*ASEAN (Association of South East Asian Nations) Free Trade Area*), dan lain–lain, dengan maksud untuk mempererat dan memperbanyak hubungan dagang antar anggota dalam wilayah atau kawasan tersebut.

Perdagangan luar negeri Indonesia, dilihat dari porsinya terhadap total PDB, untuk kurun waktu 2003 – 2007 adalah rata–rata sebesar 57,7 persen per tahun, menunjukkan nilai yang kecil dibandingkan dengan negara tetangga yang lebih dari 100 persen, seperti: Singapura (rata–rata 433,3 persen), Malaysia (rata–rata 205,6 persen), dan Thailand (rata–rata 138,3 persen) (ADB, 2003 – 2007; *harga berlaku*). Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa relatif masih kurang terbuka terhadap perdagangan internasional. Adapun yang menjadi pertanyaan

dalam penelitian ini adalah bagaimana kepemilikan faktor mempengaruhi volume perdagangan Indonesia.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana pengaruh kepemilikan faktor dari masing-masing negara terhadap perdagangan bilateral Indonesia.

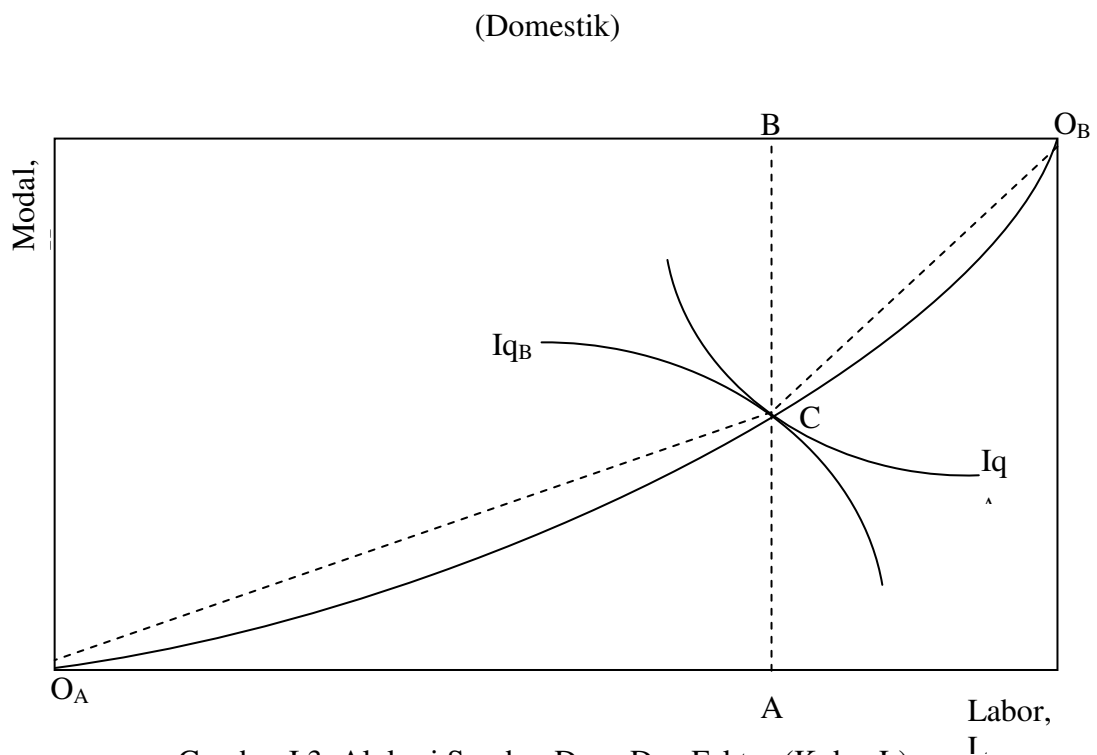
Landasan Teori

Teori perdagangan internasional yang melatarbelakangi terjadinya liberalisasi antara lain adalah teori keunggulan komparatif dan teori *factor endowments*. David Ricardo (1817) menyempurnakan teori keunggulan absolut dari Adam Smith dengan mengemukakan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif menyatakan dalam keadaan *free trade*, apabila salah satu negara kurang efisien dibandingkan negara lainnya dalam memproduksi kedua barang tersebut, kedua negara masih dimungkinkan melakukan perdagangan dan menguntungkan kedua belah pihak. Negara yang pertama harus melakukan spesialisasi dalam produksi komoditas yang keunggulan komparatifnya lebih besar dan mengimpor komoditas yang keunggulan komparatifnya lebih kecil. Perdagangan antara dua negara akan menguntungkan kedua belah pihak jika masing-masing negara memproduksi dan mengekspor produk yang keunggulan komparatifnya dikuasai (Krugman dan Obstfeld, 2003:12).

Gagasan mengenai sumber utama perdagangan internasional karena adanya perbedaan karunia sumber daya (kepemilikan faktor) antar negara merupakan suatu landasan teori yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu ekonomi internasional. Teori ini dikembangkan oleh dua ekonomi berkebangsaan Swedia, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, sehingga teori ini dikenal sebagai teori Heckscher–Ohlin. Teori ini menekankan pada perbedaan proporsi faktor–faktor produksi dan perbedaan proporsi penggunaannya dalam memproduksi berbagai macam barang, sehingga dinamakan teori proporsi faktor produksi (*factor–proportion theory*). Heckscher–Ohlin mengembangkan teori perdagangan yang bersumber pada penawaran faktor produksi (*supply of factors*) yang dimiliki oleh suatu negara untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan perdagangan. Menurut H–O, setiap produsen memiliki *supply–base* yang bersumber dari *factor endowments* yang berlimpah di negaranya, hal ini menyebabkan biaya akses ke faktor produksi dan memproduksi barang akhir menjadi lebih murah sehingga akan mendorong terjadinya ekspor. Perbedaan *opportunity cost* suatu produk antara suatu negara dengan negara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) masing–masing negara. Secara umum, negara–negara cenderung mengekspor barang yang proses produksinya banyak menggunakan faktor produksi yang dimiliki secara berlimpah (Krugman dan Obstfeld, 2003:67-75).

Alokasi sumber daya dalam sebuah perekonomian dua faktor dapat dianalisis dengan menggunakan diagram kotak *Edgeworth–Bowley*. Alokasi sumber daya di antara dua faktor ditunjukkan oleh satu titik keseimbangan

produsen, titik C untuk barang A dan B yang dicapai secara simultan, yang ditunjukkan oleh persinggungan isoquan barang A dan barang B. Titik ini juga merupakan tingkat pertukaran input labor dan modal antara produsen A dan produsen B yang *pareto optimal* (Stolper dan Samuelson, 1941).

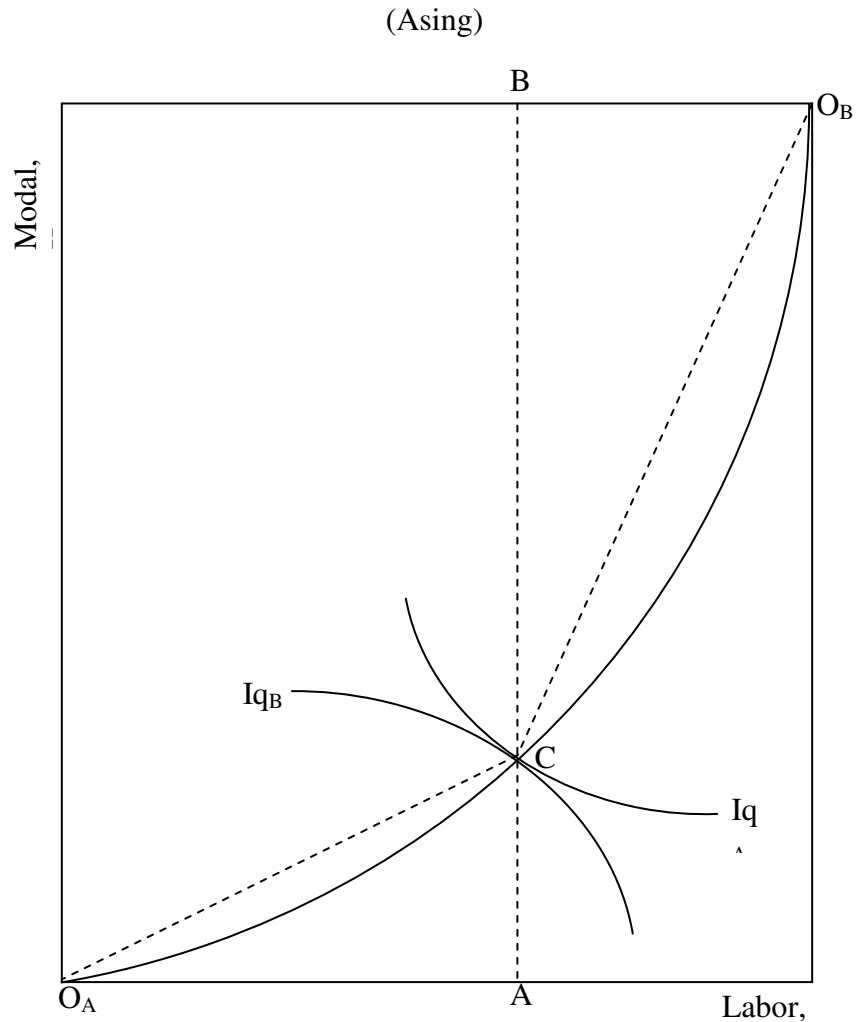


Gambar I.3. Alokasi Sumber Daya Dua Faktor (K dan L)

Sumber: Stolper dan Samuelson, 1941.

Sisi labor pada domestik (Gambar I.3) lebih panjang daripada sisi modal, karena itu domestik *labor abundant–capital poor*. Sisi modal pada asing (Gambar II.8) lebih panjang daripada sisi labor, karena itu asing *capital abundant–labor poor*. Barang A menunjukkan insentif labor karena slope $AC = (\delta K / \delta L)$ lebih kecil dari slope $BC = (\delta K / \delta L)$. Barang B menunjukkan insentif modal karena

slope $BC = (\delta K/\delta L)$ lebih besar dari slope $AC = (\delta K/\delta L)$ (Krugman dan Obstfeld, 2003:72–3).

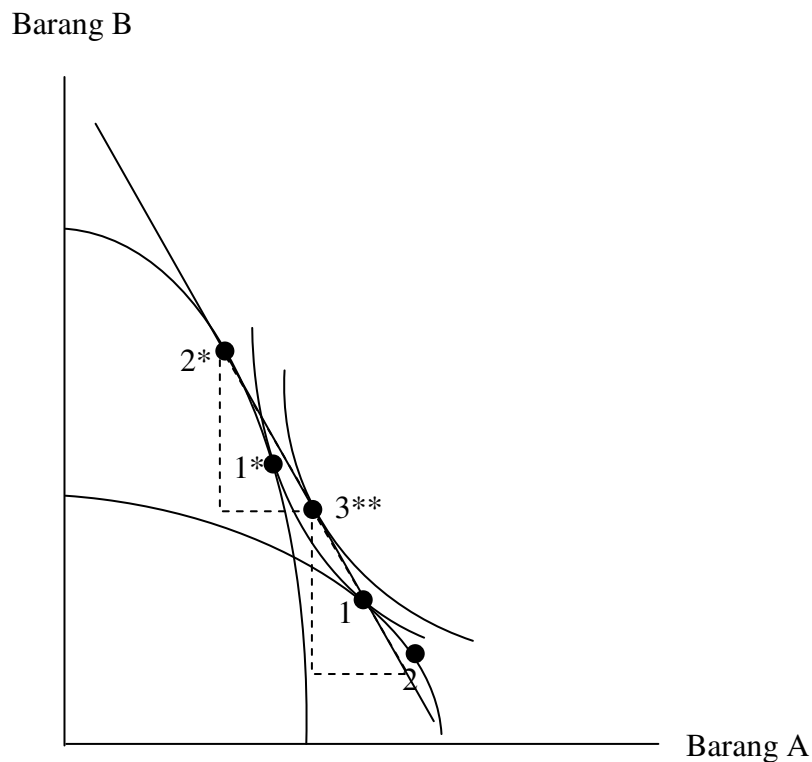


Gambar I.4. Alokasi Sumber Daya Dua Faktor (K dan L)

Sumber: Stolper dan Samuelson, 1941.

Kurva $O_A C O_B$ disebut juga *contract curve* merupakan tempat kedudukan titik–titik yang menjadi kontrak antara produsen A dan produsen B dalam menggunakan input labor dan modal. Dengan kata lain, bila produsen A menambah labor dengan mengurangi modal, maka produsen B akan menambah modal dengan mengurangi labor. *Contract curve* juga merupakan PPC (*Product*

Possibility Curve) yang menggambarkan kombinasi barang A dan barang B yang dapat dihasilkan dengan menggunakan input labor dan modal (Stolper dan Samuelson, 1941).



Gambar 1.5. Keunggulan Perdagangan dalam Teori H–O

Sumber: Krugman dan Obstfeld, 2003:75.

Domestik yang *labor abundant–capital poor*, memiliki keunggulan komparatif untuk memproduksi barang A yang intensif labor. Asing yang *capital abundant–labor poor*, memiliki keunggulan komparatif untuk memproduksi barang B yang insentif modal. Titik 1 atau 1* merupakan kondisi *autarky* yang menunjukkan jumlah barang A dan B yang dapat diproduksi dengan penggunaan labor dan modal. Ketika perekonomian mengurangi jumlah penggunaan salah satu input dan menambah input yang lain untuk meningkatkan produksi barang

tertentu, misalkan domestik mengurangi penggunaan input modal dengan menambah penggunaan input labor untuk meningkatkan produksi barang A, maka kondisi perekonomian berada pada titik 2 atau 2*; selanjutnya, sebagian barang A yang padat karya ini akan diekspor ke negara asing. Asing akan melakukan yang sebaliknya, dan mengkespor sebagian barang B yang padat modal ke domestik. Kondisi ini akan berada pada titik 3**. Dengan demikian, dengan adanya perdagangan, masing-masing negara akan mendapat jumlah output yang lebih banyak daripada tidak berdagang.

New trade theory menjelaskan bahwa hubungan perdagangan juga dapat bersumber dari imbalan yang terus meningkat (*increasing return*) atau skala ekonomis, artinya, kecenderungan biaya makin turun dengan meningkatnya output, memberikan suatu dorongan bagi negara-negara untuk melakukan spesialisasi dan melakukan perdagangan satu sama lain, meskipun sumber daya dan tingkat teknologi mereka tidak berbeda. Skala ekonomi menyebabkan terciptanya struktur persaingan tidak sempurna. Dalam persaingan monopolistik, suatu sektor industri berisi sejumlah perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang berbeda (*differentiated products*). Perdagangan internasional menciptakan suatu pasar global gabungan yang lebih besar dari pasar nasional, sehingga memungkinkan ditawarkannya berbagai macam produk yang semakin beragam dengan harga yang lebih murah kepada konsumen (Freenstra, 2002:II-5,6).

Spesifikasi Model

Spesifikasi modelnya adalah mengadopsi model gravitasi Cieřlik (2006, 2007), yang mana model ini cocok untuk kondisi perdagangan Indonesia yang cenderung pada teori perdagangan H–O (*north and south trade*); kemudian peneliti menambah sejumlah variabel *dummy* dengan maksud untuk melihat adanya perbedaan volume perdagangan di antara masing–masing grup rekan dagangnya (ASEAN, HIEs, NICs); sehingga model pengembangannya menjadi:

$$\begin{aligned} \text{Log } T_{ijt} = & \beta_0 + \beta_1 \log |y_{it} - y_{jt}| + \beta_2 \log (y_{it} + y_{jt}) + \beta_3 \log (1 - s_{it}^2 - s_{jt}^2) \\ & + \beta_4 \log (Y_{it} + Y_{jt}) + \beta_5 \log J_{ijt} + \sum_k \delta_k D_{kijt} + \varepsilon_{ij} + v_t + \mu_{ijt} \end{aligned}$$

dimana:

- T_{ij} = perdagangan (ekspor+impor) negara i dan j
- y_i = rasio modal–labor atau GDP perkapita negara i
- y_j = rasio modal–labor atau GDP perkapita negara j
- $1 - s_{it}^2 - s_{jt}^2$ = Indeks kesamaan GDP Helpman, dimana:
 $s_i = \text{GDP}_i / (\text{GDP}_i + \text{GDP}_j)$ dan $s_j = \text{GDP}_j / (\text{GDP}_i + \text{GDP}_j)$
- Y_i = GDP negara i
- Y_j = GDP negara j
- J_{ij} = jarak relatif ibukota negara i dan j. $J_{ij} = (J_i + J_j)$, dimana:
 $J_i = J_{ij} \text{absolut} / (\text{GDP}_i / \text{GDP}_W)$ dan $J_j = J_{ij} \text{absolut} / (\text{GDP}_j / \text{GDP}_W)$
- $\delta_k D_{ij}$ = preferensi *dummy*
 ASEAN = *Association of South Asian Nations*
 HIEs = *High Income Economies*
 NICs = *Newly Industrial Countries*
- ε = efek pasangan i dan j
- v = efek waktu
- μ = *error term*
- t = periode tahunan
- GDP_W = GDP dunia

Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat

1. T, merupakan volume dagang, yaitu penjumlahan nilai ekspor dan impor Indonesia dengan rekan dagangnya yang dinyatakan dalam satuan riil US\$,

2000 = 100, dengan cara dideflasi dengan GDP PPP (*Purchasing Power Parity*) deflator.

Variabel penjelas

2. $|y_i - y_j|$, merupakan selisih absolut GDP perkapita antara dua negara yang berdagang dalam satuan riil US\$. Variabel ini mencerminkan perbedaan faktor proporsi modal–labor (*relative factor endowments*) antara Indonesia dan rekan dagang. Semakin berbeda atau semakin besar perbedaannya, maka semakin besar pula volume dagangnya. Koefisiennya diharapkan positif.
3. $(y_i + y_j)$, merupakan penjumlahan GDP perkapita antara dua negara yang berdagang dalam satuan riil US\$. Dalam model Heckscher–Ohlin–Samuelson (Cieřlik, 2006, 2007), dampak dari penjumlahan rasio modal–labor ini akan menurunkan volume perdagangan, karena adanya efek *price equalization* (Heckscher–Ohlin–Samuelson, H–O–S *Theorem*), yaitu perdagangan akan menyamakan harga atau menyamakan rasio modal–labor di kedua negara tersebut; dengan asumsi adanya perubahan atau pergerakan yang mengarah kepada padat modal; atau pergerakan dari padat karya menjadi padat modal lebih cepat daripada pergerakan padat modal. Koefisiennya diharapkan negatif.
4. $(1 - s_{it}^2 - s_{jt}^2)$, merupakan indeks kesamaan GDP Helpman (ukuran relatif GDP i dan j terhadap total GDP_{ij}). Semakin sama GDP antara negara yang berdagang, semakin besar pula volume dagangnya (*share of intra–industry trade*) (Egger, 2000). Indeks ini mencerminkan distribusi pendapatan dari negara–negara yang diamati (kesamaan struktur permintaan). Karena indeks

ini bertujuan untuk menyamakan GDP, maka GDP yang digunakan adalah GDP PPP dalam satuan riil US\$. Koefisiennya diharapkan positif.

5. $(Y_i + Y_j)$, merupakan penjumlahan nilai GDP PPP antara dua negara yang berdagang dalam satuan riil US\$. Variabel ini mencerminkan ukuran dan *factor endowments* (pendapatannya), maka semakin besar *endowment*-nya maka semakin besar pula volume dagangnya . Koefisiennya diharapkan positif.
6. J_{ij} , merupakan jarak relatif ibukota antara negara i dan negara j , mencerminkan hambatan perdagangan. Pengukuran jarak adalah dalam satuan kilometer; dimana jarak relatif tersebut adalah jarak relatif negara i ditambah dengan jarak relatif negara j . Jarak relatif adalah jarak dalam satuan kilometer berbanding dengan porsi GDP-nya terhadap GDP dunia (Fukunari dan Hyun-Hoon, 2006). Untuk mencerminkan ukuran relatifnya, maka GDP yang digunakan adalah dalam satuan harga berlaku US\$. Koefisiennya diharapkan negatif.
7. $\delta_k D_{kij}$, merupakan sejumlah preferensi *dummy* yang menunjukkan rekan dagang Indonesia adalah ASEAN (Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, dan Viet Nam), HIEs (Australia, Brunei Darussalam, Canada, Japan, New Zealand, dan United States), dan NICs (Hong Kong, Republik of Korea, Singapore, dan Taiwan). Pengkodean variabel *dummy*-nya adalah: (1) bila rekan dagangnya adalah negara ASEAN, maka nilai *dummy*-nya adalah satu, dan nol jika lainnya; (2) bila rekan dagangnya adalah negara HIEs, maka nilai *dummy*-nya adalah satu,

dan nol jika lainnya; (3) bila rekan dagangnya adalah negara NICs, maka nilai *dummy*-nya adalah satu, dan nol jika lainnya; sehingga koefisiennya diharapkan positif.

Fixed Effects Model (FEM) versus Random Effects Model (REM)

Umumnya, model gravitasi diestimasi dengan menggunakan metode *pooling data (Pooled Least Squares)*, sehingga ada tiga kemungkinan estimasi model, yaitu *common model (CM)*, *fixed effects model (FEM)*, dan *random effects model (REM)*. CM menunjukkan tidak ada perbedaan antara efek *cross-section* dan efek *time series*. Oleh karena itu *common model* diestimasi dengan cara OLS (*Ordinary Least Squares*). FEM memperhatikan perbedaan efek *cross-section* maupun efek *time series*, sehingga masing-masing memiliki perbedaan *intercept* karena efek tersebut. Estimasi FEM dilakukan dengan cara menambahkan variabel *dummy (Least Square Dummy Variable* atau LSDV). REM memperhatikan efek *error term* di dalam model, yaitu komponen *error* dalam *cross-section* maupun komponen *error* dalam *time series (error components model, ECM)*. Estimasi REM dilakukan dengan cara *generalized least squares* atau GLS (Gujarati, 2004:636–52).

Dari ketiga kemungkinan estimasi yang diutarakan di atas, peneliti akan memfokuskan pada estimasi dengan menggunakan model FEM dan REM. Alasannya adalah bahwa dalam perdagangan bilateral Indonesia diyakini terdapat perbedaan pola perdagangan bilateral yang kemungkinannya disebabkan oleh efek pasangan (ε_{ij}) maupun efek waktu (v_t). Selanjutnya, dari model FEM dan REM yang diestimasi tersebut, belum diketahui mana yang terbaik dalam menjelaskan

pengaruh variabel penjelas terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, apakah penggunaan *dummy* lebih baik daripada penggunaan komponen *error*, atau malah sebaliknya. Pemilihan model terbaik untuk tujuan analisis hasil olahan, menggunakan *Hausman test*, dengan cara membandingkan nilai *Chi-square statistic* dengan distribusi *Chi-square*. *Hausman test* ini melihat perbedaan nilai koefisien yang diperoleh dari model REM dan FEM, dengan formula (Baltagi, 2001:65–6):

$$\text{Hausman } \chi^2 = (\hat{\beta}_{\text{LSDV}} - b_{\text{GLS}})' \{ \text{Var}[\hat{\beta}_{\text{LSDV}}] - \text{Var}[b_{\text{GLS}}] \}^{-1} (\hat{\beta}_{\text{LSDV}} - b_{\text{GLS}})$$

Bila nilai *Chi-square statistic* melebihi nilai distribusi *Chi-square* dengan derajat bebas sebanyak koefisien yang dibandingkan, maka kita menolak hipotesis null; dengan kata lain terdapat perbedaan antara REM dan FEM, sehingga model FEM lebih tepat daripada menggunakan model REM.

Hal yang mendasar mengenai FEM dan REM adalah, bahwa FEM (LSDV) menggunakan metode OLS, sehingga dapat dikatakan bahwa, *ceteris paribus*, estimatornya adalah tidak bias; sementara REM menggunakan metode GLS, sehingga dapat dikatakan bahwa, *ceteris paribus*, variannya adalah minimum (efisien). Oleh karena itu, selama estimator FEM dan REM adalah sama (secara statistik), maka REM adalah yang terbaik. Tetapi bila estimasi REM adalah bias (*specific error* –nya berkorelasi dengan variabel penjelas, sehingga koefisien variabel penjelas menjadi bias), maka FEM adalah yang terbaik.

Hasil dan Pembahasan

Untuk memudahkan perhitungan di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program bantu EViews, agar hasil yang diperoleh akan menjadi lebih akurat dan memudahkan proses perhitungan.

1. Uji Akar–akar Unit, Derajat Integrasi dan Kointegrasi

Pengujian akar–akar unit dan derajat integrasi dimaksudkan untuk melihat apakah data sudah stasioner atau tidak. Pengujian uji akar–akar unit ini menggunakan pendekatan Fisher *test*, sebagaimana yang disarankan oleh Maddala dan Wu. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan pendekatan ADF Fisher *Chi-square*, variabel–variabel: $\log |y_{it} - y_{jt}|$, $\log (y_{it} + y_{jt})$, $\log (1 - s_{it}^2 - s_{jt}^2)$, dan $\log (Y_{it} + Y_{jt})$ memiliki akar–akar unit atau tidak stasioner, sementara variabel $\log T_{ijt}$ dan $\log J_{ijt}$ tidak memiliki akar–akar unit atau stasioner (tabel 2.1). Namun bila menggunakan pendekatan PP Fisher *Chi-square*, variabel $\log T_{ijt}$ dan $\log J_{ijt}$ juga memiliki akar–akar unit. Dengan adanya dua kesimpulan yang berbeda ini, maka lebih tepat untuk tidak membuat kesimpulan dari variabel $\log T_{ijt}$ dan $\log J_{ijt}$ ini.

Tabel 2.1
Uji Akar-akar Unit

Variabel		ADF Fisher χ^2	PP Fisher χ^2
$\log T_{ijt}$	YT	74,7152*	55,6952
$\log y_{it} - y_{jt} $	X1	33,5442	22,0617
$\log (y_{it} + y_{jt})$	X2	35,6630	27,9560
$\log (1 - s_{it}^2 - s_{jt}^2)$	X3	46,3103	26,8235
$\log (Y_{it} + Y_{jt})$	X4	33,6996	15,7557
$\log J_{ijt}$	X5	56,6600***	44,0966

Nilai kritis distribusi χ^2 , df=44: 1% = 68,7095; 5% = 60,4809; 10% = 56,3685

* Signifikan pada alpha 1%

** Signifikan pada alpha 5%

***Signifikan pada alpha 10%

Langkah selanjutnya adalah mengetahui pada derajat berapa data atau variabel–variabel tersebut stasioner. Untuk itu dilakukan uji derajat integrasi dengan proses diferensi. Pengujian ADF Fisher *Chi-square* dan PP Fisher *Chi-square* menunjukkan bahwa variabel–variabelnya stasioner pada derajat integrasi satu, I(1) (tabel 2.2). Karena semua variabel stasioner pada derajat integrasi yang sama, maka dapat dikatakan bahwa variabel–variabel tersebut berkointegrasi atau memiliki keseimbangan dalam jangka panjang, yang berarti bahwa bila variabelnya diregres pada derajat nol atau *level*, maka parameternya adalah menunjukkan parameter keseimbangan dalam jangka panjang.

Tabel 2.2
Uji Derajat Integrasi, I(1)

Variabel		ADF Fisher χ^2	PP Fisher χ^2
log T _{ijt}	YT	564,218*	1158,090*
log y _{it} - y _{jt}	X1	184,137*	307,402*
log (y _{it} + y _{jt})	X2	183,459*	189,623*
log (1 - s _{it} ² - s _{jt} ²)	X3	143,517*	135,382*
log (Y _{it} + Y _{jt})	X4	166,851*	167,978*
log J _{ijt}	X5	278,919*	294,298*

Nilai kritis distribusi χ^2 , df=44: 1% = 68,7095; 5% = 60,4809; 10% = 56,3685

* Signifikan pada alpha 1%

** Signifikan pada alpha 5%

***Signifikan pada alpha 10%

Selanjutnya adalah memastikan apakah memang variabel-variabelnya berkointegrasi. Menggunakan pendekatan Fisher *test*, hasilnya adalah berkointegrasi, CI(1, 1). Kesimpulan yang sama juga bila menggunakan pendekatan kointegrasi Panel PP-*Statistic* dan Panel ADF-*Statistic* (tabel 2.3).

Tabel 2.3
Uji Kointegrasi, CI(1, 1)

<i>Cointegration Test</i>	Variabel: YT, X1, X2, X3, X4, X5
Johansen Fisher Panel	1158,090*
Panel PP- <i>Statistic</i>	-20,09680*
Panel ADF- <i>Statistic</i>	-9,593338*
Group PP- <i>Statistic</i>	-11,64045*
Group ADF- <i>Statistic</i>	-7,112857*

Nilai kritis distribusi χ^2 , df=44: 1% = 68,7095; 5% = 60,4809; 10% = 56,3685

Nilai kritis distribusi Z: 1% = -2,3263; 5% = -1.6449; 10% = -1,2816

* Signifikan pada alpha 1%

** Signifikan pada alpha 5%

***Signifikan pada alpha 10%

2. Regression Output dan Hausman Test

Tabel 2.4
Konsistensi Parameter dan Signifikansinya

Variabel	Model 1	Model 2*)	Model 3*)	Model 4*)	Model 5*)	Model 6*)
<i>Constant</i>	- 347,6696* (40,5981)	- 247,4165* (30,6955)	- 291,1652* (37,7763)	- 220,5508* (29,1135)	- 322,9250* (40,0101)	- 241,6545* (30,6786)
$\log y_{it} - y_{jt} $	0,8697* (0,2540)	0,7873* (0,2530)	0,8196* (0,2532)	0,7638* (0,2485)	0,8234* (0,2532)	0,7624* (0,2476)
$\log (y_{it} + y_{jt})$	-13,5395* (1,1539)	-11,5217* (1,0259)	-11,8146* (1,0736)	-10,4656* (0,9612)	-12,5120* (1,1015)*	-10,9760* (0,9775)
$\log (1 - s_{it}^2 - s_{jt}^2)$	5,6714* (1,0035)	3,6516* (0,8486)	4,3801* (0,9385)	2,9945* (0,8017)	4,8398* (0,9575)	3,2731* (0,8093)
$\log (Y_{it} + Y_{jt})$	18,0691* (1,7257)	13,8612* (1,3217)	15,4740* (1,5904)	12,5380* (1,2335)	16,3863* (1,6298)	13,0871* (1,2508)
$\log J_{ijt}$	-0,5307 (0,4055)	-0,8674** (0,3924)	-0,6624 (0,4024)	-0,9066** (0,3842)	-0,5872 (0,4044)	-0,8676** (0,3839)
ASEAN					7,1319 (7,1982)	4,6807 (7,0177)
HIEs					19,5210** (8,2734)	17,5288** (8,0886)
NICs					22,6338** (9,1859)	19,9737** (8,9690)
Efek <i>Cross-Section</i>	FIXED	FIXED	RANDOM	RANDOM	RANDOM	RANDOM
Efek <i>Time-Series</i>	FIXED	RANDOM	FIXED	RANDOM	FIXED	RANDOM
Hausman Test: - CC Random - TS Random - CS-TS Random		- 15,1959* -	18,1726* - -	9,4375*** 8,7244 23,8049*		
R-squared	0,8343	0,7999	0,5395	0,2201	0,5465	0,2295
Adj R-squared	0,8184	0,7907	0,5141	0,2135	0,5189	0,2190
F-statistic	52,3794*	87,1752*	21,2419*	33,1875*	19,8127*	21,7850*

Nilai kritis distribusi t, df=541: 1% = 2,3333; 5% = 1,6477; 10% = 1,2831; SE di dalam tanda kurung

Nilai kritis distribusi χ^2 , df=5: 1% = 15,0863; 5% = 11,0705; 10% = 9,2364

Nilai kritis distribusi F, $df_1=5$, $df_2=588$: 1% = 3,0484; 5% = 2,2293; 10% = 1,8571

* Signifikan pada alpha 1%

** Signifikan pada alpha 5%

***Signifikan pada alpha 10%

*) Parameternya adalah bias

Pengujian Hausman pada tabel 2.4 dengan berbagai kombinasi efek menunjukkan bahwa model terbaiknya adalah menggunakan FEM (Model 1), karena menurut hasil pengujian pendekatan Hausman *test*, komponen *error* di dalam model berkorelasi dengan variabel penjelas, sehingga parameter REM adalah bias.

Hal yang menarik dari tabel 2.4 di atas adalah bahwa tanda (*plus-minus*) dari parameternya adalah konsisten; begitu juga dengan kesimpulan signifikansinya, kecuali variabel jarak. Untuk variabel preferensi dummy (ASEAN, HIEs, NICs), tentunya tidak dapat diregres dalam model FEM, dimana dalam dua model REM, variabel dummy ini juga menunjukkan konsistensinya dalam tanda dan signifikansi. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi ini adalah bahwa model-model tersebut adalah efisien (termasuk FEM), dimana besaran parameternya adalah tidak terlalu berbeda di antara berbagai estimasi.

Parameter perbedaan rasio-modal menunjukkan tanda yang positif, yang berarti bahwa semakin besar perbedaan rasio-modal antara negara yang berdagang, maka semakin besar pula volume perdagangannya. Nilai elastisitas dari perbedaan rasio-modal ini terhadap volume perdagangan adalah sebesar 0,87 (inelastis), yang berarti bila persentase perubahan dari perbedaan rasio modal-labor antara Indonesia dan rekan dagangnya meningkat sebesar 1 persen, maka

akan menyebabkan persentase perubahan rata-rata volume perdagangan bilateralnya meningkat sebesar 0,87 persen. Kesimpulan ini mendukung teorinya H-O (perdagangan produk homogen).

Parameter penjumlahan rasio-modal menunjukkan tanda yang negatif, yang berarti bahwa semakin besar penjumlahan rasio-modal antara negara yang berdagang, maka semakin kecil volume perdagangannya. Nilai elastisitas dari penjumlahan rasio-modal ini terhadap volume perdagangan adalah sebesar -13,54 (elastis), yang berarti bila persentase perubahan dari penjumlahan rasio modal-labor antara Indonesia dan rekan dagangnya meningkat sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan rata-rata persentase perubahan volume perdagangan bilateralnya turun sebesar 13,54 persen. Kesimpulan ini mendukung *price equalization* H-O-S, dimana tanda minus menunjukkan arah pergerakan dari padat karya menuju padat modal atau pergerakan padat karya menjadi padat modal lebih cepat daripada pergerakan padat modal menjadi padat karya.

Parameter indeks kesamaan GDP Helpman menunjukkan tanda yang positif, yang berarti bahwa semakin besar indeks kesamaan GDP antara negara yang berdagang, maka semakin besar pula volume perdagangannya. Nilai elastisitas dari indeks kesamaan GDP ini terhadap volume perdagangan adalah sebesar 5,67 (elastis), yang berarti bila persentase perubahan indeks kesamaan GDP antara Indonesia dan rekan dagangnya meningkat sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan rata-rata persentase perubahan volume perdagangan bilateralnya meningkat sebesar 5,67 persen. Kesimpulan ini mendukung *new trade theory* (NTT), dimana kesamaan struktur permintaan suatu negara yang

berdagang akan meningkatkan volume perdagangannya, terutama perdagangan intra industri (perdagangan produk differensiasi). Sebagaimana yang disebutkan pada subjudul sebelumnya bahwa menurut Cieřlik, perdagangan produk differensiasi akan lebih besar daripada perdagangan produk homogen; dengan demikian, terhadap volume perdagangan bilateral Indonesia, tentunya besaran elastisitas indeks kesamaan GDP akan lebih besar daripada besaran elastisitas perbedaan rasio-modal. Hal ini membuktikan bahwa volume perdagangan bilateral Indonesia lebih besar dipengaruhi oleh besaran permintaan daripada besaran penawaran.

Parameter penjumlahan besaran GDP menunjukkan tanda yang positif, yang berarti bahwa semakin besar penjumlahan GDP antara negara yang berdagang, maka semakin besar pula volume perdagangannya. Nilai elastisitas dari penjumlahan GDP ini terhadap volume perdagangan adalah sebesar 18,07 (elastis), yang berarti bila persentase perubahan dari penjumlahan GDP antara Indonesia dan rekan dagangnya meningkat sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan rata-rata persentase perubahan volume perdagangan bilateralnya meningkat sebesar 18,07 persen. Kesimpulan ini mendukung teori H-O dan NTT, dimana semakin besar *endowment* atau pendapatan -nya semakin besar pula perdagangannya.

Parameter jarak relatif menunjukkan tanda yang negatif, yang berarti bahwa semakin jauh jarak relatif antara negara yang berdagang, maka semakin menurun volume perdagangannya. Nilai elastisitas dari jarak relatif ini terhadap volume perdagangan adalah sebesar -0,53 (inelastis), yang berarti bila persentase

perubahan dari jarak relatif antara Indonesia dan rekan dagangnya meningkat sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan rata-rata persentase perubahan volume perdagangan bilateralnya menurun sebesar 0,53 persen. Karena parameter jarak relatif ini menunjukkan hubungan yang tidak signifikan, maka dapat dikatakan bahwa jarak relatif tidak berpengaruh terhadap rata-rata volume perdagangan bilateral Indonesia.

Perbedaan nilai konstanta dari masing-masing efek menunjukkan adanya perbedaan spesifik, baik dari pasangan dagang maupun dari waktu, terhadap nilai rata-rata (*mean value*) persentase perubahan volume perdagangan. Bila rata-rata konstanta yang menjadi rekan dagang Indonesia dikelompokkan dalam beberapa grup (ASEAN, HIEs, NICs), maka akan menunjukkan adanya perbedaan dari *mean value*, dimana signifikansinya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Perbedaan Konstanta dan Signifikansinya

Grup	Jumlah	Rata-rata	<i>Mean Value</i>	Perbedaan	<i>Standard Error</i>	t
ASEAN	3130,8257	-347,8695	-347,6696	-0,1999	3,2265	-0,0620
HIEs	2032,9322	-338,8220	-347,6696	8,8476	3,2265	2,7422*
NICs	1339,5332	-334,8833	-347,6696	12,7863	3,2265	3,9629*

Nilai kritis distribusi t, df=21: 1% = 2,5176; 5% = 1,7207; 10% = 1,3232

* Signifikan pada alpha 1%

** Signifikan pada alpha 5%

***Signifikan pada alpha 10%

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan konstanta untuk grup HIEs dan NICs, tetapi tidak dengan ASEAN. Ini berarti bahwa rata-

rata volume perdagangan bilateral dengan grup HIEs dan NICs adalah relatif lebih besar daripada dengan yang lain; lebih lanjut, perdagangan dengan NICs relatif lebih besar daripada HIEs.

Kesimpulan

Pengujian Hausman dengan berbagai kombinasi efek menunjukkan bahwa model terbaiknya adalah menggunakan FEM, karena menurut hasil pengujian pendekatan Hausman *test*, komponen *error* di dalam model berkorelasi dengan variabel penjelas, sehingga parameter REM adalah bias.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa *factor endowments* (rasio modal–labor maupun besaran GDP) berpengaruh positif terhadap volume perdagangan bilateral Indonesia, dimana perdagangan dengan NICs dan HIEs berada di atas rata–rata total perdagangan; sementara variabel jarak pengaruhnya adalah tidak signifikan.

Saran

Indonesia yang kaya akan tenaga kerja, maka sudah jelas bahwa keunggulan komparatifnya adalah barang padat karya. Oleh karenanya, perbanyaklah ekspor untuk adalah barang yang padat karya; dan sebaliknya, perbanyaklah impor untuk barang yang padat modal. Lebih lanjut, bila berdagang dengan sesama negara sedang berkembang hendaknya sama-sama barang yang padat karya; sementara bila berdagang dengan negara maju, maka ekspornya adalah barang padat karya, dan impornya adalah barang padat modal.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB (Bank Pembangunan Asia). 2008. *Kebangkitan Regionalisme Asia: Kemitraan bagi Kemakmuran Bersama - Intisari*. Kantor ADB, Kota Mandaluyong, Filipina.
- Baltagi, Badi H.. 2001. *Econometric Analysis of Panel Data*, 2nd ed. John Wiley & Sons, Ltd.
- Baltagi, Badi H.. 2008. *Econometrics*, 4th ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 1981-2007. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Ekspor-Impor*. BPS Jakarta.
- Cieřlik, Andrzej. 2006. "Bilateral Trade Volumes, The Gravity Equation and Factor Proportions". Macroeconomics and International Trade Theory Division, Department of Economics, Warsaw University.
- Cieřlik, Andrzej. 2007. "International Trade Under Monopolistic Competition: Evidence from Polish Bilateral Trade Data". Macroeconomics and International Trade Theory Division, Department of Economics, Warsaw University.
- Cooper, Donald R. and Pamela S. Schindler. 2000. *Business Research Methods*, 7th ed.. McGraw-Hill Companies.
- EconStats, Global Economic Data. <http://www.econstats.com/weo>.
- Egger, Peter. 2000. "A Note on the Proper Econometric Specification of the Gravity Equation", *Working Paper*. Austrian Institute of Economic Research.
- Enders, Walter. 2004. *Applied Econometric Time Series*, 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc.
- Feenstra, Robert C.. 2002. *Advanced International Trade: Theory and Evidence*. University of California.
- Gujarati, Damodar N.. 2004. *Basic Econometrics*, 4th ed.. The McGraw-Hill Companies.
- <http://www.geobytes.com/CityDistanceTool.htm>.
- Krugman, Paul and Maurice Obstfeld. 2003. *International Economics: Theory and*

Policy, 6th ed.. Addison-Wesley Publishing Company, New York.

Maddala, G.S.. 2001. *Introduction to Econometrics*, 3rd ed.. John Wiley & Sons, Ltd.

Mankiw, N. Gregory. 2003. *Macroeconomics*, 5th ed.. Worth Publishers.

Prapti, Endang Sih. 2003. *Ekonomi Internasional: Kumpulan Bahan Kuliah*. Universitas Gadjah Mada. (bahan perkuliahan dan tidak dipublikasikan)

Quantitative Micro Software. 2008. *EViews 6 User's Guide I and II*.

Rahman, Mohammad Mafizur. 2003. "A Panel Data Analysis of Bangladesh's Trade: The Gravity Model Approach". University of Sydney, Australia.

Stolper, Wolfgang F. and Samuelson, Paul A.. 1941. "Protection and Real Wages". *Review of Economic Studies* (Nov).

Sugiyanto, Catur. 1995. *Ekonometrika Terapan*. BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

United Nations, Statistics Devision. <http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp>.

Williamson, Sthepen D.. 2005. *Macroeconomics*, 2nd ed.. Pearson Addison Wesley.

Zhengang Zhu. 2005. "A Gravity Model of China's Trade Flows", *Recent Developments in The China Economy*.

ABSTRAKSI

**Elok Heniwati
Erma Yani**

The objective of this study is to examine the influence of firm size, debt to equity ratio, board of commissioner size, and return on equity to full disclosure of annual report. This study takes sample from 23 companies in the property and real estate sector listing at the Indonesian Stock Exchange, which were published in financial report from 2007-2010. This research uses multiple regression analysis as research analysis.

The results of this study show that simultantly there is a significant influence between firm characteristics and full disclosure of annual report. Partially, firm size has positive sign to full disclosure of annual report. Meanwhile, debt to equity ratio, board of commissioner size and return on equity has negative sign to full disclosure of annual report. It means that firm size influences to full disclosure of annual report. Otherwise, debt to equity ratio, board of commissioner size and return on equity has no influence to full disclosure of annual report.

Kata Kunci: *firm size, debt to equity ratio, board of commissioner size, return on equity, full disclosure of annual report.*

PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE

Keberadaan dan ketersediaan informasi yang relevan dan akurat mutlak diperlukan guna menunjang kelancaran proses investasi dan pendanaan di pasar modal. Bagi sebuah negara, regulasi tentang informasi keuangan ini dapat dikatakan sebagai indikator perkembangan pasar modal di negara bersangkutan, dan biasanya, seiring dengan kemajuan pasar modal di negara tersebut, regulasinya pun semakin ketat. Di Indonesia, yang tergolong sebagai *emerging market*, regulasi yang dimaksud belum seketat yang diterapkan di negara-negara maju. Dalam hal ini, pemerintah telah menunjuk Bapepam dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk menciptakan jalan menuju terwujudnya pasar modal yang efisien.

Salah satu mekanisme yang ditempuh oleh Bapepam dan IAI guna mewujudkan pasar yang efisien adalah melalui pengungkapan laporan keuangan (*disclosure of financial statement*). Terkait dengan hal tersebut, Na'im dan Rakhman dalam Hertanti (2005) mengatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah

interpretasi hanya jika laporan keuangan dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai. Pengungkapan laporan keuangan yang memadai dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, metode persediaan, jumlah saham beredar dan ukuran alternatif, misalnya untuk pos-pos yang dicatat berdasarkan *historical cost*.

Menurut Hendriksen (2002:432) ada tiga konsep mengenai pengungkapan laporan keuangan yaitu *adequate*, *fair*, dan *full disclosure*. Konsep yang paling sering dipraktekkan adalah *adequate disclosure* (pengungkapan yang cukup) yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku dimana pada tingkat ini investor dapat menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan. Konsep *fair disclosure* (pengungkapan wajar) mengandung sasaran etis dengan menyediakan informasi yang layak terhadap investor potensial, sedangkan *full disclosure* (pengungkapan penuh) merupakan pengungkapan atas semua informasi yang relevan. Terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami. Pengungkapan yang tepat mengenai informasi yang penting bagi para investor dan pihak yang lain hendaknya bersifat cukup, wajar, dan lengkap.

Menurut Almilia (2007:1) pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan ketentuan yang harus diikuti oleh setiap perusahaan atau institusi yang berisi tentang hal-hal yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan menurut standar yang berlaku (peraturan mengenai pengungkapan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Keputusan BAPEPAM No. SE-02/PM/2002). Sedangkan pengungkapan yang bersifat sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut. Menurut peraturan mengenai laporan keuangan yang ada di Indonesia hal semacam ini dimungkinkan.

Penelitian tentang kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil-hasil dari penelitian tersebut memberikan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan, sifat perbedaan kelengkapan pengungkapan antar perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Januarti 2010, Verdiyana 2006, Mirasari, 2006, dan Hertanti 2005). Lebih lanjut, Imhoff dalam Hertanti (2005), menyatakan bahwa tingginya kualitas akuntansi sangat erat hubungannya dengan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan tingkat

kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi oleh karakteristik suatu perusahaan.

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dimaksudkan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan informasi, penelitian ini pun menguji hal yang sama namun dalam konteks perusahaan properti dan real estate. Yaitu, perusahaan properti dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2007 – 2010. Pada penelitian ini, rumusan masalah terkait dengan hal tersebut dinyatakan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, rasio *leverage* (DER), ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas (ROE) terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan pada perusahaan properti dan real estate yang *listing* di Bursa Efek Indonesia?

Landasan Teoritis

Karakteristik perusahaan

Karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan. Menurut Ferry dan Jones dalam Hertanti (2005:32) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total aktiva. Sedangkan Brigham dan Houston (2001:119) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan, yang dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki, atau total penjualan yang diperolehnya. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{total asset}$$

2. Rasio Leverage

Rasio leverage memperlihatkan berapa hutang yang digunakan perusahaan dalam operasinya. Menurut Ang dalam Hertanti (2005:25) rasio leverage berfungsi untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Sedangkan Weston dan Brigham (1993:117) mengatakan rasio leverage mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjamkan dari kreditor. Dengan demikian, leverage menunjukkan batasan (seberapa besar) pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh hutangnya.

Pembiayaan dengan utang atau *leverage* keuangan, memiliki tiga implikasi penting (Brigham dan Houston, 2001:84), yaitu:

- a. Kreditor melihat kepada dana (*equity*) yang disediakan pemilik, untuk mengukur batas keamanan (*margin of safety*).
- b. Dengan mengumpulkan dana melalui hutang, pemilik memperoleh wewenang pengawasan perusahaan dengan hanya investasi yang kecil.
- c. Jika perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih besar atas investasi yang dibiayai dengan dana pinjaman dibanding pembayaran bunga, maka pengembalian atas modal pemilik akan lebih besar.

Semakin tinggi rasio leverage berarti semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dari hutang. Perusahaan dengan leverage yang tinggi memiliki resiko menderita kerugian besar, tetapi juga mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Sebaliknya, perusahaan dengan leverage rendah mempunyai resiko yang kecil bila perekonomian dalam keadaan menurun. Tetapi perusahaan tersebut juga memiliki laba rata-rata yang rendah jika perekonomian meningkat. Keputusan tentang penggunaan *leverage* berarti menyeimbangkan kemungkinan laba yang lebih tinggi dengan naiknya resiko.

Rasio hutang terhadap ekuitas berbeda-beda tergantung dari karakteristik bisnis dan keberagaman arus kas. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan arus kas yang kurang stabil. Semakin rendah rasio ini oleh pemegang saham dan semakin besar batas pengaman pemberi pinjaman jika terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian.

Maka dapat dihitung *Debt to Equity Ratio* (rasio utang atas modal) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}} \times 100\%$$

3. Ukuran dewan komisaris

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggungjawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Komposisi individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif. Dewan komisaris yang berasal dari luar dipandang lebih baik, karena pihak dari luar akan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan dengan lebih objektif dibanding perusahaan yang memiliki susunan dewan komisaris yang hanya berasal dari dalam perusahaan.

Fungsi dewan komisaris adalah mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen dan bertanggungjawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggungjawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan.

Menurut Beasley dalam Sulastini (2007) ada tiga karakteristik penting dewan komisaris yang mendukung aktivitas manajemen. Karakteristik tersebut antara lain :

- a. Komposisi.

- b. Pemisahan antara pimpinan dewan komisaris dengan *Chief Executif officer* (CEO).
- c. Ukuran dewan komisaris.

Item dan kualitas informasi yang diungkapkan dalam laporan yang disiapkan manajemen dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Manajemen memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi yang menguntungkan dan menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan. Informasi yang menguntungkan akan diungkapkan seluas-luasnya, sedangkan informasi yang tidak menguntungkan kelihatannya tidak diungkap sehingga para pemegang saham tidak akan mengetahui secara khusus informasi yang disembunyikan. Untuk mengatasi hal tersebut para pemegang saham mendelegasikan wewenang mereka dalam memonitor aktivitas manajemen kepada dewan komisaris. Collier dan Gregory dalam Sulastini (2007) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris suatu perusahaan maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan memonitoring, sehingga yang dilakukan akan semakin efektif.

4. Rasio Profitabilitas

Menurut Brigham dan Houston (2001:89) profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Sedangkan Horne dan Wachowicz (1997:147) mengatakan rasio profitabilitas menghubungkan laba dengan penjualan dan laba dengan investasi yang secara bersama-sama keduanya menunjukkan efektivitas keseluruhan operasi perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim dalam Hertanti (2005:28) rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dapat dikatakan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio profitabilitas, berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba.

Ada tiga rasio yang sering dibicarakan, yaitu: *profit margin*, *return on total asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE).

a. Marjin laba atas penjualan (*Profit Margin On sales*)

Profit marjin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisien) pada periode tertentu (Hanafi Halim dalam hertanti, 2005:28). Marjin ini merupakan ukuran keuntungan penjualan perusahaan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan.

$$\text{Profit Marjin} = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Profit marjin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu.

Rendahnya marjin ini tidak menunjukkan adanya masalah operasi, tetapi hanya perbedaan dalam strategi pembiayaan, dan perusahaan dengan marjin yang lebih rendah akan memiliki tingkat pengembalian yang tinggi kepada pemegang saham jika menggunakan leverage keuangan (Brigham dan Houston, 2001:90).

b. Pengembalian atas total aktiva (*Return On Asset / ROA*)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA juga sering disebut *Return On Investment* (ROI) (Hanafi dan Halim dalam Hertanti, 2005:29). Horne dan Wachowicz (1997:147) mengatakan rasio ini rasio keuntungan yang menghubungkan laba dengan investasi. Profitabilitas mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio pengembalian atas total aktiva dihitung dengan membagi laba bersih sesudah pajak dengan total aktiva.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

Rata-rata ROA untuk industri adalah 9% (Brigham dan Houston, 2001:90). ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset/aktiva. Rendahnya rasio ini diakibatkan oleh:

1. Rendahnya *basic earning power* (BEP) perusahaan.
2. Tingginya biaya bunga karena pengguna kewajiban diatas rata-rata yang menyebabkan laba bersih relatif rendah.

c. Pengembalian atas ekuitas saham biasa (*Return On Equity/ROE*)

Rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa mengukur pengembalian atas ekuitas saham biasa atau tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham (Brigham dan Houston, 2001:91). *Return on equity* (ROE) sering disebut sebagai rentabilitas modal sendiri (*Return On Common Equity*). Hanafi dan Halim dalam Hertanti (2005:30) mengatakan bahwa ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Hal ini senada dengan pernyataan Ang dalam Hertanti (2005:30) bahwa ROE mengukur tingkat kembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Rasio ini bukan pengukur return pemegang saham yang sebenarnya karena rasio ini tidak memperhitungkan deviden maupun *capital gain* untuk pemegang saham. ROE dipengaruhi ROA dan tingkat leverage

keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *return on equity* (ROE).

Kelengkapan Pengungkapan

Kelengkapan (*comprehensiveness*) adalah suatu bentuk kualitas. Menurut Imhoff dalam Hertanti (2005:19), kualitas tampak sebagai atribut-atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda (*ambiguous*), banyak peneliti yang menggunakan *index of disclosure methodology* mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan keuangan tahunan. Dengan kata lain Imhoff menyatakan bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan sangat bergantung pada standar yang diberlakukan di suatu negara. Negara maju dengan regulasi yang lebih ketat relatif lebih tinggi pengungkapan laporan keuangannya jika dibandingkan dengan perusahaan di negara berkembang. Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan suatu perusahaan tidak bersifat statis, tetapi meningkat sejalan dengan perkembangan pasar modal dan sosial di negara bersangkutan.

Hendriksen (2002:425) mengatakan penetapan tingkat kelengkapan pengungkapan yang tepat idealnya tergantung pada tingkat kesejahteraan sosial yang dihasilkan oleh pengungkapan. Jika tidak ada suatu teori etika yang memungkinkan pengukuran kesejahteraan sosial, maka para regulator akuntansi berkewajiban untuk mengandalkan kriteria seperti relevansi dan keandalan. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kelengkapan pengungkapan laporan keuangan adalah suatu bentuk kualitas untuk menilai manfaat dari laporan keuangan tersebut.

Di Indonesia pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan oleh emiten atau perusahaan publik industri property dan real estate ditetapkan oleh Bapepam dalam surat edaran No. SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002. Pedoman ini dimaksud untuk memberikan suatu panduan penyajian dan pengungkapan yang terstandarisasi dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure*) sehingga dapat memberikan kualitas informasi keuangan bagi para pengguna.

Tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan *index of disclosure methodology*, seperti index Wallace.

$$\text{Rumus indeks Wallace} = \frac{n}{k} \times 100\% \text{ (Hertanti, 2005:21)}$$

Dimana: n: jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan
k: jumlah item yang seharusnya diungkap

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, rasio leverage (DER), ukuran dewan komisaris, dan rasio profitabilitas (ROE) terhadap pengungkapan laporan keuangan.

- a. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan.

Menurut Cooke dalam Hertanti (2005) perusahaan besar mungkin memiliki biaya produksi informasi dan biaya *competitive disadvantage* akibat pengungkapan yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Kemudian Jensen dan Meckling mengatakan bahwa arah hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan tersebut bisa positif tetapi tidak menutup kemungkinan berarah negatif. Di lain pihak secara teoritis, perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melaksanakan *social responsibility* (tanggung jawab sosial), menghadapi regulasi yang lebih ketat seperti tentang pengawasan harga, tingginya pajak perusahaan dan ancaman akan adanya program nasionalisasi (*threat nationalization*). Buzby dalam Hertanti (2005) menduga bahwa perusahaan kecil mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi yang luas pada laporan tahunan mereka sebab banyak aktivitas banyak pula biaya yang dikeluarkan. Singhvi dan Desai dalam Hertanti (2005) menambahkan bahwa manajemen perusahaan kecil mungkin percaya bahwa pengungkapan yang terperinci akan membahayakan posisi kompetitifnya. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya. Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir laporan keuangannya karena mereka memiliki lebih banyak informasi yang dapat diungkapkan. Perusahaan yang berukuran besar juga diduga mempunyai karyawan ahli berkualitas yang lebih memahami tentang pengungkapan laporan keuangan. Dari beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar akan lebih banyak melakukan pengungkapan laporan keuangan.

Ha1: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan.

- b. Pengaruh rasio leverage terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan.

Jensen dan Meckling dalam Hertanti (2005) menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio leverage tinggi menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang tinggi. Jika menyediakan informasi secara lebih komprehensif akan membutuhkan biaya lebih tinggi, maka perusahaan dengan leverage tinggi akan menyediakan informasi secara komprehensif. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Na'im dan Rakhman dalam Hertanti (2005), bahwa perusahaan dengan rasio hutang atas modal tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan daripada perusahaan dengan rasio yang rendah. Pendapat Meek, Roberts, dan Gray dalam Nugraheni (2002) juga mendukung pernyataan di atas. Semakin tinggi tingkat leverage

perusahaan maka semakin besar pula *agency cost* atau dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan kreditur jangka panjang perusahaan dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Pada perekonomian yang membaik, perusahaan dengan leverage yang tinggi akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk memperoleh laba yang tinggi. Pada kondisi seperti ini perusahaan akan menyediakan informasi yang lebih komprehensif dalam laporan keuangannya untuk menarik para investor.

Rasio leverage menunjukkan proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi leveragenya berarti semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan tersebut kepada krediturnya. Hal ini sesuai dengan *agency theory*, yaitu hubungan keagenan antara prinsipal (kreditur) dengan agennya (perusahaan). Perusahaan akan berusaha memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai kondisi perusahaan kepada krediturnya. Harapannya kreditur lebih mengetahui dan memahami perusahaan dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi lebih dipercaya oleh para kreditur dan dianggap lebih memiliki kesempatan untuk menghasilkan laba. Dengan demikian perusahaan dengan leverage yang tinggi akan tinggi pula kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya.

Ha2: Rasio leverage berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan.

- c. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan.

Jensen dan Meckling dalam Almilia (2010) menyatakan bahwa dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen. Collier dan Gregory (dalam Sulastini, 2007) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja manajer secara efektif. Oleh karena itu, pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen juga akan semakin besar.

Ha3: Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan.

- d. Pengaruh rasio profitabilitas terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan.

Shinghvi dan Desai dalam Hertanti (2005) mengutarakan bahwa rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih terinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. Para investor kebanyakan lebih menyukai perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi. Mereka beranggapan dengan profitabilitas yang tinggi perusahaan mampu memberikan pengembalian investasi yang tinggi pula. Dengan tujuan menarik investor, perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan melakukan pengungkapan laporan keuangan secara berlebihan.

Semakin tingginya rasio profitabilitas perusahaan, menunjukkan semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan semakin baik kinerja perusahaannya. Dengan laba yang tinggi perusahaan memiliki cukup dana untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan mengolah informasi menjadi lebih bermanfaat serta dapat menyajikan pengungkapan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih berani mengungkapkan informasi. Dengan demikian semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Ha4: Rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan.

Metode penelitian

Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa perusahaan yang tercatat pada tahun 2007 sampai dengan 2010 sebanyak 44 perusahaan. Laporan tahunan periode 2007-2010 yang dapat diakses melalui *website* BEI sebanyak 23 perusahaan. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, dimana ada syarat-syarat yang dibuat sebagai kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel (Sugiyono, 2004). Adapun kriteria sampel yang akan digunakan yaitu :

1. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk kategori perusahaan property dan real estate.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) selama periode pengamatan (tahun 2007-2010).
3. Data perusahaan yang dibutuhkan untuk penelitian tersedia.
4. Perusahaan yang memiliki laba positif.

Variable dan Pengukurannya

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen.

a. Variabel dependen (Y)

Variabel dependen penelitian ini adalah kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Variabel ini mengukur berapa banyak item laporan keuangan yang material diungkapkan oleh perusahaan property dan real estate. Variabel ini diukur dengan menggunakan *index of disclosure methodology*, yaitu *index wallace*.

Rumus *index wallace* = $\frac{n}{k} \times 100\%$ (Hertanti, 2005:21)

Dimana: n: jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan
k: jumlah item yang seharusnya diungkap

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No. SE-02/PM/2002 pada tanggal 27 tahun 2002 yang berisi tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan property dan real estate.

b. Variabel independen (X)

Karakteristik perusahaan yang akan diuji dalam penelitian ini tercermin dalam empat variabel:

1. Ukuran perusahaan (X_1), yang diukur dengan menggunakan total aktiva (Ferry dan Jones dalam Hertanti, 2005:44).

2. Rasio leverage (X_2), menggunakan *debt to equity ratio* (DER) yang diukur dengan membagi total hutang dengan ekuitas.

$$DER = \frac{\text{total hutang}}{\text{total ekuitas}} \times 100\%$$

(Brigham dan Houston, 2001:86)

3. Ukuran dewan komisaris (X_3), yaitu dilihat dari banyaknya jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan (Sulastini, 2007).

4. Profitabilitas (X_4)

Dengan menggunakan return on ekuitas (ROE) dengan membagi laba bersih sesudah pajak (*earning after tax*) dengan modal sendiri.

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

(Brigham dan Houston, 2001:91)

Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar, dan pengujian yang dilakukan diantaranya: (1) menguji normalitas data dengan melakukan *one sample Kolmogorov Smirnov*, (2) menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser, (3) menguji multikolinearitas dengan melihat *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF), (4) menguji autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (statistik-d).

Metode Analisis Data

Dalam menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hipotesis yang diajukan di atas, maka model yang digunakan untuk melihat pengaruh pengaruh antara lebih dari satu variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kelengkapan pengungkapan laporan Keuangan

α = Intersept

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

X_1 = ukuran perusahaan

- X2 = rasio *leverage* (DER)
X3 = ukuran dewan komisaris
X4 = profitabilitas (ROE)
 ε = *error term*

Pengolahan data dilakukan dengan program SPSS versi 16.0 *for windows*. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah Uji Koefisien Determinasi, Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) dan Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Analisis Data Penelitian

a. Hasil pengumpulan Data

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah dijabarkan sebelumnya maka diperoleh sampel penelitian yang diperinci sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Perusahaan Property dan Real Estate

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ASRI	PT. Alam Sutera Reality Tbk
2	ADHI	PT. Adhi Karya Tbk
3	ELTY	PT. Bakrieland Development Tbk
4	BIPP	PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk
5	BAPA	PT. Bekasi Asri Pemula Tbk
6	BKDP	PT. Bukit Darmo Property Tbk
7	BSDE	PT. Bumi Serpong Damai Tbk
8	BMSR	PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk
9	CTRP	PT. Ciputra Property Tbk
10	CTRS	PT. Ciputra Surya Tbk
11	CKRA	PT. Citra Kebun Raya Agri Tbk
12	COWL	PT. Cowell Development Tbk
13	CTRA	PT. Ciputra Development Tbk
14	SCBD	PT. Danayasa Arthatama Tbk
15	DART	PT. Duta Anggada Realty Tbk
16	DGIK	PT. Duta Graha indah Tbk
17	DUTI	PT. Duta Pertiwi Tbk
18	KPIG	PT. Global Land Development Tbk
19	GMTD	PT. Gowa Makasar Tourism Development Tbk
20	DILD	PT. Intiland Development Tbk
21	ICON	PT. Island Concept Indonesia Tbk
22	JRPT	PT. Jaya Real Property Tbk
23	JIHD	PT. Jakarta International Hotels & Development Tbk
24	JSPT	PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
25	KIJA	PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk
26	LCGP	PT. Laguna Cipta Griya Tbk

27	LAMI	PT. Lamicitra Nusantara Tbk
28	LPCK	PT. Lippo Cikarang Tbk
29	LPKR	PT. Lipo Karawaci Tbk
30	MDLN	PT. Modernland Realty Tbk
32	UNIT	PT. Nusantara Inti Corpora Tbk
33	PTRA	PT. New Century Development Tbk
34	PWSI	PT. Panca Wiratama Sakti Tbk
35	PJAA	PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk
36	GPRA	PT. Perdana Gapuraprima Tbk
37	PLIN	PT. Plaza Indonesia Realty Tbk
38	PUDP	PT. Pudjiadi Prestige Tbk
39	RBMS	PT. Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk
40	RODA	PT. Royal Oak Development Asia Tbk
41	BKSL	PT. Sentul City Tbk
42	SMRA	PT. Summarecon Agung Tbk
43	SMDM	PT. Suryamas Duta Makmur Tbk
44	SIIP	PT. Suryanti Permata Tbk

Sumber: <http://www.idx.co.id>

b. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata serta standar deviasi untuk masing-masing variabel. Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu ukuran perusahaan, *debt to equity ratio*, ukuran dewan komisaris, dan *return on equity*. Sedangkan untuk variabel dependen adalah kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2
Descriptive Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kelengkapan pengungkapan laporan tahunan	92	45.71	77.14	62.3910	6.08644
ukuran perusahaan	92	117301	17064195	32280	3.57754
debt to equity ratio	92	2.70	403.86	92.8104	84.43259
ukuran dewan komisaris	92	2.00	12.00	4.9674	1.97485
Return on equity	92	.06	33.20	8.1165	6.46031
Valid N (listwise)	92				

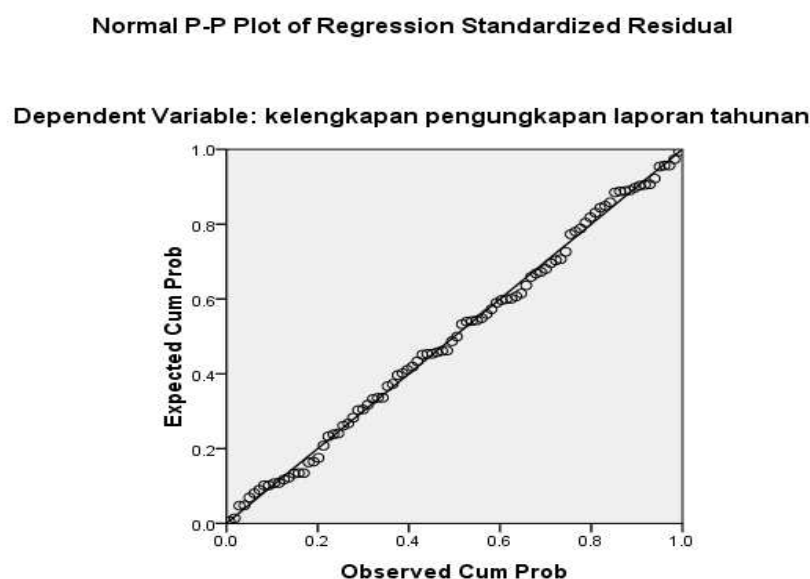
Sumber: Data Olahan (output SPSS 16.0 for windows)

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang menjadi target populasi adalah 62,4%, rata-rata ukuran perusahaan yang diteliti adalah sebesar Rp. 32.280.000.000, dan rata-rata utang perusahaan terhadap modalnya sebesar 92,81%. Pada variabel ukuran dewan komisaris diukur dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan, menunjukkan bahwa nilai rata-rata ukuran dewan komisaris adalah **5** dan rata-rata kemampuan perusahaan memperoleh laba adalah sebesar 8,12%.

c. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk mengetahui distribusi data penulis menggunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Bentuk data yang berdistribusi normal akan mengikuti pola normal. Berdasarkan data pada Tabel 1, bentuk output SPSS 16.0 *for windows* untuk pengujian normalitas adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas dengan Grafik PP Plots



Dari gambar di atas terlihat bahwa data variabel dependen dan variabel independen berdistribusi secara normal, karena nilai probabilitas yang diharapkan adalah sama dengan nilai probabilitas pengamatan. Dari grafik PP Plots terlihat bahwa nilai PP Plots tidak menyimpang jauh dari garis diagonal, sehingga bisa diartikan bahwa distribusi data tersebut adalah normal.

Untuk melihat gejala multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *tolerance* (TOL) dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai TOL yang tidak berbahaya terhadap gejala multikolinearitas adalah 0,1. Jadi jika nilai *tolerance* lebih

besar dari 0,1 maka tidak berbahaya. Sedangkan nilai VIF yang tidak berbahaya adalah kurang dari 10.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
ukuran perusahaan	.699	1.431
debt to equity ratio	.900	1.111
ukuran dewan komisaris	.649	1.541
return on equity	.944	1.059

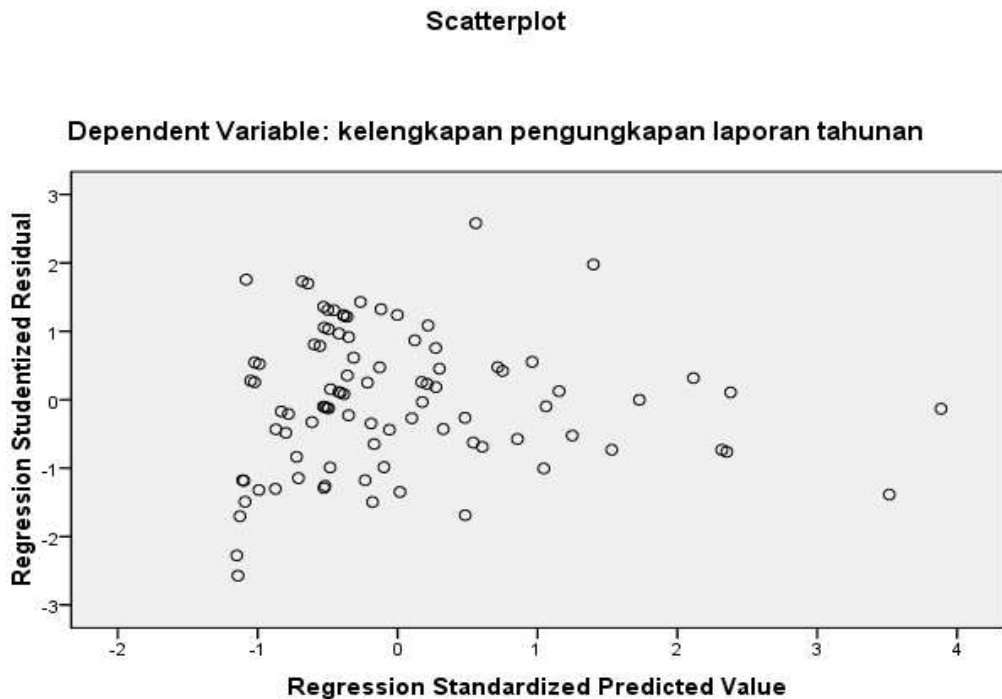
a. Dependent Variable: kelengkapan pengungkapan laporan tahunan

sumber: *Data Olahan (output SPSS 16.0 for windows)*

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas yang terlihat pada Tabel 3.8, yaitu menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hal ini terlihat pada nilai *tolerance* (TOL) pada variabel ukuran perusahaan, DER, ukuran dewan komisaris, dan ROE masing-masing sebesar 0,699; 0,900; 0,649; 0,944 dimana nilai TOL dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,1. Begitu juga dengan VIF dari masing-masing variabel yaitu kurang dari 10. Hal ini terlihat pada nilai VIF pada variabel ukuran perusahaan, DER, ukuran dewan komisaris, dan ROE masing-masing 1,431; 1,111; 1,541; 1,059.

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Hasil uji dengan menggunakan SPSS versi 16.0 *for windows*, dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan *Scatterplot*



Sumber: Data Olahan (output SPSS 16.0 for windows)

Berdasarkan hasil pengujian heterokedastisitas yang terlihat pada gambar 2 di atas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, juga di kanan dan di kiri angka 0 (nol) pada sumbu X. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang digunakan ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi penulis menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Setelah dilakukan pengujian autokorelasi dengan menggunakan SPSS versi 16.0 *for windows*, hasil autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi dengan *Durbin Watson*

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	2.120

a. Predictors: (Constant), return on equity, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, ukuran dewan komisaris

b. Dependent Variable: kelengkapan pengungkapan laporan tahunan
sumber: Data Olahan (output SPSS 16.0 for windows)

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi yang terlihat pada tabel 3.10, hasil DW adalah sebesar 2,120 yang berarti terletak pada $1,7523 \leq DW \leq 2,2477$ sehingga model regresi menunjukkan tidak adanya gejala autokorelasi.

d. Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini hipotesis dikembangkan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan program SPSS versi 16.0 *for windows* diperoleh output regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Berganda (Coefficients)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	58.474	1.778		32.886
	ukuran perusahaan	1.050	.000	.617	5.950
	debt to equity ratio	.007	.007	.098	1.071
	ukuran dewan komisaris	-.143	.332	-.046	-.430
	return on equity	.071	.084	.056	.850
					.533

a. Dependent Variable: kelengkapan pengungkapan laporan tahunan
sumber: Data Olahan (output SPSS 16.0 for windows)

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 58,474 + 1,050 X_1 + 0,007 X_2 - 0,143 X_3 + 0,071 X_4$$

Dimana:

Y : kelengkapan pengungkapan laporan tahunan

X₁: ukuran perusahaan

X₂: *debt to equity ratio*

X₃: ukuran dewan komisaris

X₄: *return on equity*

Dari persamaan regresi tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- Koefisien konstanta (α = intersept) sebesar 58,474 artinya apabila semua variabel independen (X₁, X₂, X₃, dan X₄) dianggap konstan (bernilai 0), maka kelengkapan pengungkapan laporan keuangan akan bernilai sebesar 58,474%.
- Koefisien ukuran perusahaan (X₁) sebesar 1,050, artinya apabila ukuran perusahaan (X₁) mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.000.000.000 sedangkan variabel lain (X₂, X₃, dan X₄) dianggap konstan (bernilai 0), maka kelengkapan pengungkapan laporan keuangan akan meningkat sebesar 1,050%.
- Koefisien *Debt to equity ratio* (X₂) sebesar 0,007, artinya apabila *Debt to equity ratio* (X₂) mengalami kenaikan sebesar 1% sedangkan variabel lain (X₁, X₃, dan X₄) dianggap konstan (bernilai 0), maka kelengkapan pengungkapan laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,007%.
- Koefisien ukuran dewan komisaris (X₃) sebesar -0,143, artinya apabila ukuran dewan komisaris (X₃) mengalami kenaikan sebanyak 1 orang sedangkan variabel lain (X₁, X₂, dan X₄) dianggap konstan (bernilai 0), maka kelengkapan pengungkapan laporan keuangan akan menurun sebesar 0,143%.
- Koefisien *return on equity* (X₄) sebesar 0,071, artinya apabila *return on equity* (X₄) mengalami kenaikan sebesar 1% sedangkan variabel lain (X₁, X₂, dan X₃) dianggap konstan (bernilai 0), maka kelengkapan pengungkapan laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,071%.

2. Uji Statistik

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan statistik F dan statistik t. Uji statistik F digunakan untuk menguji signifikansi secara simultan yaitu secara bersama-sama apakah variabel independen (ukuran perusahaan, DER, ukuran dewan komisaris, dan ROE) berpengaruh signifikan ataukah tidak terhadap kelengkapan pengungkapan laporan

keuangan pada perusahaan property dan real estate tahun 2007-2010 pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$. Sedangkan uji statistik t digunakan untuk menguji signifikansi secara parsial yaitu masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan ataukah tidak terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya berfungsi mengukur besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hasil perhitungan *koefisien determinasi adjusted* (R^2) pada perusahaan properti dan real estate dapat dilihat pada tabel.

Berdasarkan tabel 3.12 hasil uji regresi diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjusted R Square*) sebesar 0,316 atau 31,60%. Jadi dapat dikatakan bahwa 31,60% besarnya pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan property dan real estate dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, *Debt to equity*, ukuran dewan komisaris, dan *return on equity*. Sedangkan sisanya 68,40% ($100\%-31,60\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk memprediksi pengaruh positif antara variabel independen yaitu (ukuran perusahaan, *Debt to equity*, ukuran dewan komisaris, dan *return on equity*) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (kelengkapan pengungkapan laporan keuangan). Signifikansi persamaan regresi diuji dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : b_1 = 0$, diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_1 , X_2 , dan X_3 secara bersama-sama terhadap variabel Y.

$H_a : b_1 \neq 0$, diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X_1 , X_2 , dan X_3 secara bersama-sama terhadap variabel Y.

Tabel 6
Uji Anova (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1165.523	4	291.381	11.494	.000 ^a
	Residual	2205.547	87	25.351		
	Total	3371.070	91			

a. Predictors: (Constant), return on equity, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, ukuran dewan komisaris

b. Dependent Variable: kelengkapan pengungkapan laporan tahunan

Sumber: Data olahan (Output SPSS versi 16 for Windows)

Berdasarkan Tabel 6 didapat F_{hitung} adalah 11,494 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai F_{tabel} dengan dk (derajat kebebasan) pembilang 4 dan dk penyebut 87, $\alpha = 0,05$ adalah 2,48. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $11,494 > 2,48$ dan taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05 sebesar 0,000 maka model regresi penelitian ini dapat dipakai untuk memprediksi pengungkapan laporan keuangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti secara simultan atau bersama-sama ada pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan, *Debt to equity ratio*, ukuran dewan komisaris, dan *return on equity* terhadap pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan property dan real estate dalam laporan tahunan.

c. Uji T (Uji Parsial)

Uji t-statistik dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha = 5 \%$. Nilai t_{tabel} adalah $t(\alpha/2, df) = t(0,025, 91) = \pm 1,98638$ (dapat dilihat pada tabel t-statistik). Hasil pengujian menunjukkan sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan

Signifikansi persamaan regresi diuji dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : b_1 = 0$, diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan laporan tahunan.

$H_a : b_1 \neq 0$, diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan laporan tahunan.

Dari hasil keluaran SPSS versi 16.0 *for windows* pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,950 dan taraf signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian tampak $t_{hitung} > t_{tabel}$ berada dalam penolakan H_0 , sehingga H_a diterima, dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan.

2. *Debt To Equity Ratio*

Signifikansi persamaan regresi diuji dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : b_2 = 0$, diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *debt to equity ratio* terhadap pengungkapan laporan tahunan.

$H_a : b_2 \neq 0$, diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara *debt to equity ratio* terhadap pengungkapan laporan tahunan.

Dari hasil keluaran SPSS versi 16.0 *for windows* pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel *debt to equity ratio* (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,071 dan taraf signifikansi sebesar 0,280 yang artinya lebih besar dari 0,05 (5%). Dengan demikian tampak $t_{hitung} < t_{tabel}$ berada dalam penerimaan H_0 , sehingga H_a tidak diterima, dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial *debt to equity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan.

3. Ukuran Dewan Komisaris

Signifikansi persamaan regresi diuji dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : b_3 = 0$, diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan laporan tahunan.

$H_a : b_3 \neq 0$, diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan laporan tahunan.

Dari hasil keluaran SPSS versi 16.0 *for windows* pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris (X_3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,430 dan taraf signifikansi sebesar 0,708 yang artinya lebih besar dari 0,05 (5%). Dengan demikian tampak $t_{hitung} < t_{tabel}$ berada dalam penerimaan H_0 , sehingga H_a tidak diterima, dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan.

4. *Return On Equity*

Signifikansi persamaan regresi diuji dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : b_4 = 0$, diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *return on equity* terhadap pengungkapan laporan tahunan.

$H_a : b_4 \neq 0$, diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara *return on equity* terhadap pengungkapan laporan tahunan.

Dari hasil keluaran SPSS versi 16.0 *for windows* pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel *return on equity* (X_4) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,850 dan taraf signifikansi sebesar 0,533 yang artinya lebih besar dari 0,05 (5%). Dengan demikian tampak $t_{hitung} < t_{tabel}$ berada dalam penerimaan H_0 , sehingga H_a tidak diterima, dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial *return on equity* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan.

Pembahasan Hasil Analisis

a. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan kelengkapan pengungkapan laporan tahunan. Hal ini dapat disebabkan karena secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melaksanakan *social responsibility* (tanggung jawab sosial). Perusahaan besar juga cenderung menarik perhatian publik dan rawan menjadi sasaran bermacam-macam regulasi, oleh karena itu perusahaan besar cenderung lebih patuh pada ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk menghindari sanksi yang merugikan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa perusahaan besar lebih mematuhi ketentuan pengungkapan laporan tahunan dibandingkan perusahaan yang kecil.

b. Pengaruh *Debt To equity Ratio* Terhadap Kelengkapan Pengungkapan

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa *debt to asset ratio* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *debt to equity ratio* dengan kelengkapan pengungkapan laporan tahunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai *leverage* perusahaan yang termuat dalam laporan tahunan tidak memberikan makna bagi para investor. Hal ini berkaitan dengan dugaan bahwa para investor tidak banyak menaruh perhatian pada informasi dalam laporan tahunan.

c. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kelengkapan Pengungkapan

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris dengan kelengkapan pengungkapan laporan tahunan. Hal

ini disebabkan karena dewan komisaris tidak dapat meningkatkan pengungkapan laporan tahunan melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. berarti banyaknya jumlah anggota dewan komisaris tidak menjamin akan mempermudah dalam mengendalikan *chief executive officer* (CEO) dan memonitoring.

d. Pengaruh *Return On Equity* Terhadap Kelengkapan Pengungkapan

Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa *return on equity* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh antara *return on equity* dengan kelengkapan pengungkapan laporan tahunan. Hal ini disebabkan karena profitabilitas dapat dipandang sebagai ukuran kinerja manajer. Rendahnya profitabilitas menunjukkan tidak efektifnya aktivitas yang dijalankan perusahaan sehingga perusahaan enggan mengungkapkan laporan keuangannya secara berlebih karena kekhawatiran akan kehilangan para investornya. Tingginya profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Jika perusahaan mengungkapkan laporan keuangan secara berlebih maka perusahaan pesaing bisa lebih mudah mengetahui strategi yang dijalankan perusahaan sehingga dapat melemahkan posisi perusahaan dalam persaingan.

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *debt to equity ratio*, ukuran dewan komisaris, dan *return on equity* terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan pada perusahaan properti dan real estate yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010. Dari hasil pengujian regresi linier berganda ditemukan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan. Sementara itu, secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan, sedangkan *debt to equity ratio*, ukuran dewan komisaris, dan *return on equity* berpengaruh negatif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan.

Hal ini menandakan bahwa kelengkapan pengungkapan laporan keuangan hanya dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Sedangkan karakteristik perusahaan yang

lain seperti *debt to equity ratio*, ukuran dewan komisaris, dan *return on equity* tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan properti dan real estate.

B. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu variabel karakteristik perusahaan yang diwakili oleh ukuran perusahaan, *debt to equity ratio*, ukuran dewan komisaris, dan *return on equity*. Keempat variabel tersebut kurang dapat mewakili secara komprehensif karakteristik perusahaan, sehingga perlu adanya penambahan variabel lain yang berperan dalam mempengaruhi kelengkapan laporan tahunan.

Bertitik tolak dari adanya keterbatasan yang dihadapi dalam studi ini, penulis memberikan beberapa saran guna meningkatkan mutu penelitian selanjutnya. Untuk itu, penelitian selanjutnya sebaiknya:

1. Menambah periode penelitian menjadi lebih panjang agar efek dari karakteristik perusahaan dapat lebih diamati dalam penyajian kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.
2. Menambah variabel karakteristik perusahaan agar bisa mewakili secara komprehensif karakteristik perusahaan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, Luciana Spica dan Ikka Retrinasari. 2007. "*Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEJ*". Proceeding Seminar Nasional. Universitas Trisakti Jakarta.
- Brigham, Eugene F. Dan Joel F. Houston. 2001. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Ferdinand, Augusty. 2006. *Metode Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Edisi Kedua. Semarang: Penerbit BP Undip.
- Hendriksen, Eldon S. dan Michael F. Van Breda. 2002. *Teori Akuntansi*. Buku 2. Batam: Interaksara.
- Hertanti, Dewi. 2005. "*Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan*".

- Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta*". Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Horne, James C. Van dan John M. Wachowicz. 2007. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Januarti, Emi. 2010. "Analisis Pengaruh karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan laporan Tahunan (perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEJ)". Skripsi. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Mirasari, Dewi. 2006. "Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pengungkapan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEJ". Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta.
- Rini. 2010. *Analisis Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik Di Indonesia*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Santoso, Singgih. 2011. *Mastering SPSS versi 19*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryani. 2007. "Pengaruh Profil dan Size Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan Food dan Beverages yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta". Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Verdiyana, Renita. 2006. "Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan Perusahaan". Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta.
- Wulansari, Fitri. 2008. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan". Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta.
- http://www.bapepam.go.id/old/ragam/lampiran/11-real_estate.Pdf. diakses tanggal 22 Maret 2011.
- <http://www.idx.co.id>. Diakses tanggal 20 Maret 2011.

PENGARUH BELANJA PUBLIK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT

Oleh : Yarlina Yacoub¹⁾ dan Resty Adelia²⁾

ABSTRACT

Public finance and economic growth can be regarded as important instruments in reducing poverty in most developing countries. The objectives of this study in to sheds light on the impact of public finance and economic growth on the poverty level in West Kalimantan for the period 2004-2008. This study uses descriptive-associative method. By using regression model, the results show that partially either public finance or economic growth influences positively and significantly on poverty level. Simultaneously, both variables have an impact significantly on the poverty level in West Kalimantan.

Keywords: belanja publik, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kalimantan barat

1) Dosen FE Untan

2) Mahasiswa FE Untan

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di suatu daerah tujuan utamanya adalah dapat menyelesaikan persoalan pembangunan. Pembangunan dipastikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi diharapkan mempelancar proses pembangunan. Dengan demikian persoalan pembangunan di daerah teratasi, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Hal ini akan cepat terwujud apabila disertai dengan otonomi daerah yang efektif. Ini bermakna bahwa desentralisasi fiskal menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi secara keseluruhan. Konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follows function*, mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*) - (Bahl dalam Mardiasmo, 2009:564).

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Widodo dalam Halim (2004:153) menggarisbawahi hal ini dengan menyatakan bahwa sebagai daerah di negara berkembang, peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar, sehingga alokasi Belanja Publik seharusnya lebih besar dari pada Belanja Aparatur. Pendapat senada juga disampaikan Mardiasmo (2002:169) : “dana pada anggaran daerah pada dasarnya adalah dana

publik (*public money*), sehingga seharusnya dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja yang termasuk dalam belanja aparatur yaitu belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial & belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan yang termasuk belanja publik yaitu belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah dilakukan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dengan mengupayakan peningkatan porsi belanja pembangunan (belanja publik) dan melakukan efisiensi pada belanja aparatur. Belanja pelayanan publik dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati masyarakat atau publik. Sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat dan kemiskinan turun. Permasalahan dalam tulisan ini, bagaimanakah pengaruh belanja publik dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat ?”.

1.2. Perkembangan Rasio belanja Publik Terhadap APBD Kabupaten/Kota

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi ekonomi suatu daerah antara lain adalah : sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, usaha, dan kemajuan teknologi. Sumber daya modal yang tersedia bagi pembangunan yang berasal dari pemerintah salah satunya bersumber dari belanja APBD, terutama belanja publik.

Tabel 1
Rasio Belanja Publik Terhadap Total Belanja APBD
Kabupaten/Kota di Prov. Kalbar Tahun 2004 - 2008

	Kota/Kabupaten	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata
1	Kab. Sambas	70,79	71,18	92,78	53,01	51,27	67,81
2	Kab. Bengkayang	41,69	84,29	79,48	91,52	65,21	72,44
3	Kab. Landak	28,75	32,32	51,44	52,48	61,46	45,29
4	Kab. Pontianak	83,98	70,66	91,67	47,74	42,76	67,36
5	Kab. Sanggau	60,43	86,6	80,94	54,41	48,87	66,25
6	Kab. Ketapang	34,36	36,49	58,44	64,35	58,43	50,41

7	Kab. Sintang	78,23	73,56	61,86	64,63	44,95	64,65
8	Kab.Kapuas Hulu	18,1	22,3	13,79	51,52	59,63	33,07
9	Kab. Sekadau	22,56	76,75	70,63	65,47	67,17	60,52
10	Kab.Melawi	36,41	77,61	64,59	58,2	69,71	61,30
11	Kota Pontianak	15,3	12,53	16,52	52,2	65,21	32,35
12	Kota Singkawang	25,68	34,42	47,51	41,21	57,47	41,25

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Barat (data di olah)

Besarnya alokasi dana dari APBD yang diperuntukkan untuk belanja publik oleh pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang tinggi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dan untuk kabupaten/kota di Kalimantan Barat, pola rasio belanja untuk setiap daerah tidak sama. Hanya kabupaten landak saja yang konsisten rasio belanjanya semakin meningkat. Sedangkan daerah lainnya cenderung berfluktuasi. Tahun 2008 masih ada beberapa daerah kabupaten /kota rasio belanja publiknya dibawah 50%, yaitu Kabupaten pontianak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang. Besarnya belanja publik yang dialokasikan, jika diimplementasikan menjadi belanja langsung yang efektif dan efisien, maka akan mempercepat pencapaian pada tujuan pembangunan yang dicanangkan, terutama pencapaian pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam perekonomian modern pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang semakin penting. Aktivitas ekonomi sektor pemerintah ditunjukkan oleh kebijakan fiskal melalui penetapan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara. Fungsi pemerintah berbeda dengan fungsi rumah tangga atau perusahaan swasta. Pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam APBN/APBD mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (1997:171), model pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi.
2. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.
3. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut dalam pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran – pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti : program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Pemerintah daerah dapat menyediakan barang dan jasa publik yang bervariasi sesuai dengan keinginan masyarakat secara lokal sehingga lebih efisien daripada harus disediakan oleh pemerintah secara nasional dan seragam (Oates, 1999) dalam Pertama (2009:6). Menurut Kunarjo (1996:81), Pengeluaran Pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan

masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran Pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan negara harus ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa Pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaannya, yang sebagian besar dari pajak. Dengan kata lain antara Pengeluaran Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kewajiban masyarakat untuk membayar pajak sangat erat kaitannya.

Pengeluaran pemerintah merupakan sumber investasi bagi pertumbuhan ekonomi selain investasi swasta. Pemerintah melakukan investasi sosial dalam penyediaan fasilitas publik, di samping investasi yang dilakukan oleh swasta (PMDN maupun PMA). Berbeda dengan investasi swasta yang bertujuan mencari keuntungan, investasi pemerintah didasarkan pada pertimbangan lain yaitu untuk kesejahteraan masyarakat sehingga dinamakan juga investasi sosial (Sukirno, 2000:85). Investasi pemerintah disini adalah realisasi pengeluaran pembangunan daerah yang juga faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.\

Menurut Mangkoesoebroto (1997:2), peranan pemerintah sangat penting di dalam menstabilkan perekonomian negara dikarenakan pihak swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian dan tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta.

1.3.Pertumbuhan Ekonomi

Bagi suatu daerah pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah di capai serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan arah pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu yang mempengaruhi besarnya PDRB adalah belanja pemerintah. Di mana belanja pemerintah terdiri dari belanja yang bersifat rutin (belanja rutin) dan belanja pembangunan. Kedua belanja tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pembangunan ekonomi daerah maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB sebagai berikut:

Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Prov. Kalbar
Tahun 2004 – 2008 (%)

Kabupaten / Kota	2004	2005	2006	2007	2008
1. Kabupaten Sambas	4.96	5.68	3.95	5.38	5.56
2. Kabupaten Bengkayang	6.68	9.07	6.29	6.12	5.77
3. Kabupaten Landak	4.18	3.61	4.78	5.13	4.29
4. Kabupaten Pontianak	3.98	4.25	6.03	7.01	5.90
5. Kabupaten Sanggau	7.95	3.35	8.23	5.48	3.49
6. Kabupaten Ketapang	7.44	11.22	13.87	10.14	7.14
7. Kabupaten Sintang	2.86	4.61	5.01	5.16	4.69
8. Kabupaten Kapuas Hulu	-0.76	0.56	4.07	3.42	3.55
9. Kabupaten Sekadau	2.56	5.69	6.19	7.63	5.76
10. Kabupaten Melawi	3.64	3.70	4.67	5.44	5.11

11. Kota Pontianak	4.96	4.81	4.96	5.45	5.72
12. Kota Singkawang	5.21	6.19	6.33	4.72	5.02
Kalimantan Barat	6.93	4.69	5.23	6.02	5.02

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu di daerah Kabupaten Sanggau sebesar 7,95 %. Sedangkan pada tahun 2005 sampai pada tahun 2008, Kabupaten Ketapang selalu mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota se-Kalbar. Pertumbuhan ekonomi tertinggi yang diperoleh Kabupaten Ketapang adalah pada tahun 2006 yaitu sebesar 13,87% dan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2004 yaitu -0,76%. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang tertinggi yaitu pada tahun 2004 sebesar 6,93 %.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999:15). Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Dari berbagai pandangan yang disampaikan para ahli dapat disimpulkan bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya dan dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Dalam berbagai literature studi empiris ekonometrik, Goudy dan Ladd (1999) dalam Teddy Lesmana menyebutkan ada tingkat kesepakatan dan konsensus terhadap hubungan-hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan. Pertama hubungan itu menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan. Hal ini tergantung pada sejauh mana keadilan dalam distribusi pendapatan di suatu masyarakat. Kedua, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang bisa diprediksi atas ketimpangan di Negara-negara berkembang. Ketiga, tingkat keadilan dalam suatu masyarakat adalah salah satu determinan dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga sejak beberapa tahun terakhir, pro-poor growth atau pertumbuhan yang berpihak kepada orang miskin menjadi strategi ekonomi terpenting bagi keterlibatan sosial (social inclusion) kelompok miskin.

Ramainya perdebatan terkait hal ini dipicu tulisan David Dollar dan Aart Kraay, *Growth is Good for the Poor* (2002) dalam Ivan H Hadar (2009). Dalam studinya, dua ekonom Bank Dunia ini menyimpulkan bahwa tanpa diduga, pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam perang melawan kemiskinan global. Menurut mereka, sejak 40 tahun terakhir, ternyata

pertumbuhan ekonomi global berbanding lurus (satu banding satu) dengan kenaikan pendapatan kelompok miskin. Selain itu, sejak beberapa dekade terakhir ditemukan bahwa tiada tanda-tanda telah terjadi pelemahan pengaruh pertumbuhan atas pengurangan kemiskinan.

Dollar dan Kraay juga menguji pengaruh berbagai strategi kebijakan yang mengalokasikan porsi besar bagi belanja kesehatan dan pendidikan. Temuan mereka cukup mengejutkan. Ternyata, tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa strategi itu membawa dampak sistematis pemerataan penghasilan. Dengan demikian, bisa saja muncul pertanyaan apakah konsep pro-poor growth sebenarnya dapat saja direduksi menjadi sekadar pro-growth? Jawabannya tidak karena, menurut mereka, sekadar pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk memperbaiki kondisi kehidupan orang miskin.

Lalu, apa yang membuat pertumbuhan ekonomi menjadi berpihak kepada orang miskin? Sebuah gambaran cukup lengkap termaktub dalam kumpulan tulisan yang dipublikasikan Michael Krakowski (2004), *Attacking Poverty, What Makes Growth Pro-Poor*. Stephan Klasen dalam Ivan A Hadar (2009) memberi batasan jelas. Pertama, harus dipastikan bahwa kelompok miskin memperoleh keuntungan lebih dari pertumbuhan dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Sebuah perbandingan lurus seperti diungkap Dollar dan Kray tidak masuk dalam kategori ini. Kedua, diperlukan distribusi pendapatan dalam kelompok miskin itu sendiri. Mereka yang paling miskin perlu diprioritaskan. Dalam penelitian mereka di Kosta Rika, El Salvador, Nigeria, Panama, Senegal, dan Tanzania, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata berjalan paralel dengan menurunnya penghasilan orang miskin.

Sebuah posisi berseberangan ditunjukkan Surjit Bhalla dalam buku *Imagine There's No Country-Poverty, Inequality, and Growth in the Era of Globalization* (2002) dalam Ivan A Hadar (2009). Secara eksplisit, Bhalla mencari jawaban atas pertanyaan terkait dampak globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi penghasilan, dan kemiskinan. Menurut dia, sepanjang 1980 hingga 2000, pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah mengurangi perbedaan penghasilan. Pertumbuhan menurut dia, adalah propoor.

1.4. Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Berbagai upaya dan kebijakan pembangunan telah dilakukan pemerintah terutama memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemiskinan sering kali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan. Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu.

Masalah kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kondisi masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan baik kemampuan dalam pemikiran faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai. Akibatnya mereka tidak mendapatkan manfaat

dari hasil pembangunan dan mengakibatkan ketidak sempurnaan pasar, keterbelakangan, produktivitas, pendapatan, tabungan, investasi yang akan dihasilkan semakin rendah dan pada akhirnya kekurangan modal.

Tabel 3.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Prov. Kalbar
Tahun 2004 – 2008 (%)

Kabupaten / Kota	2004	2005	2006	2007	2008
1. Kabupaten Sambas	14,46	15,10	16,77	14,00	11,51
2. Kabupaten Bengkayang	15,18	13,63	14,63	11,88	9,41
3. Kabupaten Landak	24,68	25,87	27,82	24,95	18,65
4. Kabupaten Pontianak	11,45	9,82	10,95	8,26	7,03
5. Kabupaten Sanggau	10,93	9,84	10,55	7,97	6,25
6. Kabupaten Ketapang	18,35	19,23	20,76	17,94	15,21
7. Kabupaten Sintang	16,61	19,09	19,80	17,10	13,61
8. Kabupaten Kapuas Hulu	16,06	16,90	17,76	15,05	11,44
9. Kabupaten Sekadau	10,83	11,76	12,57	10,25	7,66
10. Kabupaten Melawi	21,52	20,63	22,05	19,50	14,80
11. Kota Pontianak	6,47	6,84	7,15	6,77	9,29
12. Kota Singkawang	9,78	10,33	8,32	7,02	7,89

Sumber : BPS Kalimantan Barat

Dari tahun 2004 - 2008, Kabupaten Landak memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di antara seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Penduduk miskin tertinggi yaitu di Kabupaten Landak adalah pada tahun 2006 yaitu sebesar 27,82 % dan penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Sanggau pada tahun 2008 yaitu 6,25 %.

Pemahaman Amartya Sen (1999) dalam Ivan A Hadar (2009), bahwa kemiskinan adalah kurangnya kesempatan bagi seseorang untuk secara mandiri memperbaiki kondisi hidupnya, perlu menjadi pertimbangan. Kesehatan yang buruk, konflik kekerasan, lemahnya tanggung jawab negara, serta buruknya kondisi lingkungan hidup adalah berbagai kondisi yang, menurut Sen, ikut membatasi kesempatan itu. Berbeda dengan Dollar dan Kraay yang melakukan studi secara global, ada temuan lain yang diperoleh dari studi di beberapa negara. Louise Lopez dan John Page, misalnya, menunjukkan pertumbuhan bisa berjalan parallel dengan pemerataan, atau sebaliknya memperbesar kesenjangan.

Menurut Suyatno dalam BPS (1995: 59) ” kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditenggarai dari kondisi struktural, atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan ”. Kemiskinan struktural dipengaruhi kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan cenderung membaik pada kasus pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai akibat peningkatan pendapatan secara signifikan pada sektor tradisonal (*traditonal sector enrichment*). Sebaliknya distribusi pendapatan semakin memburuk karena peningkatan pendapatan sektor modern (Field, 1979).

Sementara itu Arsyad (1997:218) mengemukakan bahwa:

- 1) Kemiskinan itu multi dimensial, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam – macam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Dilihat

dari kebijakan umum kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset-aset, organisasi sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut memanifestasikan diri dalam bentuk kekurangan gizi, air dan perumahan yang tidak sehat dan perawatan kesehatan yang kurang baik.

- 2) Aspek-aspek kemiskinan adalah saling berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran aspek lainnya.
- 3) Bahwa yang miskin adalah manusia baik secara individual maupun kolektif.

Selain itu masih ada juga ciri-ciri kemiskinan lain sebagai berikut:

- 1) Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- 2) Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha. Disamping itu merekapun tidak memenuhi syarat pendapatan kredit perbankan, sebagai jaminan kredit yang biasanya mempunyai hubungan yang sangat tinggi.
- 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah (tidak tamat sampai Sekolah Dasar (SD)) dikarenakan waktu mereka pada umumnya habis untuk mencari nafkah demi untuk membantu orang tua mereka sehingga mereka tidak ada lagi waktu untuk untuk belajar.

Sharp, et.al (1996:173-191) yang dikutip oleh Kuncoro (2004:157) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu:

- 1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini dikarenakan rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
- 3) Penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circles of poverty*). Adanya keterbelakangan ,ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan menyebabkan keterbelakangan.

Berdasarkan teori Keynes, belanja pemerintah merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan belanja pemerintah dalam APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama jangka panjang memang sangat penting bagi penurunan/penghapusan kemiskinan. Kerangka dasar pemikiran teoristiknya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan / meningkatkan kesempatan kerja yang berarti mengurangi pengangguran dan meningkatkan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Artinya, ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan meningkat kembali. Pertumbuhan ekonomi secara kontemporer dapat mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pertumbuhan yang berkelanjutan penting untuk mengurangi kemiskinan. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada pendapatan dan daya beli dari mayoritas penduduk, khususnya golongan bawah. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi tersenut memberikan dampak terhadap kesejahteraan penduduk yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental sehingga menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektivitas berbagai jenis program pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi instrumen yang sangat berpengaruh dalam penurunan kemiskinan pendapatan (*income poverty*), sehingga dibutuhkan cara-cara yang tepat dalam mengkaji dampak kemiskinan terhadap pertumbuhan. Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara / kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusikan dengan baik di antara penduduk maka akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah penurunan kemiskinan.

1.5. METODOLOGI

1.5.1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan analisis pengaruh variabel independent yaitu Belanja Daerah (x_1), Pertumbuhan Ekonomi (x_2), dan variabel dependent yaitu Kemiskinan (Y), digunakan analisis metode kuantitatif. Dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple*) melalui program *software economicr views (E-views) version 4*, sebagai berikut:

$$\text{LogY}_{it} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Kemiskinan
- a = konstanta
- b = koefisien regresi
- X₁ = Belanja publik
- X₂ = Pertumbuhan ekonomi
- e = kesalahan (error)

Untuk mengetahui besarnya kontribusi (sumbangan) variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas maka digunakan R² (Koefisien Deteminasi). Untuk mencari pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat yaitu menggunakan uji F atau F test. Uji ini digunakan untuk pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan hipotesis berdasarkan pada uji F dengan tingkat probabilitas 95%. Probabilitas dari hasil Uji-F dengan $\alpha = 0,05$. Selanjutnya untuk mencari pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat yaitu menggunakan uji t atau t test. Uji ini digunakan untuk melihat peranan tiap variabel bebas secara parsial atau individual terhadap variabel terikatnya.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data panel data *time series* periode 2004-2008 dan data *cross section* yaitu data 12 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Sumber data , yaiyu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (BPS), dan Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Barat.

1.5.2. Definisi Variabel Penelitian

Adapun variabel-variabel yang diteliti meliputi:

- a. Belanja publik / Belanja Langsung adalah pengeluaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati masyarakat atau publik.
- b. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat pun meningkat.
- c. Kemiskinan adalah suatu situasi di mana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak.

2. PENGARUH BELANJA PUBLIK, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN

2.1. Belanja Publik, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan,

Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Menurut Sen

(1999) kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak.

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, baik yang relatif tetap maupun yang berkembang. Faktor relatif tetap misalnya letak geografis dan daya dukung alam. Faktor yang berkembang berupa keadaan sosial budaya yang menyangkut pengetahuan dan ketrampilan, adat istiadat, situasi politik dan kebijaksanaan penguasa. Ada beberapa indikator yang menyebabkan orang terperangkap kemiskinan, diantaranya perkembangan di bidang sosial dan ekonomi antara lain pelayanan kesehatan, gizi, pengajaran, perumahan, konsumsi, transportasi dan jasa, pertanian, industri dan perdagangan.

Tabel 4.
Rata – Rata Belanja Publik, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota dari Tahun 2004 – 2008(%)

Kab/Kota	Belanja Publik	Pert Ekonomi	Kemiskinan
1. Kab Sambas	67.81	5.11	14.37
2. Kab Bengkayang	72.44	6.79	12.95
3. Kab Landak	45.29	4.40	24.39
4. Kab Pontianak	67.36	5.43	9.50
5. Kab Sanggau	66.25	5.70	9.11
6. Kab Ketapang	50.41	9.96	18.30
7. Kab Sintang	64.65	4.47	17.24
8. Kab Kapuas Hulu	33.07	2.17	15.44
9. Kab Sekadau	45.17	5.57	10.61
10. Kab Melawi	61.30	4.51	19.70
11. Kota Pontianak	32.35	5.18	7.30
12. Kota Singkawang	41.26	5.49	8.67

Sumber : Data Olahan (biro Keu Pemda Provinsi Kal-Bar & BPS Kal-Bar)

Dapat dilihat pada tabel 4 bahwa tidak semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang apabila belanja publik meningkat dan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Sebagai contoh dapat dilihat pada daerah Kabupaten Sambas yaitu besar belanja publik sebesar 67.81 %, dan pertumbuhan ekonominya sebesar 5.11 % sedangkan tingkat kemiskinan sebesar 14.37. Ini menunjukkan jika belanja publik besar dan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi karena dana alokasi belanja publik tidak berpusat pada belanja modal yang secara langsung dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonominya tinggi tidak dipengaruhi oleh semua sektor, hanya dipengaruhi oleh sektor perdagangan dan perkebunan.

Contoh lain yaitu daerah Kabupaten Ketapang yang belanja publiknya sebesar 50.41 % dan pertumbuhan ekonominya sebesar 9.96 % dan tingkat kemiskinan sebesar 18.30 %. Ini terjadi karena dana alokasi belanja publik tidak digunakan untuk belanja modal yang dapat dinikmati langsung untuk sarana dan prasarana publik, sedangkan pertumbuhan ekonominya tinggi dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan perikanan. Sehingga dampak dari besarnya belanja

publik dan tingginya pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh orang-orang yang berkepentingan didalamnya dan tidak dinikmati oleh masyarakat miskin sehingga tingkat kemiskinan tetap tinggi. pertumbuhan ekonomi yang meningkat disebabkan oleh sebagian kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi (kaya) dan distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga kemiskinan tetap tinggi. Tujuan awal belanja publik dan pertumbuhan ekonomi meningkat untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan tidak terealisasi karena belanja publik tidak berfokus pada belanja modal yang membiayai fasilitas-fasilitas yang digunakan langsung oleh masyarakat.

Hubungan antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan bervariasi. Belanja publik terdiri dari belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal. Belanja publik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dengan belanja publik yang besar untuk belanja pegawai dan belanja barang & jasa sehingga sedikit akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja publik hanya sedikit mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan, karena total belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal lebih sedikit dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang & jasa. Hanya belanja modal yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Karena belanja modal dialokasikan untuk perbaikan fasilitas-fasilitas umum, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, jalan dan lain-lain.

Teori ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan semakin banyaknya output nasional, mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja sehingga seharusnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama jangka panjang memang sangat penting bagi penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menciptakan dan meningkatkan kesempatan kerja yang berarti mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan. Sehingga penduduk bisa memenuhi kebutuhannya dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan demikian jika belanja publik dan pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya pertumbuhan tersebut harus efektif mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung pertumbuhan perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana orang miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Sedangkan secara tidak langsung diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor moderen seperti jasa dan manufaktur yang padat modal ke golongan penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak berarti bagi kaum miskin apabila distribusi pendapatan antara kaya dan miskin pincang. Jika distribusi pendapatan tetap sama, dengan setiap pendapatan atau pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh semua kelompok pendapatan. Dan jika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok pendapatan tertinggi (terkaya), maka berarti kesenjangan dalam distribusi pendapatan membesar dan efek pertumbuhan tersebut sangat kecil terhadap penurunan jumlah orang miskin.

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan juga dapat dilihat dari aspek kesempatan kerja dari perubahan output. Jika output turun, maka kesempatan kerja juga berkurang sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat yang selanjutnya jumlah orang miskin juga bertambah.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat di lihat dari besarnya pengeluaran dalam APBD untuk membiayai program-program pemberantas kemiskinan. Pengeluaran pemerintah untuk program-program pemberantasan kemiskinan diberikan dalam 2 bentuk yaitu: (1). Dalam bentuk uang (kas), subsidi beras, pelayanan kesehatan dan gizi dan pendidikan. (2). Penciptaan kesehatan kerja (termasuk pembangunan infrastruktur & pemberian kredit).

3. PENGARUH BELANJA PUBLIK DAN PERTUMBUHAN KONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh fungsi regresi sebagai berikut:

$$\text{LogY}_{it} = a - 0,058343\text{LogX}_1 + 0,038499\text{LogX}_2$$

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Nilai Koefisien Variabel Bebas terhadap Variable Terikat, dan t hitung

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG Belanja Publik (X ₁)	-0.058343	0.025243	-2.311.273	0.0254
LOG Pertumbuhan Ekonomi (X ₂)	0.038499	0.117271	0.328291	0.7442
Fixed Effects				
_SBS—C	12,15399			
_BKY—C	11,16646			
_LDK—C	12,23484			
_PTK—C	12,09978			
_SGU—C	11,51926			
_KTP—C	12,32159			
_STG—C	12,09891			
_KPH—C	11,36036			
_SKD—C	10,84365			
_MLW—C	11,38926			
_KPT—C	11,42989			
_SKW—C	10,57381			

Sumber : Data olahan Eviews 4

Untuk melihat bagaimana pengaruh belanja publik (X₁) dan pertumbuhan ekonomi (X₂) terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat (Y) dapat diketahui dengan melihat angka koefisien regresi belanja publik (X₁) dan pertumbuhan ekonomi (X₂). Diketahui bahwa nilai koefisien regresi belanja

publik (X_1) yaitu sebesar - 0,058343 % dan pertumbuhan ekonomi (X_2) yaitu sebesar 0.038499 %. Dari hasil tersebut terlihat bahwa belanja publik (X_1) berhubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat dan pertumbuhan ekonomi (X_2) berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat (Y). Hal tersebut dapat diartikan yaitu sebagai contoh di daerah Kabupaten Sambas apabila belanja publik (X_1) dan pertumbuhan ekonomi (X_2) tetap maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 12,15399 %. Jika belanja publik (X_1) naik sebesar 1 % sementara pertumbuhan ekonomi (X_2) tetap maka tingkat kemiskinan akan penurunan sebesar 0,058343 %. Dan apabila belanja publik (X_1) tetap sementara pertumbuhan ekonomi (X_2) naik sebesar 1 % maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 0.038499 %.

3.1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dapat menjelaskan pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap nilai variabel terikat. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak dilakukan dengan cara: Membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} , dengan didasarkan pada derajat kebebasan (dk) pembilang = 2 dan derajat kebebasan penyebut $dk=n-k-1$ (n = jumlah anggota sampel, k = jumlah variabel bebas), dengan ketentuan apabila $F_{hitung}>F_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Dengan demikian diperoleh derajat kebebasan sebesar $60-2-1=57$, derajat kesalahan (α) = 0,05 atau 5% dengan menggunakan uji satu pihak kanan diperoleh F_{tabel} sebesar 3,15.

Diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 7.014942 dan F_{tabel} sebesar 3,15 dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dapat diketahui bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($7.014942>3,15$). Artinya ada pengaruh antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat.

3.2.Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya persentase sumbangan variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat di gunakan Koefisien Determinasi (R^2) dimana nilai koefisiennya terletak diantara 1 dan -1. Nilai koefisien korelasi ganda (R) antara X_1 , X_2 dengan Y sebesar 0.938461. Artinya: terdapat hubungan yang sangat lemah antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Sedangkan Nilai koefisien determinasi (R^2) atau R-Square sebesar 0.921070, artinya: tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh belanja publik dan pertumbuhan adalah sebesar 92,1070 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

3.3. Uji T (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu atau parsial terhadap variabel terikat. Uji t juga digunakan untuk melihat variabel bebas mana yang memiliki pengaruh paling besar atau paling dominan terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 3.6. uji signifikansi (uji t) diperoleh t hitung (-2,311273) maka dapat disimpulkan

bahwa variabel belanja publik (X_1) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat karena $\text{prob} > \alpha$ atau $0,0254 < 0,05$. Dan uji signifikansi (uji t) diperoleh t hitung ($0,328291$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat karena $\text{prob} > \alpha$ atau $0,7442 > 0,05$.

Meningkatnya belanja publik diharapkan pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan ekonomi seperti perbaikan jalan, jembatan dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut maka dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Hubungan negatif antara belanja publik dan kemiskinan. Berarti belanja publik yang meningkat mengakibatkan tingkat kemiskinan turun. Kebijakan memperbesar belanja publik yang berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan, terutama kebijakan yang produktif seperti perluasan akses semua orang ke pendidikan dan pelayanan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, serta pembangunan sektor-sektor pertanian dan ekonomi pedesaan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan hasilnya positif. Ini menandakan kebijakan untuk mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai di Kalimantan Barat ternyata tidak terdistribusi secara merata pada seluruh masyarakat. Memang untuk mengentaskan kemiskinan salah satu prasyaratnya adalah mengurangi pengangguran dan menyerap angkatan kerja baru dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hanya saja apakah mungkin penyediaan lapangan kerja dapat dilakukan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi? Atau apakah ada korelasi langsung pengurangan kemiskinan yang disertai distribusi kekayaan dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi? Dengan kata lain dapatkah pertumbuhan ekonomi sebagai permasalahan (problem solving) untuk perekonomian.

Ketidakmampuan metode pertumbuhan ekonomi sebagai problem solving disebabkan kesalahan konsep ini dalam memandang kemiskinan yang harus dipecahkan, yakni kemiskinan yang menimpa negara bukan kemiskinan yang menimpa individu. Juga konsep ini menitikberatkan perhatiannya pada aspek produksi barang dan jasa bukan pada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini serta uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perkembangan belanja publik, pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat yaitu pengaruh antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan bervariasi. Belanja publik terdiri dari belanja pegawai, belanja barang & jasa, dan belanja modal. Belanja publik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,

dengan belanja publik yang besar untuk belanja pegawai dan belanja barang & jasa sehingga sedikit akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja publik hanya sedikit mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan, karena total belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal lebih sedikit dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang & jasa. Hanya belanja modal yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Karena belanja modal dialokasikan untuk perbaikan fasilitas-fasilitas umum, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, jalan, infrastruktur dan lain-lain yang dapat memicu kegiatan ekonomi menjadi lebih baik.

2. Hubungan belanja publik terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat bernilai negatif sedangkan hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat bernilai positif, dari hasil perhitungan regresi dengan menggunakan program Eviews 4. Nilai konstanta setiap Kabupaten/Kota berbeda dikarenakan besarnya belanja publik dan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi terhadap tingkat kemiskinan berbeda di setiap daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Nilai koefisien belanja publik (X_1) naik sebesar 1 % sementara pertumbuhan ekonomi (X_2) tetap maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar nilai belanja publik. Dan apabila belanja publik (X_1) tetap sementara pertumbuhan ekonomi (X_2) naik sebesar 1 % maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar nilai pertumbuhan ekonomi.
3. Belanja Publik dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat sebesar 92,1070 %, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis bermaksud memberikan saran yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi proses pembangunan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yaitu :

1. Setiap daerah dalam menyusun alokasi anggaran belanja hendaknya lebih mengutamakan pada anggaran belanja pembangunan dimana masyarakat dapat merasakan dampaknya.
2. Daerah harus proaktif menciptakan program-program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan dampak kepada penurunan tingkat kemiskinan.
3. Daerah dapat memperhatikan efektivitas dan efisiensi alokasi dana belanja publik sehingga dana alokasi belanja publik dapat tetap sasaran dan dapat diawasi penggunaannya agar lebih bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi IV, STIE YPKN, Yogyakarta, 1997.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2006 - 2008. *PDRB Atas Harga Konstan Kalimantan Barat 2006-2008*. Pontianak.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2006 - 2008. *Data Kemiskinan*. Pontianak.
- Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Barat. 2006 – 2008. *Data Belanja Daerah Kalimantan Barat*. Pontianak.
- Halim, Abdul, 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*,: UPP YKPN. Yogyakarta.
- Hadar. Ivan .A. *Pertumbuhan orang miskin* , www. google, 10 september 2009
- Kunarjo, 1996, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, UI Press, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Ekonomika Pembangunan, Edisi ke 4 Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Penerbit : (UPP) STIM YKPM
- Lesmana, Teddy, *Ketimpangan dan Ketertingan*, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Jakarta, Republika, 16 Juni 2007.
- Mardiasmo, 2009, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi : 2005-2008* (dalam Era Baru Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, editor : Anggito Abimayu dan Andie Megantara), Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 1997. *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Pertama, Hamdi Aniza, 2009, *Desentralisasi Pemerintahan: Desentralisasi Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Efisiensi Ekonomi sektor Publik dan Kualitas Pelayanan Publik*, HAMDIANIZAPERTAMA@pajak.go.id.
- Pressman, Steven. 2000. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Terjemahan Tri Wibowo Rudi Santosa, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2000, *Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Todaro, Michael P & Stephen C Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi ke 8. Penerbit: Erlangga. Jakarta.

PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT PASCA KRISIS EKONOMI

Oleh : Meiran Panggabean

Abstract

Regional development in West Kalimantan faces not only economic problems but also nature and social ones, especially in 1997 as monetary crisis hit the Indonesian economy. During the last ten years, started from unfavorable condition with a negative economic growth of -4,72%, improved economic growth had been successfully achieved. West Kalimantan's economic structure before and after the monetary crisis had been changed considerably. Until 2006, however, agricultural sector still dominated the regional economy structure (27,0%), followed by trading, hotel, and restaurant sector (22,9%), and industrial sector (18,2%). Unfortunately, this impressive achievement went in tandem with other structural problems.

Keyword : pembangunan daerah, struktur ekonomi, krisis ekonomi.

1. Pendahuluan

Badai krisis ekonomi sesungguhnya belum sepenuhnya berlalu dari pembangunan ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi masih tetap menjadi beban di tengah kehidupan masyarakat. Setidaknya itulah pendapat Dr.Sri Adiningsih (2007) dalam bukunya yang berjudul "Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia : Badai Pasti Berlalu?". Tulisan ini tidak bermaksud men debat pendapat di atas. Tulisan ini ingin membahas capaian pembangunan dari awal krisis ekonomi hingga saat ini, dilengkapi dengan deskripsi masalah, tantangan dan strategi pembangunan daerah Kalimantan Barat. Mengingat Pembangunan Kalimantan Barat merupakan bagian pembangunan Nasional, maka baik buruknya pembangunan nasional dengan sendirinya berdampak positif atau negatif bagi pembangunan daerah. Setelah satu dekade krisis ekonomi menerpa perekonomian Indonesia, adalah penting untuk melihat bagaimana dinamika proses pembangunan nasional maupun daerah. Mengawali tulisan ini akan dipaparkan secara singkat sebab dan akibat krisis ekonomi terhadap pembangunan di Indonesia, dilanjutkan pembahasan dampak krisis dalam pembangunan daerah Kalimantan Barat.

2. Krisis Ekonomi¹ : Ujian Terhadap Fondasi Pembangunan

¹ Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sekarang sesungguhnya bukanlah pengalaman pertama untuk Indonesia. Pada awal tahun 1980-an Pemerintah pernah dikejutkan oleh adanya penurunan secara harga minyak (migas) yang berdampak pada penurunan penerimaan pemerintah. Penurunan penerimaan itu begitu hebatnya karena saat itu pendapatan pemerintah sangat tergantung kepada sektor migas, bahkan kurang lebih 70% penerimaan pemerintah bersumber dari sector tersebut. Sekaligus saat itu menandai

Tatkala badai krisis ekonomi menerpa perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 1997, daya tahan fondasi ekonomi Indonesia yang dibangun selama pemerintahan orde baru (sekitar 30 tahun) langsung merosot hanya dalam hitungan hari. Fondasi ekonomi yang diukur dengan membaiknya indikator makro ternyata tidak sekuat seperti yang dipublikasikan (yaitu menjadi salah satu "macan asia"). Dibalik prestasi baik yang dicapai pembangunan Indonesia, ternyata menurut Abimanyu (2000 : xii) terdapat kerapuhan fundamental makro dan mikro ekonomi yang membawa perekonomian Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Ironisnya, fundamental ekonomi yang rapuh tersebut telah ada sejak lama. Lebih tegas Wibisono (1998) mengungkapkan bahwa akar krisis itu sudah mulai ada sekian tahun lalu dan terus berkembang berkat proteksi sang penguasa karena menguntungkan dan memperkaya mereka (penguasa dan kroni-kroninya). Jika demikian kondisinya, tidaklah mengherankan krisis ekonomi yang menerpa perekonomian Indonesia sulit disembuhkan atau dipulihkan. Krisis ekonomi berbuah krisis sosial dan politik (krisis kepercayaan). Krisis di Indonesia melebar menjadi krisis multidimensi. Pembangunan cenderung stagnan. Krisis ekonomi membawa dampak pada seluruh sendi kehidupan ekonomi. Dampaknya tidak lagi terbatas pada ranah ekonomi dan moneter tetapi juga pada ranah non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merosot hingga ke angka negatif (-13,3%), rupiah melemah hingga ke angka Rp.15.000 per US Dollar, inflasi melambung tinggi (77,6%), angka pengangguran dan angka kemiskinan meningkat signifikan, hutang luar negeri membengkak, suku bunga tabungan dan pinjaman meningkat tajam, defisit fiskal dibiayai luar negeri, krisis kepercayaan di sektor perbankan, angka kriminal meningkat kuantitas dan kualitasnya, suhu politik cenderung memanas, tuntutan "merdeka" dari beberapa propinsi semakin menguat, angka dan ragam korupsi meningkat. Melihat potret demikian ini, para ekonom dan pelaku bisnis menyatakan bahwa krisis ekonomi Indonesia telah membawa kebangkrutan dan keterpurukan bagi pembangunan.

Kebangkrutan dan keterpurukan sebagai akibat krisis ekonomi oleh Simatupang dan Nizwar (2000 : 455) menandakan bahwa pembangunan ekonomi yang memprioritaskan pembangunan sektor industri yang tidak berbasis pertanian terbukti gagal menciptakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Terjadi fenomena *premature industrialization* yang menimbulkan (1) sindroma pertumbuhan tanpa transformasi struktural, (2) rentannya kembali ketahanan pangan nasional, dan (3) timpangnya distribusi pembangunan baik secara individual, spasial maupun sektoral. Tamparan keras badai krisis ekonomi harus dibayar mahal. *Cost of adjusment* untuk menghadapi krisis sangat besar. Pembangunan ekonomi nasional yang cenderung stagnan sebagai akibat krisis ekonomi berdampak buruk bagi pembangunan daerah. Sebagian besar program pembangunan daerah terkendala karena pendanaan pembangunan daerah sebagian besar besumber dari Pusat (APBN). Pembangunan yang dilakukan dari kondisi

berakhirnya masa pertumbuhan yang didanai dari minyak dan juga berakhirnya era dana yang melimpah. Kejutan pertama ekonomi nasional ini benar-benar tidak terprediksikan karena sebetulnya secara makro ekonomi nasional sedang mengalami puncak pertumbuhan (booming). Sehingga dapat dibayangkan, ketika krisis itu berlangsung kepanikan melanda pada sebagian masyarakat dan juga pemerintah sendiri, (Yustika, 2007 : 32).

bangkrut dan terpuruk relatif lebih sulit dibanding pembangunan yang dilakukan dari awal (Pelita I). Dikatakan lebih sulit karena pra kondisi yang ada pada saat krisis ekonomi (seperti keadaan sosial politik) tidak kondusif. Pembangunan ekonomi pada situasi krisis ekonomi membutuhkan energi besar. Hutang luar negeri semakin membengkak. Ketua Umum PP ISEI Burhanuddin Adullah, dalam *keynote speech*-nya (2007), mengatakan bahwa berbagai kebijakan, strategi dan langkah-langkah telah dilakukan untuk meletakkan kembali fondasi perekonomian bangsa yang diharapkan dapat membawa Indonesia mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, perekonomian Indonesia masih diwarnai oleh fenomena *paradox of growth* yaitu ia mampu terus tumbuh, namun tidak disertai dengan peningkatan kualitas dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 telah membawa serangkaian perubahan mendasar dalam pengelolaan negara di bidang perekonomian. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan serta penerapan berbagai paket kebijakan baru yang diharapkan mendorong kesinambungan perekonomian, serta semangat perencanaan pembangunan yang tertulis secara nyata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009, ternyata belum mampu dengan cepat meningkatkan kinerja sektor riil selama tiga tahun terakhir, sehingga mengakibatkan lemahnya daya serap lapangan kerja di Indonesia, dan menurunkan kesejahteraan serta daya beli masyarakat.

Mencermati indikator makro ekonomi Indonesia yang dicapai dalam 10 tahun terakhir, tampak bahwa capaian kinerja pembangunan ada yang menggembirakan dan ada pula yang memprihatinkan. Capaian yang menggembirakan antara lain meliputi :

- a. Tercapainya konsolidasi fiskal yang ditandai dengan disiplin fiskal yang terjaga (defisit < 2%) dan semakin menurunnya rasio hutang terhadap PDB;
- b. Posisi eksternal yang semakin kuat yang dibuktikan dengan keputusan keluar dari program IMF (2003) dan percepatan pembayaran utang IMF (2006);
- c. Cadangan devisa semakin meningkat dan semakin kuat (31 Miliar dolar AS tahun 2006);
- d. Beban utang eksternal mereda yang ditandai dengan berkurangnya Utang Luar Negeri (37,4% tahun 2007) dan *Debt Service Ratio* (24,9 tahun 2006);
- e. Struktur perbankan yang semakin sehat, ditandai dengan CAR dan NPL yang membaik ;
- f. Pertumbuhan ekonomi berangsur-angsur mulai bangkit (rata-rata tumbuh 5% per tahun);
- g. Inflasi bergerak stabil pada kisaran di bawah 10% dan nilai tukar rupiah bergerak stabil pada kisaran 9.000 – 10.000 rupiah per 1 dollar AS.

Sementara itu, capaian kinerja pembangunan yang memprihatinkan adalah ketidakberhasilan (1) mengurangi jumlah penduduk miskin dan (2) angka pengangguran terbuka serta (3) mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan. Lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin bertambah banyak (39 juta jiwa

tahun 2006) dan angka pengangguran terbuka semakin meningkat (10,3% tahun 2006) serta kesenjangan distribusi pendapatan semakin lebar (Gini Ratio = 0,345). Berdasar pada capaian kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan tersebut--- sebagai parameter untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi menurut Prof. Dr. Dudley Seers (1970) dalam Mubyarto (1986 : 25); Todaro (1989 : 85-90)--- maka dapat dikatakan **pembangunan ekonomi Indonesia hingga saat ini belum berhasil memberi makna yang berarti bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia**. Negara tanpa pembangunan (?). Keadaan ini mengisaratkan telah terjadi *paradox of growth* dalam pembangunan Indonesia sekaligus mengundang tanya ”apakah strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia sudah berada pada jalur yang benar?”

3. Pembangunan Daerah Kalimantan Barat : Fakta Dan Data

Tahun 1997 merupakan tahun kelabu bagi Propinsi Kalimantan Barat. Dikatakan tahun kelabu, karena pada tahun tersebut pembangunan ekonomi ”terganggu” oleh peristiwa yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dampak krisis ekonomi terjadi secara bersamaan disertai dengan asap tebal akibat pembakaran lahan yang berlangsung lama dan mengganggu aktivitas ekonomi. Transportasi barang dan orang melalui darat, laut dan udara dari dan ke Kalimantan Barat macet. Selain itu, konflik sosial antar etnis tertentu yang memakan korban jiwa dalam jumlah yang relatif besar, juga berperan mengganggu aktivitas perekonomian. Jadi pembangunan daerah Kalimantan Barat tidak hanya menghadapi masalah ekonomi (dampak krisis ekonomi), tetapi juga masalah alam dan sosial. Dengan kata lain, pembangunan daerah Kalimantan Barat yang berlangsung dalam 10 tahun terakhir, diawali dengan keadaan yang tidak menguntungkan. Meskipun beranjak dari keadaan yang tidak menguntungkan (pertumbuhan ekonomi -4,71%), namun secara makro, capaian kinerja pembangunan ekonomi menunjukkan hasil menggembirakan yang disertai dengan keprihatinan seperti halnya capaian pembangunan ekonomi nasional. Krisis ekonomi pada pertengahan 1997 diikuti dengan krisis moneter dan dampaknya mulai dirasakan pada tahun 1998-1999. Nilai rupiah yang merosot terhadap dollar AS berdampak pada semakin murahnya harga barang dan jasa Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Keadaan ini dimanfaatkan oleh warga negara Malaysia (dan warga negara ASEAN lainnya) berbelanja ke Pontianak. Kedatangan Wisatawan Mancanegara (WISMAN) ke Kalbar berdasarkan catatan Dinas Pariwisata Kalbar menunjukkan peningkatan luar biasa dari 20.441 orang pada tahun 1997 menjadi 205.613 orang tahun 1998.

Perekonomian Kalbar pada tahun 1997-1998 mengalami kemunduran dan cenderung stagnan. Seluruh sektor perekonomian (9 sektor) tumbuh negatif, kecuali sektor Listrik dan Air Minum (tumbuh +5,43%). Daya beli masyarakat merosot akibat lonjakan tingkat inflasi yang relatif tinggi. Masyarakat konsumen dan produsen lebih suka menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan dan deposito karena tingkat bunga tabungan yang spektakuler (sekitar 60% per tahun). Investasi turun drastis dan para pengusaha terjebak pada kredit macet yang bermuara pada kebangkrutan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Akibat

lebih lanjut dari kondisi ini adalah bertambahnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Kehidupan penduduk miskin semakin terpuruk karena berhadapan dengan harga-harga kebutuhan pokok yang relatif mahal di satu sisi dan sulitnya memperoleh tambahan penghasilan di sisi lain. Sementara itu, penduduk golongan kaya dan pemilik modal menikmati “keuntungan” tanpa kerja keras dari bunga tabungan dan deposito. Terjadi kesenjangan (*gap*) antara penduduk miskin dan kaya, dan kesenjangan itu semakin lebar.

Pada tahun 1999 perekonomian Kalbar mulai bangkit dari keterpurukan. Kebijakan stabilisasi dan pemulihan kegiatan ekonomi yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi krisis mulai dirasakan hasilnya. Tingkat inflasi dan tingkat bunga tabungan dan bunga pinjaman semakin menurun. Bersamaan dengan itu, wisatawan Nusantara (WISNU) yang masuk ke Kalimantan Barat bertambah sekitar 60%. Dinas Pariwisata Kalbar mencatat kunjungan WISNU ke Kalbar bertambah dari 533.948 orang tahun 1998 menjadi 824.460 orang tahun 1999. WISNU yang bertambah ini pada umumnya warga Indonesia keturunan (WNI-Cina) korban kerusuhan di Jakarta dan yang takut akan terulangnya kerusuhan. Pertumbuhan ekonomi tahun 1999 meningkat menjadi 2,71 persen dan seluruh sektor tumbuh positif kecuali sub sektor kehutanan (-12,28). Sejak 2000 hingga 2007 perekonomian Kalbar tumbuh secara positif pada kisaran 2,5 – 5,5 persen. Namun pertumbuhan ini masih jauh di bawah pertumbuhan ekonomi Kalbar sebelum krisis ekonomi yaitu kisaran 7,5 – 10,7 persen tahun 1994 – 1996. Menarik untuk disoroti adalah pertumbuhan sub sektor kehutanan. Sejak awal krisis ekonomi hingga tahun 2007, pertumbuhan sub sektor kehutanan selalu negatif. Ini mengindikasikan “salah urus” pemanfaatan hutan. Diduga, maraknya kasus “*illegal logging*” penyebab merosotnya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Struktur perekonomian Kalimantan Barat sebelum dan setelah krisis ekonomi belum mengalami perubahan. Artinya proses pembangunan ekonomi hingga tahun 2007 masih didominasi oleh tiga sektor, yaitu sektor pertanian (27,0%) ; Perdagangan, Hotel dan Restoran (22,9%) dan sektor industri (18,2%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peranan sektor industri mengalami penurunan (-0,32%). Penurunan ini disebabkan adanya 3 industri kayu terbesar di Kalbar tutup (bangkrut) karena semakin sulitnya memperoleh bahan baku. Berdasarkan penghitungan BPS Propinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2006 PDRB perkapita Kalimantan Barat sebesar Rp 9.113.425,- mengalami peningkatan yang relatif tinggi yaitu sekitar 9,54 persen dibandingkan dengan tahun 2005. Mengacu pada nilai tukar rupiah yaitu rata-rata setiap US \$ 1 sebesar Rp 9.020,-, maka PDRB perkapita tahun 2006 telah menembus US \$ 1.000 atau tepatnya sebesar US \$ 1.010,36, meningkat sekitar 21,86 persen dibandingkan dengan tahun 2005.

Secara umum inflasi di Kalimantan Barat tahun 2006 tercatat sebesar 6,32 persen, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2005 yang tercatat sebesar 14,43 persen. Angka inflasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 6,60 persen. Selanjutnya, kegiatan perdagangan di Kalbar telah menyumbang perolehan devisa ekspor daerah yang cukup memadai. Selama tiga tahun terakhir (2004-2006), beberapa komoditi ekspor strategis

mengalami peningkatan volume maupun nilai devisa ekspor, seperti hasil industri karet olahan, hasil hutan ikutan dan hasil perikanan. Tahun 2006, devisa ekspor karet olahan mencapai US\$ 324.501.306,72 atau naik 44,66% dibandingkan tahun 2005. Komoditi lain seperti ekspor hasil hutan ikutan juga menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Selain kegiatan perdagangan skala ekspor, perkembangan perekonomian Kalbar secara kuantitas juga ditunjang dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Selama ini, UMKM dan Koperasi merupakan kekuatan riil dalam membangun kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Kalbar. Perkembangan UMKM dan koperasi tersebut merupakan hasil nyata dari komitmen pembangunan daerah yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Sesuai dengan lingkup usahanya, di Kalimantan Barat saat ini tercatat UMKM formal sebanyak 2.824 unit usaha, dengan menyerap sekitar 11.215 tenaga kerja. Meskipun kontribusinya relatif kecil yakni 1,89 % terhadap PDRB, tentunya sumbangannya semakin bertambah besar manakala peran UMKM sektor informal dilibatkan. Sementara itu, jumlah koperasi konsumsi dan serba usaha termasuk koperasi jasa sebanyak 4.039 unit, dan jumlah KUD sebanyak 416 Unit dengan volume usaha mencapai Rp 43,52 Milyar. Persebaran koperasi konsumsi, koperasi serba usaha dan KUD cukup merata di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

4. Permasalahan : Kegembiraan disertai Keprihatinan

Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi dalam tujuh tahun terakhir telah menampakkan hasil yang menggembirakan walaupun belum optimal. Sayangnya, capaian yang menggembirakan itu masih disertai dengan keprihatinan. Berbagai keprihatinan yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini antara lain adalah :

4.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Tegasnya, persoalan kemiskinan penduduk di Kalimantan Barat tidak cukup hanya dipecahkan dari perspektif ekonomi, tetapi juga dari perspektif pendidikan dan kesehatan serta psikologis. Kesempatan mengenyam pendidikan dan layanan kesehatan serta peningkatan akses kesempatan kerja bagi penduduk/rumah tangga miskin merupakan permasalahan ikutan dari kemiskinan (*derived problem of poverty*).

Berdasarkan hasil SUSENAS pada bulan Juli 2005 dan Maret 2007, potret kemiskinan di Kalimantan Barat menampakkan kecerahan yang ditandai dengan meningkatnya angka garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Garis Kemiskinan meningkat dari Rp.124.804/kapita/bulan menjadi Rp.142.529/kapita/bulan. Hingga Maret 2007, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 45.600 jiwa (1,33%) dari 629.900 jiwa pada Juli 2005 menjadi 584.300 jiwa pada Maret 2007. Penurunan penduduk miskin tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebanyak 27.500 jiwa (2,50%) menjadi 144.100 jiwa pada bulan Maret 2007. Demikian juga di perdesaan, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 18.100 jiwa (0,88%) menjadi 440.200 jiwa pada periode yang sama. Meskipun jumlah penduduk miskin berkurang di Kalimantan Barat, prestasi tersebut belumlah menggembirakan. Secara relatif proporsi kemiskinan tahun 2007 di Kalimantan Barat (12,91%) masih lebih banyak dibanding Kalsel (7,01%), Kalteng (9,38%) dan Kaltim (11,04%).

Seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* disingkat P1) juga menunjukkan penurunan dari 2,44 tahun 2005 menjadi 1,79 tahun 2007. Demikian juga halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* disingkat P2) menurun dari 0,64 tahun 2005 menjadi 0,41 tahun 2007. Semakin tinggi angka P1 dan P2 pertanda semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P1) dan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (P2).

Di sisi lain penampakan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat dapat dilihat dari :

a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin. Rendahnya kemampuan daya beli merupakan persoalan utama bagi masyarakat miskin. Sementara itu permasalahan pada tingkat petani sebagai produsen, berkaitan dengan belum efisiennya proses produksi pangan, serta rendahnya harga jual yang diterima petani.

b. Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan. Pada umumnya tingkat kesehatan masyarakat miskin masih rendah. Angka Kematian Bayi (AKB) pada kelompok berpendapatan rendah masih selalu di atas AKB masyarakat berpendapatan tinggi. Status kesehatan masyarakat miskin diperburuk

dengan masih tingginya penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis paru, dan HIV/AIDS.

c. Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kemiskinan. Pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga saat ini, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin dan antara perdesaan dan perkotaan. Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.

d. Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha. Masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.

e. Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya akses, terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.

4.2. Pengangguran

Proses pembangunan daerah Kalimantan Barat sudah berlangsung relatif lama (hampir 8 Pelita) seiring dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Namun permasalahan ketenagakerjaan belum dapat teratasi secara optimal. Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi hingga saat ini antara lain (1). masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), baik di perkotaan maupun di perdesaan, (2) kecenderungan pertambahan pengangguran terbuka yang berpendidikan SMA dan Sarjana, (3) rendahnya kualitas angkatan kerja dan produktivitas kerja, (4) rendahnya upah minimum provinsi dan upah minimum kota (lebih rendah dari kebutuhan hidup minimum), (5) rendahnya kualitas SDM Transmigran, (6) bertambahnya jumlah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), (7) minimnya advokasi dan perlindungan bagi TKI, (8) kurangnya tenaga pengawas dibanding jumlah perusahaan. Dari 2.874.038 jiwa penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), 68,5% di antaranya tergolong angkatan kerja. Angkatan kerja yang bekerja 92,9% dan yang sedang mencari pekerjaan (disebut Pengangguran Terbuka) adalah 7,1%. Tingginya TPT ini tidak hanya terdapat di perkotaan (40,8%) tetapi juga di perdesaan (59,2%) dan kebanyakan di antaranya adalah penganggur laki-laki (58,5%). Tingkat pendidikan para pengangguran sebagian besar (65,7%) adalah SMP ke bawah, yang berpendidikan SMA, Akademi dan Sarjana masing-masing 26,6%, 4,7% dan 2,0%. Mencermati keadaan pasar kerja sekarang ini yang lebih mengutamakan tamatan SMA dan D-3 dengan pola

outsourcing, diperkirakan pada masa mendatang jumlah pengangguran sarjana akan bertambah banyak.

Kualitas angkatan kerja yang bekerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan produktivitas kerja. Berdasarkan dua aspek ini dapat dinyatakan bahwa kualitas pekerja masih tergolong rendah. Sebagian besar (81,9%) pekerja berpendidikan SLTP ke bawah. Para pekerja ini umumnya (63,8%) terserap di Sektor Pertanian. Produktivitas kerja para pekerja yang bekerja di sembilan sektor ekonomi adalah 13,53 juta rupiah per kapita per tahun. Produktivitas kerja terendah berada di sektor pertanian (5,43 juta/kapita/tahun) dan produktivitas kerja tertinggi di sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (148,05 juta/kapita/tahun). Upah Minimum Propinsi (UMP) sebesar Rp.550.000 per bulan dan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp. 600.000 masih lebih rendah dibanding rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang kisarannya antara Rp.667.192 s.d. Rp.842.142 per bulan. Rendahnya upah yang berlaku di Kalimantan Barat merupakan salah satu alasan tenaga kerja mencari pekerjaan/bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia dan Brunei. TKI asal Kalbar yang bekerja di luar negeri terbagi atas TKI Ilegal dan TKI legal. Jumlah penempatan tenaga kerja ke luar negeri (TKLN) bertambah dari 1.188 orang tahun 2004 menjadi 2.203 orang tahun 2005. Hingga tahun 2006, TKI legal asal Kalbar yang bekerja di luar negeri tercatat sebanyak 1.998 orang. Perlindungan dan advokasi bagi TKI relatif minim. Semakin banyak terungkap TKI yang mengalami tindak kekerasan (penganiayaan), diperlakukan tidak wajar.

Jumlah Transmigran di Kalimantan Barat hingga tahun 2006 tercatat sebanyak 5.084 KK. Produktivitas kerja transmigran masih tergolong rendah yang berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan mereka. Kasus PHK bertambah banyak sebagai akibat perusahaan industri kayu yang tutup (tidak beroperasi lagi). Tahun 2004 kasus PHK tercatat sebanyak 7.076 kasus. Tahun 2005 bertambah sebanyak 3.242 kasus menjadi 10.318 kasus. Hingga tahun 2006 jumlah perusahaan di Kalbar 3.208 buah. Untuk perusahaan sebanyak ini, dengan rasio 1:50, seharusnya dibutuhkan pengawas ketenagakerjaan sebanyak 64 orang. Kenyataannya, jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini sebanyak 25 orang atau 1 orang pengawas ketenagakerjaan mengawasi 128 perusahaan.

4.3. Distribusi Pendapatan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di satu sisi dan penurunan jumlah penduduk miskin di sisi lain, memang merupakan ukuran peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sangat penting. Namun tanpa memperhatikan distribusi pendapatan yang diterima penduduk akan menjebak kita pada kondisi "seolah-olah" kemajuan pembangunan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat/penduduk, padahal belum tentu demikian yang terjadi. Ironisnya, ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok - kelompok penduduk justru bisa menimbulkan masalah-masalah sosial. Oleh karena itu pembahasan permasalahan perekonomian penduduk kurang bermakna bila tidak dibahas juga permasalahan pemerataan/ketimpangan pendapatan, yang dalam hal ini menggunakan proksi pengeluaran, data bersumber dari hasil Survei

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi yang dilaksanakan oleh BPS.

Dalam pengamatan permasalahan ketimpangan pendapatan biasanya kelompok penduduk dibagi atas 40 persen penduduk penerima pendapatan terendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi. Dari penduduk menurut kelompok pendapatan ini akan dipantau persentase pendapatan yang mengalir pada masing-masing kelompok. Indikator utama yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pembagian (distribusi) pendapatan adalah Rasio Gini² dan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah (kriteria Bank Dunia). Tingkat ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Modul Konsumsi tahun 2002 dan 2005, tergambar bahwa ketimpangan pendapatan penduduk Kalimantan Barat dalam periode tersebut tergolong rendah yaitu 40 persen penduduk lapisan paling bawah menerima pendapatan 23,10 persen dari total pendapatan pada tahun 2002 dan menurun menjadi 21,98 persen pada tahun 2005. Walaupun terjadi penurunan selama periode tersebut, tetapi masih berada di atas 17 persen sebagaimana kriteria Bank Dunia. Namun kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena penurunannya tentu akan dinikmati oleh kelompok pendapatan yang lebih tinggi. Selama periode 2002-2005 pada 40 persen penduduk kelompok pendapatan terendah, "kue" pendapatan yang diterima menurun sebesar 1,12 poin. Ternyata pada kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah juga mengalami penurunan sebesar 0,30 poin. Ironisnya, ternyata penurunan pembagian "kue" pendapatan pada dua kelompok pendapatan tersebut justru dinikmati oleh 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi yaitu meningkat sebesar 1,42 poin. Dengan demikian 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi pada tahun 2005 menikmati "kue" pendapatan sebesar 41,83 persen, yang pada tahun 2002 pun sudah menikmati 40,01 persen dari total pendapatan penduduk Kalimantan Barat. Rasio Gini pendapatan penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2002 sebesar 0,301 dan terus bertambah pada tahun 2005 menjadi 0,310. Keadaan ini searah dengan angka rasio gini Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,329 dan meningkat sebesar 0,363 pada 2005. Tren kenaikan rasio gini ini mencerminkan kesenjangan ekonomi yang semakin besar, dengan kata lain menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang disertai kenaikan pendapatan per kapita, tidak diikuti oleh persebaran kekayaan pada seluruh penduduk. Untuk regional Kalimantan penurunan rasio gini hanya terjadi di Kalimantan Selatan, yang berarti selama periode tahun 2002-2005 terjadi peningkatan pemerataan pendapatan. Kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin melebar sangat mungkin dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan strategi pembangunan spasial (Todaro, 2000 : 97-102 ; Kuncoro, 2003 : 78-80). Pembangunan perbatasan antar

2 Lebih lanjut, pemerataan pendapatan dilihat dari sisi Rasio Gini (RG). RG merupakan ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi luas antara garis diagonal dan kurva lorenz dengan luas segi tiga di bawah garis diagonal. Nilai RG terletak antara 0-1. Bila nilai RG mendekati 0 maka tingkat ketimpangan sangat rendah artinya distribusi pendapatan merata, dan bila nilainya mendekati 1 maka tingkat ketimpangan pendapatan sangat tinggi.

negara (Kalbar vs Kucing) dan antar Propinsi belum termanfaatkan secara optimal.

4.4. Investasi

Kalimantan Barat menghadapi permasalahan klasik yang hampir dialami oleh Propinsi lain di Indonesia, yaitu terbatasnya modal yang dimiliki sehingga pemanfaatan sumber daya alam menjadi tidak maksimal. Pencapaian target investasi rata-rata kurang dari 30 persen. Untuk investasi pemerintah, perkembangan yang diamati pada alokasi belanja pembangunan/belanja publik dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan komposisi belanja publik terhadap total belanja terus membaik. Sebagian besar investasi pemerintah diperuntukkan untuk mengatasi permasalahan struktural seperti persoalan perekonomian, sosial, dan pembangunan infrastruktur publik dan prasarana pemerintahan. Investasi swasta khususnya investasi dengan fasilitas PMDN dan PMA mulai menampakkan peningkatan. Namun secara keseluruhan realisasi investasi swasta di Kalbar belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Realisasi PMDN periode 1997-2006 rata-rata 26,11% sedangkan realisasi PMA pada periode yang sama baru mencapai rata-rata 23,79%. Nilai investasi PMA menampakkan trend peningkatan yang cukup memadai dibandingkan dengan nilai investasi PMDN. Namun capaian investasi PMDN sedikit lebih baik dibandingkan investasi PMA. Rendahnya realisasi pencapaian investasi sektor swasta boleh saja dikarenakan daya tarik investasi yang tidak kondusif, sehingga minat investor melemah dan disikapi dengan tindakan "*wait and see*". Daya tarik investasi tidak semata-mata terkait dengan faktor ekonomi tetapi juga faktor non ekonomi. Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam studinya di 214 Kota/Kabupaten tahun 2005 mengungkapkan daya tarik investasi terkait erat dengan keadaan faktor kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas, dan infrastruktur fisik.³

Berdasarkan data Bank Indonesia Pontianak, penyaluran kredit investasi dari bank di Propinsi Kalimantan Barat selama satu dasawarsa terakhir dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Sebelum krisis ekonomi, penyaluran kredit investasi menunjukkan trend semakin meningkat dan puncaknya terjadi tahun 1998. Sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 penyaluran kredit investasi dari bank pemerintah dan swasta tumbuh sebesar 14,93 persen pertahun.
- b. Tiga tahun setelah krisis ekonomi yaitu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001, penyaluran kredit investasi mengalami penurunan sebesar 14,61 persen pertahun.
- c. Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006, trend penyaluran kredit investasi meningkat relatif tinggi yaitu sebesar 22,12 persen pertahun.

³ Perlu dikemukakan bahwa faktor kelembagaan yang diteliti meliputi kepastian hukum, keuangan daerah, aparatur dan Peraturan Daerah; Faktor sosial –politik meliputi stabilitas politik, keamanan dan budaya; Faktor ekonomi daerah meliputi potensi ekonomi dan struktur ekonomi; Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas meliputi biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja; Faktor infrastruktur fisik meliputi ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas infrastruktur fisik.

Berdasarkan data penghimpunan atau simpanan dana rupiah dan valuta asing menunjukkan empat tahun sebelum krisis ekonomi dana yang disalurkan (kredit) perbankan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dana yang disimpan atau tabungan di bank. Sejak tahun 1999, penghimpunan dana masyarakat di perbankan seluruh Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi, jauh melebihi penyaluran kredit. Bahkan pada tahun 2006 tercatat jumlah simpanan di bank pemerintah dan swasta di Propinsi Kalimantan Barat mencapai Rp. 13,04 trilyun, sedangkan kredit yang disalurkan sebesar 7,76 trilyun. Kondisi tersebut mencerminkan masih cukup besarnya dana perbankan yang belum digunakan untuk menggerakkan ekonomi. Tahun 2006 tercatat sebesar Rp. 5,28 trilyun dana simpanan pada bank pemerintah dan swasta di Kalimantan Barat yang belum tersalurkan.

5. Tantangan ke Depan : SDA berkelimpahan vs SDM serba minim

Propinsi Kalimantan Barat dengan luas 14.680.790 Ha, mempunyai berbagai potensi sumberdaya alam berupa lahan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan serta dalam bentuk potensi bahan tambang dan sumberdaya energi. Dari luasan Propinsi, peruntukan untuk lahan pertanian seluas 14.649.120 Ha yang meliputi lahan sawah (497.440 Ha) dan lahan kering (14.151.680 Ha). Usaha perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat) luasnya 1.071.139 ha. Kawasan hutan di Kalimantan Barat mempunyai luas 9.178.760 hektar meliputi Kawasan lindung mempunyai luas 2.307.045 hektar dan kawasan konservasi seluas 1.915.530 ha dan Kawasan budidaya kehutanan mempunyai luas 5.226.135 hektar.

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu produk unggulan Kalimantan Barat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara geografis Kalbar memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup prospektif. Potensi sumberdaya perikanan tangkap di perairan laut Natuna dan Cina Selatan (WPP II), mencapai \pm 1.630,6 (ribu) ton. Potensi perairan Laut Natuna/Laut Cina Selatan dimanfaatkan bersama oleh para nelayan dari berbagai propinsi diantaranya Kepulauan Riau, Jambi, Kalbar, Sumsel, DKI, Jabar, Jateng. Deposit pertambangan di bumi Kalbar terbilang sangat banyak dan beraneka ragam. Deposit pertambangan yang cukup potensial adalah emas (590.900 ton), bauksit (859.635.918 ton), pasir kwarsa (633.664.441 ton), kaolin (317.048.857 ton), granit (1.300.000 ton), pasir sirkon (5.410.484.720 ton), gambut (12.577.145.600 ton), dan batubara (181.635.975 ton).

Jika dicermati potensi sumberdaya alam (SDA) yang luas dan beraneka ragam tersebut, tidak berlebihan kalau disebut Kalimantan Barat salah satu propinsi yang kaya raya. Kekayaan tersebut dilengkapi dengan iklim yang baik, posisi strategis yang berbatasan dengan Kucing (Malaysia) dan dengan propinsi-propinsi yang relatif lebih maju (di Jawa dan Kalimantan), dan bebas bencana alam. Sayangnya, di tengah SDA yang berkelimpahan itu, Sumberdaya Manusia (SDM) yang tersedia serba minim. Minim dalam hal kuantitas, juga dalam kualitas. Sehingga pemanfaatan SDA dalam proses pembangunan daerah hingga saat ini belum optimal dan belum dapat mensejahterakan penduduk. Ini terbukti

dari makin bertambahnya jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran terbuka dan besarnya dana simpanan pada bank pemerintah dan swasta di Kalimantan Barat yang belum tersalurkan (Rp. 5,28 trilyun). Dalam hal pemanfaatan SDA, E.F. Schumacher (1979) dalam bukunya "*Small is Beautiful*" berkata : "Saya yakin bahwa dari berbagai sebab kemiskinan, faktor-faktor material (seperti kekurangan SDA, modal dan prasarana) hanya merupakan sebab sekunder saja. Sebab primernya adalah kekurangan di bidang pendidikan, organisasinya dan disiplinnya. Tanpa ketiga komponen ini semua sumberdaya tetap terpendam, tak dapat dimanfaatkan dan tetap merupakan potensi belaka". Pendapat Schumacher ini menegaskan bahwa dalam proses pembangunan menuju kemajuan dan kemakmuran peningkatan kualitas SDM lebih diprioritaskan.

Paradigma pembangunan yang mengutamakan pembentukan modal tampaknya tidak dapat menjamin kokohnya fondasi ekonomi. Paradigma pembangunan berwawasan manusia menjadi pilihan tepat dalam keberlanjutan pembangunan. Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang (maju) meskipun tidak memiliki kekayaan SDA berlimpah. Penekanan pada investasi manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Alfred Marshall dalam Kuncoro (2003 : 201) menyatakan bahwa tanah, tenaga kerja dan modal fisik bisa saja mengalami *diminishing returns*, namun pengetahuan tidak (*increasing returns*). Pembangunan berwawasan manusia oleh David C. Korten (1981) dalam Kuncoro (2003:202) disebut *people-centered development* atau *putting people first*. Artinya, manusia merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumberdaya yang paling penting.

Pembangunan Sumberdaya Manusia dalam proses pembangunan yang berwawasan manusia haruslah menjadi komitmen bersama antara Pemerintah, Sekolah/Perguruan Tinggi dan Industri serta stakeholder lainnya. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi merupakan keharusan dalam menghadapi kemajuan global. Memenangkan persaingan dalam pasar global mensyaratkan kualitas SDM yang tinggi. Dalam konteks ini Peran Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi harus dalam kebersamaan. Sekolah dan Perguruan Tinggi harus ditopang Pemerintah melalui alokasi dana pendidikan yang memadai. Amanah konstitusi menyatakan minimal 20% dari APBN dan APBD. Pemerintah dan Industri adalah *user* (konsumen) sumberdaya manusia. Sekolah dan Perguruan Tinggi sebagai produsen dituntut menghasilkan output lulusan yang berkualitas baik. Perguruan Tinggi harus memiliki sensitivitas yang tinggi dalam menghasilkan lulusan sesuai tuntutan pasar (*user*). Banyaknya sarjana menganggur seperti yang terjadi sekarang ini, menjadi kritikan bagi Perguruan Tinggi untuk mengkaji ulang proses menghasilkan sarjana. Perguruan Tinggi jangan sampai diberi label (cap) "PT memproduksi PT" alias Perguruan Tinggi (PT) memproduksi Pengangguran Terbuka (PT). Dalam perannya membangun Sumberdaya Manusia, Perguruan Tinggi dapat mengambil pelajaran dari keadaan paradoxal pasar kerja yang terjadi saat ini. Di satu sisi jumlah sarjana menganggur semakin bertambah banyak. Di sisi lain lowongan kerja banyak yang tidak terisi. Mengapa demikian ? Adakah sistem pendidikan dan pengajaran yang dijalankan

selama ini kurang pas? Ini menjadi tantangan bagi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya.

Pemerintah Daerah Kalbar dan Perguruan Tinggi, yang letaknya bertetangga dengan Malaysia, boleh melirik strategi pembangunan yang dilakukan oleh negara tetangga. Strategi pembangunan yang memprioritaskan pengembangan SDM ternyata dapat memperkuat fondasi ekonomi. Terbukti, ketika Indonesia dan Malaysia serta negara-negara Asia lainnya dilanda krisis ekonomi, Indonesia lebih lambat pulihnya dibanding negara-negara lainnya.

6. Kesimpulan

Krisis ekonomi yang berbuah krisis multidimensi menjadi catatan sejarah dalam proses pembangunan nasional dan daerah. Krisis ekonomi membawa kebangkrutan dan keterpurukan sekaligus menjadi koreksi terhadap strategi pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan ekonomi nasional dan daerah yang berlangsung dalam sepuluh tahun terakhir belum memberi makna sesuai dengan hakekat pembangunan ekonomi. Permasalahan kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan dan tingkat investasi yang rendah sampai saat ini belum teratasi. Tantangan Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDA yang banyak dan beraneka ragam. Untuk itu dibutuhkan strategi pembangunan berwawasan manusia (kependudukan). Dalam tataran operasional strategi ini, dibutuhkan komitmen bersama Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Industri serta stake holder lainnya.

Saat negara (daerah) membangun sekarang ini, pemanasan global (*global warming*) sedang berlangsung, ekonomi global terancam resesi akibat lonjakan harga minyak dunia. Sementara itu di dalam negeri pembangunan kita terbebani dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang cukup besar disertai dengan pengurangan anggaran pembangunan. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, kerjasama dan kebersamaan sangat dibutuhkan demi kelangsungan pembangunan. Gubernur, Bupati/Walikota, Para Pengusaha dan Perguruan Tinggi serta stakeholder lainnya merupakan pilar utama untuk memanfaatkan momentum otonomi daerah melaksanakan pembangunan daerah yang berwawasan manusia dan berwawasan lingkungan.

DAFTAR BACAAN

- Badan Pusat Statistik, 2007. Hasil dan Indikator Kemiskinan di Kalimantan Barat 2007, BPS, Jakarta.
-, 2006. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), BPS, Jakarta.
- BAPPEDA, 2008. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat 2008 – 2028, Pontianak (Tidak Dipublikasikan)

- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN, Jakarta.
-, 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Mubyarto, 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia*. BPFE, Yogyakarta.
- Pambhudi, P.Agung, 2005. *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota Di Indonesia, 2004 Persepsi Dunia Usaha*. KPPOD, Jakarta.
- Simatupang, Pantjar, 2005. “Industri Berbasis Pertanian”, dalam Soesastro, Hadi, *et al* (ed.) *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, Buku 5 (1997-2005)*. Kanisius, Yogyakarta.
- Schumacher, E.F., 1979. *Small is Beautiful*. (terjemahan). LP3ES, Jakarta.
- Yustika, Ahmad Erani, 2007. *Perekonomian Indonesia, Satu Dekade Pasca Krisis Ekonomi*. BPFE-UNIBRAW, Malang

ARE SOEs IMPROVED AFTER PRIVATIZATION? : A STUDY ON FINANCIAL PERFORMANCE OF PRIVITIZED ENTERPRISES IN INDONESIA, 1994-2003

Oleh : Anwar Azazi

ABATRAK

Di kebanyakan negara berkembang privatisasi merupakan metode untuk mengembangkan sektor swasta, karena privatisasi dianggap mampu meningkatkan kinerja ekonomi secara efisien dan seringkali dipandang sebagai alat yang efektif dalam mendorong persaingan pasar, tak terkecuali dengan Indonesia. Di Indonesia, privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah diprivatisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan sampel berjumlah 8 BUMN yang diprivatisasi dari kurun waktu 1994-2003 berdasarkan metode IPO. Perbedaan kinerja keuangan diukur dengan rasio keuangan berdasarkan Kep-100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kinerja BUMN. Alat analisis yang digunakan adalah uji beda rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selama periode 1994-1999, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan sebelum dan sesudah privatisasi.

Keywords: SOEs, Privatization, financial performance

1. Motivations of study

One of the common approaches for promoting private sector development mainly in the developing countries is the privatisation of state-owned enterprises (SOE). The role of the private sector is increasingly recognized in making the economy more efficient and competitive. During the last 20 years the privatization programs had been launched on a global scale in both developed and developing countries. The OECD (2003) estimated that over the past two decades, more than 100 countries worldwide have adopted privatization policies (Tatahi and Hesmati, 2009). Megginson et al. (1996) have emphasised that revenues from privatization through initial public offerings (IPO) have reached US \$400 billion since 1979 and are expected to grow with an equal pace. According to Gibbon (1998), \$860 billion has been raised by the governments worldwide through selling state owned enterprises since 1987. Roche (1996) predicts that no less than \$6 trillion will be raised through privatizations over the next two decades. In 1997 alone, sales of public enterprises reached a total record of \$161 billion worldwide.

Studies of privatisation suggest that more than eighty countries have launched ambitious efforts to privatise their SOEs since 1980. During the period of 1980 to 1991, 6832 PEs had been privatised. This figure included 2,162 SOEs in developing countries (Kikeri et al., 1994). According to Gibbon (1998), \$860

billion has been raised by the governments worldwide through selling state owned enterprises since 1987.

Paul Starr (1988) recognizes two approaches of privatization: radical and conventional-with some subtle but important differences between two approaches. The radical view of privatisation is a reassignment of property rights, and more moderate conventional view of privatisation as an instrument for fine-tuning of a three-sector economy^{iv}. According to (Nellis, 1999), privatization has generally proved its worth in Central and Eastern Europe and the Baltic states and therefore, what seemed excellent on political reasons-the emphasis was usually on massive, speedy transactions with substantial ownership stakes awarded to 'insider' stakeholders. Author explains the success of this approach is due to the transition states closest to the western markets and traditions. Whereas, state led approaches (the functions assumed by government) become more common,^v grew as well, until, in many countries, SOEs practically dominated economic activity and when the public sector controls such a high proportion of economic activity, even in a market system, serious problems in the economy will often result such as, absence of competition, profit or profit motive, macroeconomic imbalances, artificial price hikes, excess employment and non-competitive industrial base (see e.g. Sullivan, CIPE for further discussion). Privatisation, when correctly conceived and implemented, fosters efficiency, encourages investment (and thus new growth and employment), and frees public resources for investment in infrastructure and social programmes. In developed countries such as the UK and Japan, where the role of PEs has been previously dominant, privatisation and deregulation are considered key instruments to economic restructuring and growth promotion. Even in former socialist economies like China and Russia, policy makers have seriously considered possibilities for privatisation in their efforts to develop the private sector (World Bank, 1996). Similarly, Asian countries have also realised the necessity of privatisation in the greater deregulation process. In fact, privatisation and, in broader terms, deregulation can be considered as a key factor behind the robust growth of the world's fastest growing region (Viravan, 1991).

Like many other Asian countries, Indonesia has followed the global privatisation trends. The privatisation policy adopted by the Indonesian government was gradual and in selected areas. This is understandable because the issue of privatisation has been politically sensitive and purposefully avoided in public discussion. In particular, the word 'privatisation' has been thought to be contrary to the spirit of nationalism and socialism that is strongly embedded in the Indonesian value system since independence. Privatisation was seen as another form of capitalism (Harahap, 1996). Another important factor that tended to favour a greater role for PEs and inhibited the process of privatisation in the form of ownership transfer was the ethnic sentiment among the public. There was a strong belief that most of possible buyers are the minority rich Chinese-Indonesian business community. As a result, there was a powerful political justification for the existence of PE in the Indonesian economic development (Habir, 1990; Pangestu, 1996; Robinson, 1997).

Despite the above issues, the dominance of PEs has gradually decreased since the 1980s. A number of issues have attributed to this process. Firstly, there

was an economic downturn in the early 1980s, which not only constrained government spending but also exposed weaknesses inherent in a high cost economy that was in part caused by inefficient PEs. Secondly, there was a desire to support the growth of the private sector, which fed from and contributed to a growing middle-class. Finally, there was a general weariness of pervasive government control in everyday life, which led to widening of support for the notion of deregulation (Yuen and Woon, 1992). In line with deregulation, the government began introducing public sector reform in 1988. This public sector reform included the possibility to privatise PEs whose performance were not impressive. However, a move toward privatisation as policy option in Indonesia started in 1990. The issue of the privatisation began in 1986 and generated a significant debate in Indonesia. The proponents of privatisation argued that PEs must be privatised in order to make them efficient, profitable and competitive because their performance was not impressive. For instance, the rate of return on assets has been consistently poor and has never exceeded five % during the period 1979 to 1992 (Hill, 1997). The average rate of return on asset was frequently in 2-3 % range. In addition to this proposition, the proponents of privatisation advised that since the oil boom era had finished, the government should give greater opportunity to the private sector in the economic development of Indonesia. These ideas were opposed by a number of government officials. They argued that PEs did play a significant role in the economic development. Increasing efficiency and profitability of privatised PEs has been questioned by them. Furthermore, they considered that the private sector was not ready to participate in the privatisation program due to lack of capital, lack of managerial experience and lack of knowledge. However, there was a common perception between proponents and opponents that the performance of PEs was poor and inefficient. The government continued to privatise a number of PEs during 1991-1997 through Initial Public Offering (IPO), Built Operate Transfer (BOT), and Joint Operation Scheme. Using the IPO method, the government sold 30 % of its share to foreign and domestic investors. Meanwhile, BOT and Joint operation scheme were implemented because the government could not finance its infrastructure and utilities investment. Therefore, the government involved the private sector in infrastructure and utilities development. However, this again accelerated criticism that the distribution of shares was not fair because of a lack of transparency and lack of a public tendering in the process (Sender, 1996; McLeod, 1997; Robinson, 1997). Since 1997, Indonesia has been experiencing growing economic turmoil. As a part of economic recovery and financing the government's budget deficit, the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank urged the Indonesian government to privatise more PE. The government has responded by planning to privatise twelve PEs by the year 2000. These included five state enterprises, which are listed on the Jakarta Stock Exchange (Evans, 1998). Since the crisis began, the government has been divested four PEs, while the privatisation of other PEs is continuing. However, this program has accelerated the public debate of the pros and cons of this policy. The discussion suggests that like other countries, Indonesia has followed global privatisation trends. The privatisation movement in Indonesia has been a gradual process and concentrated on certain sector.

Privatisation also remains a public policy issue in Indonesia. This article examines the impact of this policy to better understand the future of privatisation policy in Indonesia. During 1994-2003, 8 non financial SOEs that had been privatized by means of Initial Public Offering.

Table 1
List of SOEs Privatization During The Period 1994-2003

Years	Names of SOEs	Share divested (%)	Method of privatization	Government ownership (%)
1994	PT. Indosat Tbk	10 [*] 25	IPO	65
1995	PT. Tambang Timah Tbk	25 10 [*]	IPO	65
	PT. Telkom Tbk	10 [*] 13	IPO	80
1996	PT BNI Tbk	25 [*]	IPO	99 ^{**}
1997	PT. Aneka Tambang Tbk	35 [*]	IPO	65
1998	PT Semen Gresik Tbk	14	SS	51
1999	PT Pelindo II	49 ^{***}	SS	100
	PT Pelindo III	51 ^{****}	SS	100
	PT Telkom Tbk	9,62	Plecement	66,19
2001	PT Kimia Farma Tbk	9,2 [*]	IPO	90,8
	PT Indofarma Tbk	19,8 [*]	IPO	80,2
	PT Socfindo	30	SS	10
	PT Telkom Tbk	11,9	Plecement	54,29
2002	PT Indosat Tbk	8,06 41,94	Plecement SS	56,94 ^{*****} 14,39
	PT Telkom Tbk	3,1	Plecement	51,19
	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	15 1,26 [*]	IPO	84
	PT WNI	41,99	SS	0
2003	PT Bank Mandiri Tbk	20	IPO	80
	PT Indocement TP Tbk	16,67	SS	0
	PT BRI Tbk	30 15 [*]	IPO	57,57
	PT PGN Tbk	20 19 [*]	IPO	60,03
	PT Jasa Marga Tbk	30 [*]	IPO	70

Notes: * new stocks ; **: including bank's recapitulazation funds; *** stocks being sold are PT JICT, subsidiary of PT Pelindo II; **** Stocks being sold are those of PT TPS, subsidiary of PT Pelindo III; ***** privatization of PT Indosat was carried out at the same time by using two methods (Placement & SS); ***** PT Adhi Karya was privatized by using two methods (IPO & EMBO)

Source : www.bumn-ri.com

The transfer from the public to the private sector (Vickers and Yarrow, 1988) necessarily implies a change in the relationships between those responsible for the firm's decisions and the beneficiaries of the profit flows (the social view and the agency view). In general, the transfer of property rights leads to a different structure of management incentives, causing changes in managerial behavior, company performance, and quality of service in terms of access and use, but in the

words of Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole (1993), “theory alone is thus unlikely to be conclusive in this respect.” Empirical work, then, is crucial. Nevertheless, there is still little empirical knowledge about how well privatization has worked. There are difficult methodological problems as well as special problems with data availability and consistency. Furthermore, the possibility of sample selection bias can arise from several sources, including a government’s desire to sugarcoat the process by privatizing the healthiest firms first. Megginson and Netter (2001) carried out a very detailed review of 22 studies on non-transitional economies and concluded that Galal, Jones, Tandon, and Vogelsang (1994), La Porta and López-de-Silanes (1999), and the studies summarized in D’Souza and Megginson (1999) are the most solid and persuasive supporting the proposition that privatization improves the operating and financial performance of firms.

1.1.Problems of study

Based-on the above explanation, the questions of this study are double: *First*, how is the financial and operating performance of privatized firms in Indonesia? *Second*, how is the comparasion of pre and post privatization financial and operating performance of SOEs that were privitisized through share public offering during the period 1994-2003?

1.2.Objectives of study

1. To assess the operating performance of privatization processes of Indonesia in its pre-post scenarios.
2. To compare pre and post privatization financial and operating performance of Indonesian SOEs.

1.3.Contribution of study

On the theoretical level, this research is expected to add the existing literatures on the financial and operating performance of privatization in emerging market which underwent deeply financial turmoil in 1997. *On the practical level*, it provides new insight into the financial and operating performance of SOEs, and costs and benefits realized mainly by government in order to enhance SOEs productivity.

1.4. Literature review and previous empirical evidences

In most industrialised economies, privatization policies have been promoted on the grounds that it improves the efficiency of SOEs, raises large amounts of revenues for the government and promotes general public’s share ownership in cases where companies are sold by shares to the public. There is a view that all government intervention in the market place represents some restriction to individual liberty and, hence, is intrinsically undesirable. This withdrawal of state involvement in industry, which came to be known as ‘privatization’, takes place through a number of policy initiatives. The most common is a change from public to private in the ownership of an enterprise (or

part of an enterprise). Alternatively, public enterprise may remain in existence while privatization takes place without transfer of ownership of assets. Falling into this category are liberalization involving deregulation of controls on entry, price, output and profit, as well as the adoption of a commercial approach. According to this approach, the provision of a good or service moves from the public to the private sector, but with ultimate responsibility for providing the service remaining with the government, frequently referred to as “contracting-out”.

Positive views of privatization point to a number of benefits resulting from its adoption. Because privatization undermines the role of the unions, it permits a tough labour policy, which deals with the problems caused by inefficient workers, and thereby makes controlling employment levels much easier. It also permits the public sector economy to become familiar with ‘the enterprise culture’ as well as with the mechanism of the market place, leading to the rationalization of asset portfolios and the strategic reorganization of investment. This in turn leads to improvement of the company’s balance sheets, introducing sensitivity and product quality improvement while providing adequate facilities for merging as required by the economics of international competition. Furthermore, since public managers and politicians may act in favour of each other, issues such as wage levels, investment plans, borrowing requirements and restructuring projects are assumed to be resolved by this internal relationship. Privatization supposedly breaks up this relationship and introduces a more efficient process of decision-making. A final argument in favour of privatization identifies a number of financial benefits to the policy as follows: (1) The sale of public enterprises results in the removal of their capital investment programs from the public sector accounts; consequently, public sector borrowing is reduced, (2) It has been argued that private companies have more direct and faster access to the international capital market than public companies do, (3) Privatization contributes to the growth of the stock exchange, and can widen the capital market by bringing in many new investors, and (4) Privatization helps to minimise the commercial risk, and therefore reduces economic problems for the government in different periods, especially when the market is volatile or in recession.

It seems, however, that the above principle does not apply to private companies. It should be noted that, the limited evidence from the recent financial crisis shows that the state is invited to intervene in the private market to rescue banking, automobile and real estate markets in crisis to stabilize the financial market and to prevent bankruptcies and subsequent increasing unemployment. In terms of theoretical literature a large amount have dealt with the consequences of privatizations in terms of efficiency gains, different incentive structures, and increased competitive pressure, only a few empirical studies look at privatization programs either on a national or international scale.

As a matter of fact, the chief reason that governments increasingly choose to privatize SOEs is clear. Governments have been selling SOEs to private investors in order to improve these firms’ performance through the discipline of private ownership, as well as to raise revenue without raising taxes. The specific objectives articulated for privatization programs are often very ambitious, and

most tend to mirror the goals voiced by Thatcher's government during the early 1980s. These objectives are to: (1) raise new revenue for the state; (2) promote economic efficiency; (3) reduce government interference in the economy; (4) promote wider share-ownership; (5) provide the opportunity to introduce competition; and (6) develop the nation's capital markets.

The arguments for the efficiency enhancing nature of privatization benefit from the arguments of the efficiency superiority of private ownership. However, is private ownership more efficient than state ownership? If the answer is yes, it would be logical to argue that privatization, which is the transfer of ownership from the state to the private sector, will eventually lead to corporate performance improvements. The theoretical economic literature provides two sets of complementary arguments, which imply that private ownership is creating incentives for the more efficient management and operation. The first set of incentive arguments is based on product market competition (Kay and Thompson, 1986; Vickers and Yarrow, 1988, 1991; Birdsall and Nellis, 2003), whereas the second set of incentive arguments is based on information (Sappington and Stiglitz, 1987; Vickers and Yarrow, 1988; Shapiro and Willig, 1990; Laffont and Tirole, 1991).

According to the product market competition argument, a private firm in a competitive product market has incentives to improve production efficiency. Competition between firms in the market effectively regulates private company behavior and provides reasonably good incentives for production efficiency. But managers of state enterprises may not have sufficient incentives to control costs and achieve production efficiency, since they know that the government is likely to provide subsidies to offset any cost overruns. However, the idea that private ownership has more incentives to increase production efficiency has been challenged. If the market regulation practices are weak, the improved production efficiency may not compensate for the deterioration in allocational efficiency (Yarrow, 1986). Analyzing the relative performance of private regulated firms and state enterprises, Pint (1991) argues that both organizational forms are inefficient, but the bias is towards an excessive use of labor in the state enterprises, and an excessive use of capital in the private regulated firms. Moreover, Willner (1996) argues that privatization would be likely to reduce welfare. Comprising alternative theories, Vickers and Yarrow (1988: 44) write: "Where product markets are competitive, it is more likely that the benefits of private-monitoring systems (e.g., improved internal efficiency) will exceed any accompanying detriments (e.g., worsened allocative efficiency). Conversely, in the absence of vigorous product market competition, however, the balance of advantage is less clear cut and much depends upon the effectiveness of regulatory policy."

Newly-privatized firms cut employment, usually reducing the roll of white and blue-collar workers by nearly half. These numbers may actually underestimate the effects of privatization, since in the years before, most companies have already trimmed payrolls in order to prepare for divestiture. These findings suggest that transfers from workers to shareholders play a role in the success of privatization. However, productivity gains resulted in large real wage increases of 114 percent in the post-privatization period.

Property rights theory clearly demonstrates that private enterprises should perform better than either enterprises in the state sector or enterprises with a mixed ownership, empirical evidence on the performance of enterprises with a mixed ownership is scarce and tends to concentrate on companies from regulated industries. In one of the rare studies, Boardman and Vinning (1989) analyze a sample of the 500 largest non-US industrial firms and demonstrate that private enterprises outperform both state-owned enterprises and enterprises with a mixed ownership. They explain this result by the conflict between private and public shareholders in mixed enterprises, which inhibits the monitoring of management. Consequently, partial privatizations may be worse than complete privatization or continued state ownership.

Boycko et al. (1996), for example, do not see any benefits from the involvement of government in the management of state-owned enterprises (SOEs). They show that the higher the fraction of SOEs sold, the lower is the possibility that politicians directly interfere. They conclude that the relationship between corporate restructuring activities and the fraction sold is likely to be positive, resulting in a positive relationship between the fraction sold and the long run performance of privatized companies. Martin and Parker (1995) examine whether 11 British firms privatized from 1981 to 1988 improve profitability (measured as return on invested capital) and efficiency (annual growth in value-added per employee-hour) after being divested. They find mixed results. After adjusting for business cycle effects, fewer than half the firms perform better after being privatized. Continuing the theme of ambiguous British results, Newberry and Pollitt (1997) perform a social cost-benefit analysis of the 1990 restructuring and privatization of the Central Electricity Generating Board (CEGB). The authors conclude that CEGB's restructuring and privatization was in fact "worth it," but that these steps could have been implemented more efficiently and with greater concern for the public's welfare. On the other hand, the third study using U.K. data finds strong evidence that privatization improves performance. Eckel, Eckel, and Singal (1997) examine the effect of British Airways' 1987 privatization on *competitors'* stock prices and on fares charged in those routes where BA competes directly with foreign airlines. They find that the stock prices of U.S. competitors fall, on average, by a significant seven percent upon BA's privatization, implying that stock traders anticipate a much more competitive BA would result from the divestiture. Barberis, Boycko, Shleifer, and Tsukanova (1996) study post-sale performance changes in a sample of 452 Russian (retail) shops divested during the early-1990s. The authors document that the presence of new owners and managers raises the likelihood of a value-maximizing restructuring, but that offering equity incentives to existing workers does not--suggesting the importance of new human capital in effecting economic transformation.

1.5. Research Methodology

1.5.1. Type and source of data

This research utilizes secondary data. The population of this research consists of 22 SOEs that are listed in Jakarta Stock Exchange. A cross-sectional

time horizon is used on firm data to capture a snap shot analysis of the financial and operating performance of all SOEs under study at point in time. This research uses purposive sampling method (Sakaran, 2003). In order to be included in the sample, firms must be satisfied some criteria as follows :

1. The privatized company must employ the IPO as a privatization method.
The IPO method is more likely to be implemented to privatize SOEs in Indonesia compared with other methods like *Trade Sales*, *Strategic Partner*, *Management Buy Out (MBO)*, etc, since it is more transparent in nature and enables the investors to purchase stocks directly.
2. Privatized firms must be non financial firms, because the problem agency in non financial firms differs markedly from financial ones.
3. Three annual financial data are available consecutively prior to and following privatization.

The number of sample that fulfills these criteria is 8 firms. Table 2 presents a sample of 8 SOEs which are being used in this study.

Table 1.2
Non Financial SOEs being Privatized during the Period 1994-2003

Year of Privatization	SOEs being privatized
1994	PT Indosat Tbk
1995	PT Tambang Timah Tbk
	PT Telkom Tbk
1997	PTAneka Tambang Tbk
2001	PT Kimia Farma Tbk
	PT Indofarma Tbk
2002	PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk
2003	PT PGN Tbk

1.5.2. Variables of study

All variables are measured by financial ratios. In order that the results of study could be comparable with previous ones, the financial ratios that will be used in this study are similar as those used by Juliet D'Sauza and William Megginson (1995) and is in line with KEP No. 100/MBU/2002 on the financial performance of SOEs I Indonesia as well. Profitability ratios are measured by Return on Equity (earnig after tax/shareholder's equity), Return on Investment (EBIT+depreciation/capital employed), Cash ratio (cash+bank+short-term securities/current liabilities), Current Ratio (current assets/current liabilities), Receivable Collection Period (receivables/sales x 365 days), Inventory Turnover (total sales/inventory), Total Asset Turnover (total sales/capital employed), and Equity to Total Asset Ratio (shareholder's equity/total assets).

1.5.3. Hypothesis

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$: The financial and operating performance of SOEs before and after the privatization is not different.

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$: The financial and operating performance of SOEs before and after the privatization is different.

1.5.4. Data Analysis Technique

Mean difference test is used to compare the financial and operating performance of SOEs in Indonesia.

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} - 2r \left[\frac{(S_1)}{(\sqrt{n_1})} \right] \left[\frac{(S_2)}{(\sqrt{n_2})} \right]}} \quad \text{where,} \quad S =$$

$$\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$$S_1^2 = \frac{n \sum x_1^2 - (\sum x_1)^2}{n - (n - 1)} \quad S_2^2 = \frac{n \sum x_2^2 - (\sum x_2)^2}{n - (n - 1)}$$

where :

\bar{x}_1 = sampel mean prior to privatization

\bar{x}_2 = sampel mean after privatization

S_1 = Standard deviation prior to privatization

S_2 = Standard deviation after privatization

S_1^2 = Sample variance prior to privatization

S_2^2 = Sample variance after privatization

n_1 = number of observation prior to privatization

n_2 = number of observation after privatization

In addition, the nonparametric *Wilcoxon Signed-Rank Test* is used as our method of testing for significant changes in the variable values. Since financial ratios do not follow a normal distribution, the interpretation of the findings of the parametric analysis becomes difficult. This leads to the selection of nonparametric tests as a suitable method for testing the postprivatization performance improvements. This test was also used by other researchers like Müslümov (2005) in Turkey.

2. THEORITICAL ISSUES AND EMPIRICAL EVIDENCE ON PRIVATIZATION

2.1. Benefits And Costs of Privatization Based on Theoritical Models

In most industrialised economies, privatization policies have been promoted on the grounds that it improves the efficiency of SOEs, raises large

amounts of revenues for the government and promotes general public's share ownership in cases where companies are sold by shares to the public. The most common is a change from public to private in the ownership of an enterprise (or part of an enterprise). Alternatively, public enterprise may remain in existence while privatization takes place without transfer of ownership of assets. Falling into this category are liberalization involving deregulation of controls on entry, price, output and profit, as well as the adoption of a commercial approach. According this approach, the provision of a goods or service moves from the public to the private sector, but with ultimate responsibility for providing the service remaining with the government, frequently referred to as "contracting-out".

Positive views of privatization point to a number of benefits resulting from its adoption. Because privatization undermines the role of the unions, it permits a tough labour policy, which deals with the problems caused by inefficient workers, and thereby makes controlling employment levels much easier. It also permits the public sector economy to become familiar with 'the enterprise culture' as well as with the mechanism of the market place, leading to the rationalization of asset portfolios and the strategic reorganization of investment. This in turn leads to improvement of the company's balance sheets, introducing sensitivity and product quality improvement while providing adequate facilities for merging as required by the economics of international competition. Furthermore, since public managers and politicians may act in favour of each other, issues such as wage levels, investment plans, borrowing requirements and restructuring projects are assumed to be resolved by this internal relationship. Privatization supposedly breaks up this relationship and introduces a more efficient process of decision-making. A final argument in favour of privatization identifies a number of financial benefits to the policy as follows: the sale of public enterprises results in the removal of their capital investment programs from the public sector accounts; consequently, public sector borrowing is reduced; It has been argued that private companies have more direct and faster access to the international capital market than public companies do; privatization contributes to the growth of the stock exchange, and can widen the capital market by bringing in many new investors; privatization helps to minimise the commercial risk, and therefore reduces economic problems for the government in different periods, especially when the market is volatile or in recession.

As a matter of fact, the chief reason that governments increasingly choose to privatize SOEs is clear. Governments have been selling SOEs to private investors in order to improve these firms' performance through the discipline of private ownership, as well as to raise revenue without raising taxes. The specific objectives articulated for privatization programs are often very ambitious, and most tend to mirror the goals voiced by Thatcher's government during the early 1980s. These objectives are to: (1) raise new revenue for the state; (2) promote economic efficiency; (3) reduce government interference in the economy; (4) promote wider share-ownership; (5) provide the opportunity to introduce competition; and (6) develop the nation's capital markets.

The arguments for the efficiency enhancing nature of privatization benefit from the arguments of the efficiency superiority of private ownership. However, is private ownership more efficient than state ownership? If the answer is yes, it would be logical to argue that privatization, which is the transfer of ownership from the state to the private sector, will eventually lead to corporate performance improvements. The theoretical economic literature provides two sets of complementary arguments, which imply that private ownership is creating incentives for the more efficient management and operation. The first set of incentive arguments is based on product market competition (Kay and Thompson, 1986; Vickers and Yarrow, 1988, 1991; Birdsall and Nellis, 2003), whereas the second set of incentive arguments is based on information (Sappington and Stiglitz, 1987; Vickers and Yarrow, 1988; Shapiro and Willig, 1990; Laffont and Tirole, 1991).

According to the product market competition argument, a private firm in a competitive product market has incentives to improve production efficiency. Competition between firms in the market effectively regulates private company behavior and provides reasonably good incentives for production efficiency. But managers of state enterprises may not have sufficient incentives to control costs and achieve production efficiency, since they know that the government is likely to provide subsidies to offset any cost overruns. However, the idea that private ownership has more incentives to increase production efficiency has been challenged. Moreover, Willner (1996) argues that privatization would be likely to reduce welfare. Comprising alternative theories, Vickers and Yarrow (1988: 44) write: "Where product markets are competitive, it is more likely that the benefits of private-monitoring systems (e.g., improved internal efficiency) will exceed any accompanying detriments (e.g., worsened allocative efficiency) ... In the absence of vigorous product market competition, however, the balance of advantage is less clear cut and much depends upon the effectiveness of regulatory policy."

The information argument rests on the informational asymmetries between principals and agents. Two interrelated theories; public choice theory (Niskanen, 1971; Buchanan, 1972) and property rights theory (Coase, 1960; Alchian, 1965; De Alessi, 1980) are based on the agency problem theory and imply that agents (managers) have more incentives to maximize their utilities at the expense of the principals (shareholders) under state ownership. These theories suggest that bureaucrats are interested in more pay, power and prestige. Although private sector managers are also interested in these 'three P's', the 'agency' relationship is less complex under private ownership (Demsetz, 1988). Moreover, the control of principals, the discipline of capital markets and bankruptcy threat helps to overcome informational asymmetries between principalagents, and enforce agents (managers) to maximize principals' (shareholders) wealth. These mechanisms are supposed to prevent deviations from efficiency rules.

2.2. Financial and Operational Performances of Privatized Firms: International Perspectives

Finance literatures explaining financial and operational performance of SOE both in the developing countries and the developed countries are bulky. So, it is unlikely to present those empirical studies exhaustively. Claessens, Djankov, and Pohl (1997) examine the cross-sectional determinants of performance improvements during 1992 to 1995 for a sample of 706 Czech firms involved in the mass privatizations during 1991 and 1992. Using a Tobins-Q measure, they document that privatized firms do prosper, primarily because of the concentrated ownership structures that result from privatization. LaPorta and López-de-Silanes (1997) have tested whether the performance of a sample of 218 Mexican SOEs privatized through June 1992 improves after divestiture. The authors compare the profitability, employment, and efficiency levels of the privatized firms to an industry-matched control group, and find that the former SOEs rapidly close the yawning performance gap that had existed prior to divestment. Output increases 54.3 percent (in 3 The privatization and liberalization of the British electricity industry is also discussed at length in Newberry (1997) and Vickers and Yarrow (1991). None of these works showers the Thatcher government with praise for its policy decisions, though Beesley and Littlechild do find the RPI-X price regulation system adopted in the U.K. to be much superior to the U.S. rate of return regulatory regime. spite of a reduced level of investment spending), sales per employee roughly doubles, and privatized firms reduce blue and white-collar employment by half.

Ramamurti (1997) examines the 1990 restructuring and privatization of Ferrocarril Argentinos, the Argentine national freight and passenger railway system, and documents an incredible 370 percent improvement in labor productivity and an equally-striking (and not unrelated) 78.7 percent decline in employment--from 92,000 to 18,682 workers. He concludes that these performance improvements could not have been achieved without privatization. The final focused empirical study, D'Souza and Megginson (1998), examines performance changes following the privatization by share offering of 17 national telecommunications companies between 1981 and 1994. They find persuasive evidence that profitability, output, operating efficiency, capital investment spending, the number of access lines (a proxy for units of physical output), and average salary per employee all increase significantly after privatization. Leverage declines significantly, while employment declines insignificantly.

2.3. Financial Performance of SOEs in Indonesia Before and After Privatization

2.3.1. Financial Performance

a. Return On Equity (ROE)

Return on equity (ROE) is one of the two basic factors in determining a firm's growth rate of earnings. It measures the rate of return that the firm earns on stockholders' equity. This ratio is influenced directly by the amount of debt a firm is using to finance assets. The most likely result of the privatization is an increase in the profitability to shareholders. However, it appears that privatization of SOEs in our sample has resulted in the deterioration of profitability to shareholders.

Overall, four out of eight privatized companies experienced deteriorating *ROE* values or 50 percent of all company sample. The average of *ROE* prior to privatization reached 25,83 percent, but after privatization *ROE* went down sharply to 16,92 percent. This is attributable to the deterioration of *ROE* values from pharmaceutical industry, namely Kimia Farma and Indo Farma, each from 37, 07 percent and 37,63 percent to 7,01 percent and 0,38 percent successively. Whilst, Indosat also experienced a sharp decline in *ROE* from 38,01 percent to 22, 48 percent. Furthermore, it can be seen that almost individual firm booked a decline of *ROE* values in the first year of privatization, in exception of Tambang Timah and Perusahaan Gas Negara. The latter in the early third millennium had obtained some sale contracts from various foreign companies. A decreasing *ROE* values following the privatization from this study bears out the results obtained by Dockner, Mosburger, and Schahausser-Linzatti (2005) in Austria. This result also confirms that observed by Hakro and Akram (2009) in Pakistan, and Müslümov (2005) in Turkey. Müslümov found *ROE* declined significantly after privatization in Turkey. Moreover, from three sectors under study, Hakro and Akram found that only cement sector that was experiencing the significant difference of *ROE* values before and after privatization. It seems that industry sector could be having an impact on financial performance of SOEs measured by *ROE*. A decline *ROE* is evidence that the firm's new investments have offered a lower *ROE* than its past investments (Bodie, Kane, and Marcus, 2002). The deterioration in after-tax *ROE* for the post-privatization period is also attributed to deterioration of the industrial trend.

b. Return On Investment (ROI)

Return On Investment shows the firm's ability to gain profitability in order to cover its funds invested for a given period of time. This *ROE* is measured by EBIT plus depreciation divided by capital employed. Two SOEs out of eight which had been privatised (Telkom and PGN) showed a rise in *ROI* after privatization, while the remaining noted a fall in *ROI*, implying that financial performance of most SOEs degrades in years following the privatization.

c. Cash Ratio

Cash ratio is used to measure the firm's ability to service its current debt on due by making use of its liquid funds it owns in the short-run. One of the objectives of privatization is to improve firm's liquidity. During the period of study, only two SOEs which have experienced decline in liquidity, measured by cash liquidity namely Kimia Farma and PT Indofarma. While the others, their liquidity has increased significantly, particularly those operating in the mining sector. Even, Aneka Tambang has the highest increase in cash ratio from 7,32 percent prior to privatization to 154,75 percent after privatization. Overall, average *ROE* increases significantly by double after privatization. It means the liquidity position of firms is very good following the privatization.

d. Current Ratio

This ratio measures the ability of the firm to pay off its current liabilities by liquidating its current assets. To put another way, it indicates the firm's ability to avoid insolvency in the short run. High ratio means strong ability to pay short obligations. Too high ratio means firm invest more capital in low profitable assets.

The result of study implies that only Indo Farma that underwent a slight fall in current ratio, meaning that firm's ability to meet its short-term liabilities compared to those of other SOEs was not so bad. Indosat's current ratio is the highest compared with other firms by an average rate of 336,99 percent prior to privatization and increase significantly following privatization, reaching at 438,11percent. Conversely, PT Telkom which is operating in the same industry has current ratio much lower than PT Indosat, that is 93,92 percent. This means that PT Telkom faces liquidity difficulty severely before privatization. Its condition, however, turns out to be better off after privatization. Aneka Tambang, a SOE operating in the mining sector, experiences an increase in current ratio significantly from 105,34 percent to 265,82 percent by average after privatization. So do Bukit Asam and Gas Negara. These results is contradictory with those obtained by Pham and Carlin (2007) in Vietnam. Theses two scholars find strong ability of Vietnamese SOEs to pay short debts, but after listing their ability to pay short obligation decreases from 3.0 to lower rate at around 2.0.

2.3.2. Operational Performance

a. Collection Periods

Collection Periods is the average number of days account receivable remains outstanding. It usually is measured by dividing a firm's year-end receivables balance by the average daily credit sales (based on a 365 year). The shorter the collection periods, the better firm's cash flows position.

Based on the analysis of data, three firms have increased collection periods after privatization. They are Indosat, Tambang Timah, and Aneka Tambang. Other firms underwent slightly decreasing collection periods with exception of IndoFarma in which its collection period went down nearly 50 percent. Overall, collection periods of SOEs after privatization have degraded. If industry collection period before privatization is considered to be 59,25 days, then there are three firms whose collection period is higher than industry norm, namely Indosat, Indofarma and bukit Asam. A similar result is also found for the same firms after the privatization. In this periode, the average collection period of industry is 56,13 days. An average collection period substantially above the industry norm is not desirable and may indicate too liberal a credit policy. Ultimately, a firm's manager must determine is the liberal policy generates enough incremental sales and profits to justify the incremental costs.

b. Inventory Turnover

Inventory turnover measures how effectively the firm is managing its inventory. It is measured by dividing total sales with year-end inventory. The higher the inventory turnover, the better its liquidity position. It usually is measured by dividing year-end inventory with sales. There are three firms whose average inventory turnover are lower than average industry level before

privatization: Telkom, Bukit Asam and Perusahaan Gas Negara, while the others inventory turnover are higher than industry norms. After privatization, the condition is unchanged for these three firms. Even, their inventory turnover tends to degradate. This suggest that these three firms are holding two much inventory. Two factors may be responsible for these three companies allocating an excessive amount of resources to inventory (Moyer, McGuigan, and Kretlow: 1998): *First*, the firm may be attempting to carry all possible types of replacement parts so that every order can be fulfilled immediately. *Second*, some of inventory that firms own may be damaged, obsolete, or slow moving. Stock falling in these categories has questionable liquidity and should be recorded at a value more reflective of the realizable market value. Overall, it can be known that two firms' inventory turnover is too high (Indosat and Indo Farma). It may mean the firm is frequently running out of certain items in stock and losing sales to competitors.

c. Total Assets Turnover

Total assets turnover indicates how effectively a firm uses its total resources to generate sales. In exception of Telkom and Indofarma, all firm before privatization shows total assets turnover that is higher than its industry norm. In may mean that the firm is able to manage its total assets effectively to generate higher profits. The condition, however, has changed considerably after privatization because there are four firms whose total assests turnover has decreased a little bit significantly. They are Tambang Timah, Aneka Tambang, Bukit Asam, and Perusahaan Gas Negara. Fortunately, Telkom and Indofarma that have previously had total assets turnover lower than industry norm turn out to be higher than their counterparts both in the same industry and in the different industry.

d. Equity to total assets ratio

Equity to total assets ratio indicates financial leverage of a firm. It is a measure of financial risk. The higher this ratio, the less the firm uses external sources of financing. Figure 9 shows that industry's equity to total assets ratio before privatization is, by average, 50,16 percent and increases slightly after privatization to 61,69 percent. This reflects a rise in financial risk in the industry level. Individually, financial risk for nearly all companies is very low, particulary before privatization.

After privatization, however, this ratio has changed mainly for some firms such as Tambang Timah, Telkom, Aneka Tambang, Kimia Farma, Indofarma, Bukit Asam, and Perusahaan Gas Negara. The rise in financial risk is plausible by the fact that most firms after privatization set to issue long-term debt, because they have an increasingly easy-access to obtain the financing from external source of funds.

3. Parametric and Non Parametric Test of SOEs' Financial and Operational Performance After Privatization

3.1. Parametric Test (mean difference test)

Results of mean difference test is presented in Table 3 From the table we can see that Indosat has ROE, ROI, and TATO values which are different significantly before and after privatization. Kimia Farma experienced significantly different only for ROE and Inventory Turnover. For Indo Farma, it has a ROE value and current Ratio significantly different between two periods of the test. Bukit Asam realized different performance for liquidity, measured by current ratio, for efficiency as shown by collection period ratio, and Total Asset Turnover as well. Finally, Perusahaan Gas Negara has a difference in performance in terms of collection period and inventory turnover.

Table 3
Mean Difference Test of SOEs' Financial and Operational Performance Before and After Privatization

Firms		ROE	ROI	Cash Ratio	Current Ratio	Collection Period	Inventory TO	TATO	Equity/TA
Indosat	Mean	0,155*	0,555*	-0,069	-1,341	-11,000	34,330	0.926*	0.0480
	Sdt	0,032	0,047	0,084	1,337	42,567	36,501	0,070	0,097
Tambang Timah	M	-0,357	0,187	-0,732	-0,301	-10,333	na	-0,012	-0,236
	Sdt	0,046	0,111	0,855	1,330	24,027	na	0,352	0,125
Telkom	M	-0,006	-0,734	-0,488	-0,222	3,000	11,000	-0,422	-0,067
	Sdt	0,072	0,287	0,329	0,221	2,000	5,196	0,105	0,010
Aneka Tambang	M	-0,902	0,398	-1,474	-1,604	-9,666	23,333	1,046	-0,301
	Sdt	0,078	0,230	0,344	0,194	15,143	28,023	0,660	0,046
Kimia Farma	M	0,301*	-0,014	0,014	-0,380	1,333	23,30*	-0,399	-0,239
	Sdt	0,076	0,024	0,201	0,159	7,023	6,506	0,396	0,132
Indo Farma	M	-0,372*	0,253	0,538	0,325*	39,330	17,330	-0,266	-0,062
	Sdt	0,096	0,173	0,360	0,113	20,256	40,265	0,300	0,154
Bukit Asam	M	-0,002	0,644	-1,171	0,689*	7,300*	-4,000	0,290*	-0,018
	Sdt	0,101	0,084	0,494	0,152	2,886	4,000	0,090	0,027
Perusahaan Gas Negara	M	0,012	-0,387	-1,088	-0,791	4,667*	4.667*	0,174	-0,031
	Sdt	0,146	0,673	0,922	0,748	1,527	0,577	1,619	0,105

Source : Indonesia Stock Exchange, 2010 (self calculated)

Note : * significant at $\alpha = 0,05$; na = not available

3.2. Non Parametric Test

Table 4 presents non parametric test by using Wilcoxon Signed-Rank Test The aim of this test is to examine if there is a performance difference in financial and operational aspects for SOEs before and after privatization on the basis of ratios being utilized.

Table 4
Wilcoxon Signed-Rank Test for Financial And Operational Performance of SOEs Before and After Privatization

Ratios	Z value	Prob.	Decisions
--------	---------	-------	-----------

ROE	-0,840	0,401	Tidak signifikan
ROI	-0,560	,575	Tidak signifikan
Cash Ratio	-1,521	,128	Tidak signifikan
Current Ratio	-2,100	,036*	Signifikan
Collection period	0,000	1,00	Tidak signifikan
Inventory turnover	-2,197	,028*	Signifikan
Total assets turnover	-0,420	,674	Tidak signifikan
Equity to total assets turnover	-2,100	,036*	Signifikan

Source : Indonesia Stock Exchange, 2010 (self calculated)

Note : * significant at $\alpha = 0,05$

Overall, there exists financial and operational performance before and after privatization in terms of ratios being used. All firms have different performance significantly between two periods of the test with respect to liquidity (measured by current ratio) and efficiency (inventory turnover and equity to total assets turnover). The results of study are consistent with those obtained by Müslümov (2005), Gupta (2005) and other reseaechers like Boubakri, Narjess, and Jean-Claude Cosset, (1998), Megginson, William L., and Jeffry M. Netter, (1998), and Máximo (2003) for the developing countries.

Limitation o f Study

This study which is focusing only on financial and operational performance descriptively as done by many schoolars without taking into consideration some significantly economic shocks happened during the period of study in Indonesia, so it might result in bias in the computation of financial ratios. In addition, this study is mainly emphasized on accounting data, not market data especially in the measurement of market-based performance after privatization.

4. CONCLUDING REMARKS

Privatization that has been carried out for some SOEs in Indonesia does not necessarily give high benefits. Most SOEs booked decreased profitability during 3 years after privatization. SOEs' liquidity is not so good as expected, mainly cash ratio. In the meantime, current ratio, another liquidity measurement for some firms show a slight improvement. Privatization in almost industry sectors did not have a significant impact on the technical efficiency of privatized enterprises, measured by efficiency ratios. Most firms appeared to have not gained high benefit in term of efficiency, in exception of certain firms operating in the mining and gas sector such as PT Bukit Asam and Perusahaan Gas Negara. Both firms have enjoyed the efficiency improvement following the privatization. Prior to privatization the firm's debt is low, mostly below fifty percent of total assets. Following the privatization period, firm's debt has increased considerably from fifty percent by average to sixty percent. This is attributable to an increasingly debt uses of the firms, because they have many choices in raising capital from numerous sources of financing. Results of parametic test (mean difference test)

are found that there is not significant impact of privatization on the financial performance and the efficiency improvement enjoyed by SOEs in the short period of time. This might be due to management style in those firms are not changed immediately. In addition, the government ownership is still dominant so that bureaucracy style is more prevalent. The results of non parametric test by using Wilcoxon Signed-Rank Test show that firm's liquidity, inventory turnover, and financial risk is significantly different between period of pre-privatization and post-privatization.

Since companies have still big monopoly power due to significant government ownership and their holding companies sometimes have acted as private monopoly, then it is expected the government ownership will be reduced gradually, mainly for SMEs that might not be classified as strategic sectors such as transportation sector providing public services. For SOEs considered strategic from the national security point of view, the government ownership should be dominant. Government must remain controlling shareholders. This is crucial to avoid private monopoly. As shown in the theoretical literature, private monopolies have incentives to cut down output and increase prices above the socially optimal level. The existence of market poor regulation practices could have contributed to a reduction of welfare as a result of privatization. Weak corporate governance structure in most privatized SOEs may have distorted incentives in the private sector. Reasonably, the government must strengthen the implementation of SOEs corporate governance. Under a stronger corporate governance context the financial and operating performance of privatized firms have improved, thus operational efficiency in order to boost productivity and gain high profitability.

In view of the limitation of this research focusing on financial and operational performance descriptively, for the future research it would be interesting to analyze the market performance of privatized SOEs after privatization by using the event study method as done by for instance Müslümov (2005) in the developing Market and Nanda (2005) for the developed market.

REFERENCES

- Barberis, Nicholas, Maxim Boycko, Andrei Shleifer, and Natalia Tsukanova, (1996), How does privatization work? Evidence from the Russian shops, *Journal of Political Economy* 104, n764-790.
- Bennell, Paul, (1997), Privatization in sub-Saharan Africa: Progress and prospects during the 1990s, *World Development* 25, 1785-1803.
- Boardman, Anthony, and Aidan R. Vining, 1989, Ownership and performance in competitive environments: A comparison of the performance of private, mixed, and state-owned enterprises, *Journal of Law and Economics* 32, 1-33.
- Boubakri, Narjess, and Jean-Claude Cosset, (1998), The financial and operating performance of newly privatized firms: Evidence from developing countries, *Journal of Finance* 53, 1081-1110.
- Boycko, Maxim, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, (1996), A theory of privatisation, *Economic Journal* 106, 309-319.

- Claessens, Stijn, Simeon Djankov, and Pohl, (1997), Ownership and Corporate Governance: Evidence from the Czech Republic, World Bank, Washington, DC, Policy Research Paper No. 1737.
- Cragg, Michael I., and I.J. Alexander Dyck, (1998), Privatization, compensation and management incentives: Evidence from the United Kingdom, Working Paper, Harvard University.
- Dewenter, Kathryn, and Paul H. Malatesta, (1998), State-owned and privately-owned firms: An empirical analysis of profitability, leverage, and labor intensity, *Working Paper*, University of Washington.
- D'Souza, Juliet, and William L. Megginson, (1998), Sources of performance improvement in privatized firms: Evidence from the telecommunications industry, *Working Paper*, University of Oklahoma.
- Eckel, Catherine, Doug Eckel, and Vijay Singhal, 1997, Privatization and efficiency: Industry effects of the sale of British Airways, *Journal of Financial Economics* 43, 275-298.
- Engelbert J. Dockner, Georg Mosburger, and Michaela M. Schahausser-Linzatti (2005) "The Financial and Operating Performance of Privatized Firms in Austria" *Working Paper* Department of Finance, University of Vienna
- Galal, A., Jones, L.P., Tandon, P and Vogelsang I. (1994), *Welfare Consequences of Selling Public Enterprises: An Empirical Analysis*, Washington, DC, Oxford University Press.
- Gupta, Nandini (2005) Partial Privatization And Firm Performance, *The Journal of Finance*. vol. LX, no. 2. april 2005 p.987-1015
- Hakro, Ahmed Nawaz and Muhammad Akram (2009) "Pre-Post Performance Assessment Of Privatization Process In Pakistan" *International Review of Business Research Papers Vol.5 No. 1, January, p. 70-86*
- Kikeri, Sunita, John Nellis, and Mary Shirley, (1992), *Privatization: The Lesson of Experience* (The World Bank, Washington, D.C.).
- La Porta, Rafael, and Florencio López-de-Silanes, (1997), Benefits of privatization--Evidence from Mexico, *Private Sector* (June), 21-24.
- Loizos Heracleous (2001), State Ownership, Privatization And Performance In Singapore: An Exploratory Study From A Strategic Management Perspective, *Asia Pacific Journal of Management*, 18, 69–81, 2001
- Martin, Stephen, and David Parker, (1995), Privatization and economic performance throughout the UK business cycle, *Managerial and Decision Economics* 16, 225-237.
- Megginson, William L., and Jeffrey M. Netter, (1998), From state to market: A survey of empirical studies on privatization, Working Paper, New York Stock Exchange and SBF Bourse de Paris.
- Megginson, William L., Robert C. Nash, and Matthias VanRandenborgh, (1994), The financial and operating performance of newly privatized firms: An international empirical analysis, *Journal of Finance* 49, 403-452.
- Moyer, R.C, J.R. McGuigan, and W.J.Kretlow (1998) "Contemporary Financial Management" 7th Ed. South-Western college publication

- Müslümov, Alövsat (2005) "The financial and operating performance of privatized companies in the Turkish cement industry" METU Studies in Development, 32 (June), 2005, 59-101
- Nellis, Jhon (1999) "Time to Rethink Privatization in Transition Economies?" IFC international finance corporation discussion paper number 38, the world bank washington, D.C.
- Netter, J.M, and Megginson, W.L. (2001), From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization, Journal of Economic Literature, Vol. 39, No. 2, June 2001
- Newbery, David, (1997), Privatization and liberalisation of network utilities, *European Economic Review* 41, 357-383.
- Newbery, David and Michael G. Pollitt, (1997), The restructuring and privatization of Britain's CEGB--Was it worth it?, *Journal of Industrial Economics* 45, 269-303.
- Ojat Darajat (2004) » Privatisasi (Sebuah Pengalaman) » Jurnal Studi Indonesia, Vol. 14, No. 1, Maret 2004, 49 – 69
- Pandu Patriadi (2003) » Studi Banding Kebijakan Privatisasi BUMN Di Beberapa Negara « *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 4 Desember 2003 hal.55-103
- Paul Starr, (1988), "The Meaning of Privatization", Yale Law and Policy Review 6 1988.: 6-41. in Alfred Kahn and Sheila Kamerman, eds., Privatization and the Welfare State (Princeton University Press, 1989).
- Pham , Cuong Duc and Tyrone M Carlin (2007)" Some Evidence On The Financial Consequences Of Privatisation In A Transitional Economy Context", working papers Graduate School of Management- Macquarie University- Australia
- Ramamurti, Ravi (1997), Testing the limits of privatization: Argentine railroads, World Development, Vol. 25, Issue 12, December 1997, p.1973-1993
- Torero Cullen, Máximo (2003) « Peruvian privatization : impacts on firm performance » « Inter-American Development Bank , Research Network Working Paper #R-481